



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA JAMBI TAHUN 2020**



**R K P D  
2020**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	I-4
<b>BAB II           GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.2 Kondisi Kependudukan.....	II-9
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-12
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-90
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD .....	II-101
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-101
<b>BAB III          RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 .....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 .....	III-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-14
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-19
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-19
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-25
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-27

<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 .....	IV-6
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 .....	IV-6
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020 .....	IV-11
4.2.3.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi .....	IV-13
4.2.4.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2020 .....	IV-24
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1.1. Diagram Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2020 .....	I-2
2.1. Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi.....	II-2
2.2. Peta Topografi Kota Jambi .....	II-3
2.3. Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi .....	II-7
2.4. Peta Rawan Bencana Kota Jambi.....	II-9
2.5. Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013-2017 .....	II-10
2.6. Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2018 .....	II-14
2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	II-21
2.8. Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2018.....	II-27
3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan Perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan Nasional .....	III-3
3.2. Porsi Masing-masing Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Kota Jambi Tahun 2018.....	III-8
3.3. Perkembangan Provinsi Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2018.....	III-13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

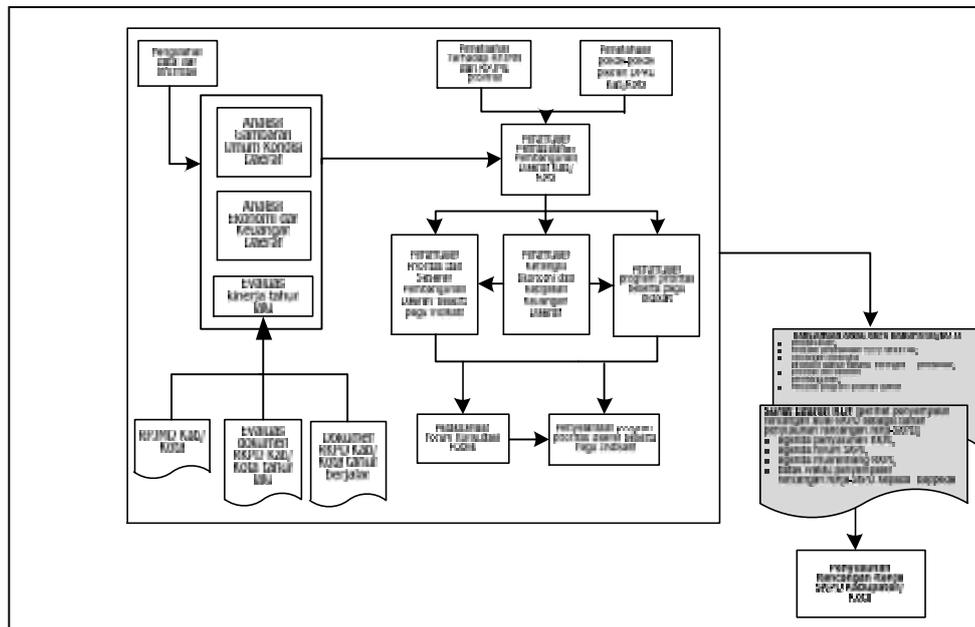
Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir atau Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2020 ini berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Proses penyusunan Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Diagram alur penyusunan Rancangan Awal RKPD 2020

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2020 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.

## **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Ranwal RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **1.4.1 Maksud**

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

##### **1.4.2 Tujuan**

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program/kegiatan yang didasarkan pada Prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2020, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
  - 1.4. Maksud dan Tujuan
  - 1.5. Sistematika Pembahasan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - 2.1. Kondisi Umum Daerah
    - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
    - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
    - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
    - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
    - 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
  - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
  - 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII P E N U T U P

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Kota Jambi adalah Ibukota sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Provinsi Jambi, Kota Jambi mempunyai jumlah penduduk pada siang hari mencapai ± 1 juta jiwa sedangkan pada malam hari ± 750 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Jambi. Kondisi umum daerah Kota Jambi dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota**

Kota Jambi secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41" Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

➤ Sebelah Timur : berbatsan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

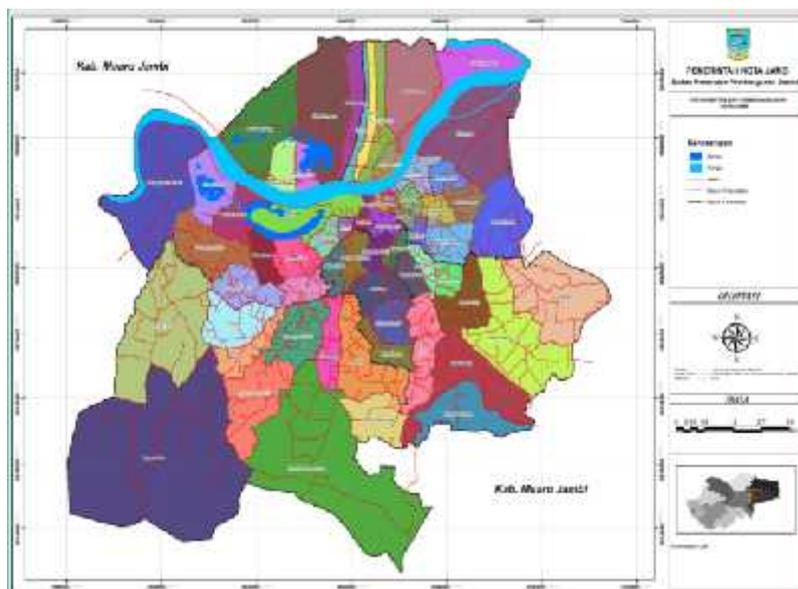
Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1986 seluas 205,38 KM<sup>2</sup> atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 seluas 175,53 KM<sup>2</sup>, dimana secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Telanaipura	19,20	10,93%	6
2.	Kotabaru	26,26	14,96%	5
3.	Jambi Timur	14,32	8,15%	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27%	5
5.	Jelutung	7,63	4,34%	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95%	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14%	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65%	5
9.	Pelayangan	12,77	10,12%	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71%	5
11.	Paal Merah	23,77	13,54%	5
<b>Jumlah</b>		<b>175,53</b>	<b>100</b>	<b>62</b>

Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini

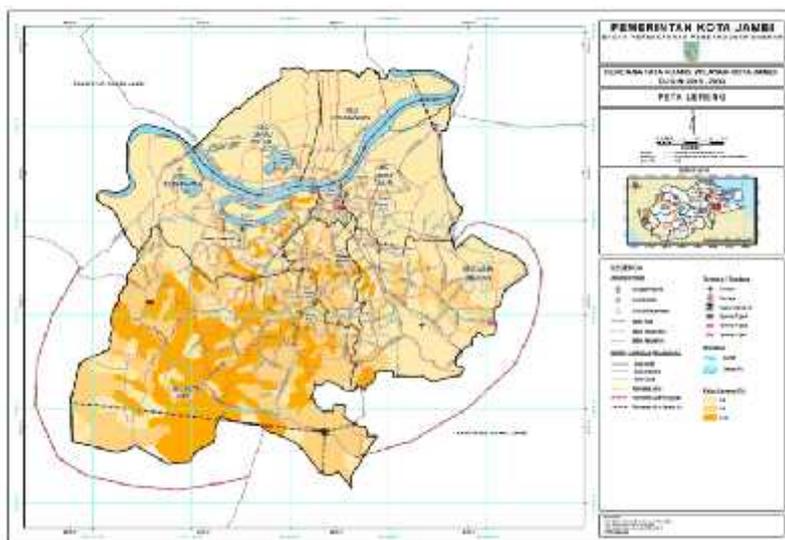


Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.1.  
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

### 2.1.1.2. Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2018 (data diolah)

Gambar 2.2.  
Peta Topografi Kota Jambi

### 2.1.1.3. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan

batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 2.2. berikut

Tabel 2.2.  
Formasi Geologi Kota Jambi

NO.	FORMASI GEOLOGI	LUAS (HA)	%
1.	Endapan Permukaan	10.454	50,90
2.	Batuan Sedimen Umur miosen	8.375	40,78
3.	Batuan Sedimen Umur pliosen	1.709	8,32
Jumlah		20.538	100,00

Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

#### 2.1.1.4. Klimatologi

Pada tahun 2017 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April – bulan Oktober, sementara musim timur angin bertiup ke arah timur dan selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2017 suhu udara rata-rata Kota Jambi terendah sebesar 26,5°C terjadi pada bulan Februari dan tertinggi sebesar 27,2°C terjadi pada bulan November, dengan kelembaban udara rata-rata terendah 82% pada bulan Mei dan tertinggi sebesar 85% pada bulan Maret. Rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Rata-rata suhu dan kelembaban udara

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	35,4	22,0	27,1	98	42	83
Februari	33,5	21,5	26,5	100	52	84
Maret	34,4	22,0	26,8	100	56	85
April	34,2	22,8	26,9	100	58	83
Mei	33,4	22,5	27,2	100	59	82
Juni	34,0	21,5	27,2	99	57	85
Juli	33,8	22,4	26,8	100	55	84
Agustus	33,6	21,6	27,0	99	49	82
September	34,1	22,1	27,1	100	51	84
Oktober	34,6	23,4	27,1	98	58	85
November	34,0	21,7	27,2	100	52	84
Desember	34,4	21,6	26,9	100	56	85

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2017 terjadi pada bulan November yaitu 340 mm<sup>3</sup> dan paling rendah terjadi pada bulan Juli yaitu 55 mm<sup>3</sup>. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 25 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 15 hari terjadi pada bulan Juni. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Curah Hujan dari Hari Hujan Menurut Bulan**  
**Di Kota Jambi Tahun 2017**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan (hari)
Januari	129	20
Februari	191	21
Maret	196	23
April	298	24
Mei	158	22
Juni	233	15
Juli	55	17
Agustus	68	19
September	216	21
Oktober	230	19
November	340	18
Desember	273	25

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2018*

#### **2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi**

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikit nya terdapat 7 (tujuh) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Besar

DAS Kenali Besar memiliki panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar) melewati Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Teluk Kenali menuju ke Danau Sipin dan akhirnya akan bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kenali kecil

DAS Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh Sembilan hektar), melewati Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura kemudian masuk ke danau teluk kenali menuju ke danau sipin dan bermuara ke Sungai Batanghari.

3. Sungai Kambang

DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar) Daerah pengaliran Sungai Kambang melewati Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura dan bermuara di danau sipin dan berakhir di sungai Batanghari.

4. Sungai Asam

DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi dan berakhir di sungai Batanghari.

5. Sungai Tembuku

DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar). Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Kecamatan Jambi Selatan, sebagian antara Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur dan berakhir di sungai Batanghari.

6. Sungai Selincah

DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) Daerah pengaliran

Sungai Selincih meliputi Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur dan Berakhir di Sungai Batanghari.

#### 7. Sungai Danau Teluk

DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan hektar). Daerah pengaliran Sungai Danau teluk Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau teluk di Kecamatan Danau teluk.

Disamping itu, selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

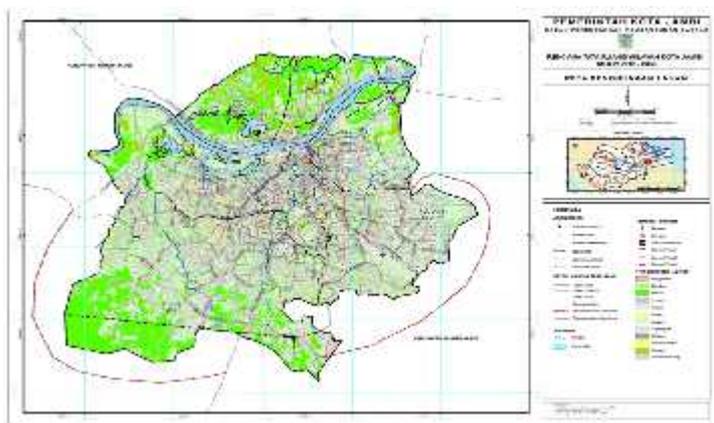
Dari Citra satelit Kota Jambi tahun 2013 dengan memperhatikan kemajuan pembangunan tahun 2017 dengan skala 1:5.000 dengan persentase tertinggi pada penggunaan lahan permukiman sebesar 26,48%, Hutan sebesar 18,29% dan Bangunan 13,56%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5.  
Penggunaan Lahan Di Kota Jambi

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan	2.380	13,56
Belukar	1.073	6,11
Danau	245	1,39
Hutan	3.209	18,29
Industri	113	0,64
Jalan	744	4,24
Kebun	2.083	11,87
Kilang	0	0,00
Kolam	100	0,57
Ladang	1.181	6,73
Lapangan	29	0,17
Makam	34	0,19
Mesjid	13	0,08
Parit	23	0,13
Permukiman	4.648	26,48
Sawah	636	3,62
Sungai	758	4,32

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan	2.380	13,56
Tanah Kosong	281	1,60
<b>Jumlah</b>	<b>17.553</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Peta Citra Satelit 2013,2018 (data diolah)



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033,2018

Gambar 2.3.  
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

#### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013–2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan

Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

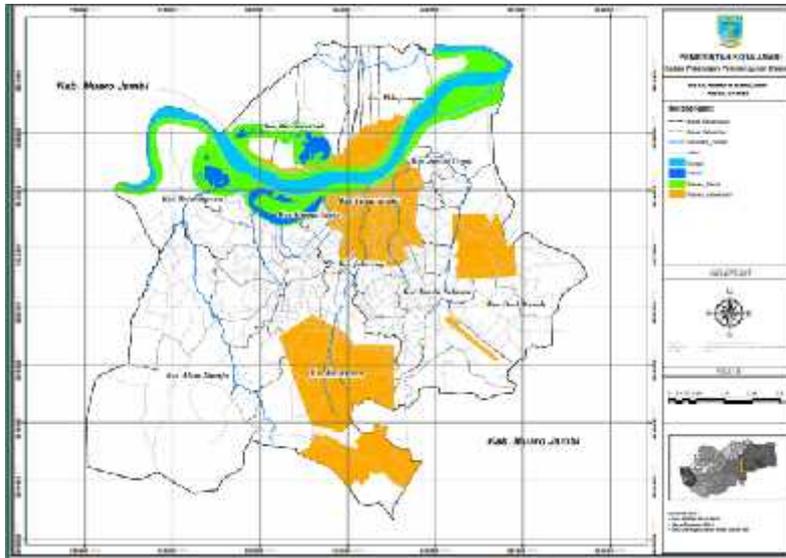
- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan – kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi – lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- a. Kecamatan Danau Teluk;
- b. Kecamatan Pelayangan
- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2017

Gambar 2.4.

Peta Rawan Bencana Kota Jambi

## 2.1.2. Kondisi Kependudukan

### 1. Jumlah Penduduk

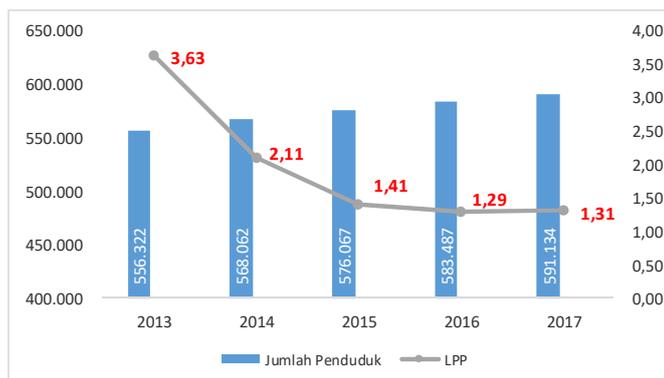
Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 556.332 jiwa, dan terus meningkat menjadi 591.134 jiwa pada tahun 2017. Adapun pertumbuhan penduduknya setiap tahun selama kurun waktu 2013-2017 berkisar antara 1,29% sampai dengan 3,63% pertahunnya dan dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,95%. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.6.  
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2013	556.332	3,63
2014	568.062	2,11
2015	576.067	1,41
2016	583.487	1,29
2017	591.134	1,31
Rata-rata		1,95

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya, seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Kota Jambi Dalam Angka, 2018 (data diolah)

Gambar 2.5.  
Perkembangan Demografi Kota Jambi 2013 – 2017

Penduduk Kota Jambi tahun 2017 sebanyak 591.134 jiwa yang terdiri atas 297.036 jiwa penduduk laki-laki dan 294.098 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015. Pada tahun 2017 penduduk Kota Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 1,31 persen dengan rasio jenis kelamin 101,15. Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada kurun waktu

tahun 2013-2017 berada di Kecamatan Alam Barajo kemudian Kecamatan Paal Merah. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah juga tinggi. Kepadatan penduduk di Kota Jambi tahun 2017 mencapai 3.384 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Jambi Selatan sebesar 8.245 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Danau Teluk sebesar 791 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 99.366 jiwa pada tahun 2017 atau sekitar 16,73 persen dari total penduduk Kota Jambi, diikuti oleh Kecamatan Paal Merah sebanyak 92.061 jiwa atau 15,50 persen dan Kecamatan Kotabaru sebanyak 75.370 jiwa atau sekitar 12,69 persen. Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Danau Teluk yaitu sebanyak 12.029 jiwa, atau 2,03 persen dari total penduduk Kota Jambi.

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah dikarenakan kedua kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Jambi Selatan 8.245 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2017, Kecamatan Jelutung 7.989 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pasar Jambi 7.174 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 791 Jiwa/Km<sup>2</sup> hingga 6.630 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2017 per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan ( Jiwa/Km <sup>2</sup> )				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kotabaru	26,26	2.798	2.655	2.729	2.799	2.870
2.	Alam Barajo	39,87	2.056	2.254	2.317	2.377	2.492
3.	Jambi Selatan	7,51	8.320	7.953	8.053	8.139	8.245
4.	Paal Merah	23,77	3.517	3.667	3.709	3.744	3.873
5.	Jelutung	7,64	8.365	8.124	8.181	8.234	7.989
6.	Pasar Jambi	1,68	7.885	7.513	7.496	7.474	7.174
7.	Telanaipura	19,2	2.250	2.553	2.578	2.603	2.688
8.	Danau Sipin	7,28	5.960	6.432	6.496	6.557	6.630
9.	Danau Teluk	15,21	786	786	789	791	791
10.	Pelayangan	12,78	1.030	1.037	1.046	1.054	1.055
11.	Jambi Timur	14,33	4.602	4.596	4.616	4.634	4.658
Kota Jambi		175,53	3.169	3.236	3.282	3.324	3.384

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,00 sampai dengan 101,17 untuk kurun waktu tahun 2013–2017. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Jambi menurut jenis kelamin.

Tabel 2.8.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Jambi  
Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Kelamin				Laki + Perempuan	Sex Ratio
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2013	286.289	50,29	283.042	49,71	569.331	101,00
2014	285.492	50,26	282.570	49,74	568.062	101,01
2015	289.713	50,29	286.354	49,71	576.067	101,17
2016	293.217	50,25	290.270	49,75	583.487	101,03
2017	297.036	50,25	294.098	49,75	591.134	101,15

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Melihat tingginya angka *sex ratio* di beberapa kecamatan yang merupakan sentra bisnis, ditengarai kaum migran yang masuk ke Kota Jambi lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia produktif (usia 15-64 tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja. Analisa ini didukung oleh lebih tingginya jumlah penduduk usia produktif laki-laki dibandingkan perempuan pada tahun 2015. Tidak dapat dipungkiri, tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi telah menjadi magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah di Kota Jambi. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana dan prasarana pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan pelaksana pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong naiknya angka IPM.

### 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b) peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
  - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
  - peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
  - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
  - Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
  - Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

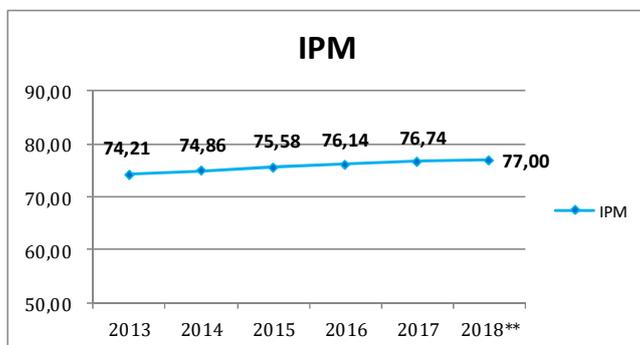
#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2013 – 2018\*\* dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 (data diolah)

Gambar 2.6.  
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2013-2018\*\*

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,21 poin meningkat menjadi 77,00 poin pada tahun 2018\*\*

atau mengalami kenaikan 2,79 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menandakan bahwa angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah serta pendapatan perkapita masyarakat semakin baik.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.9.  
Data Kemiskinan Kota Jambi 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	9,96	8,94	9,67	8,87	8,84
Penduduk Miskin (orang)	50.090	50.950	55.510	51.610	52.080
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	346.099	359.686	372.600	397.088	413.722
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,23	0,98	1,36	1,59	1,13
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,20	0,25	0,43	0,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,84 % pada tahun 2017. Dengan tingkat kemiskinan 8,84% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana tingkat kemiskinan berada pada 9,96%, maka laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan penurunan angka yang signifikan dengan rata-rata penurunan sekitar 0,03% pertahun.

### 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

#### a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3)

industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

#### b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

#### c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan dan tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Nilai PDRB menurut lapangan usaha bisa disajikan atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dan juga dapat disajikan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	259.500,2	285.976,4	310.926,4	318.350,8	340.031,5
B Pertambangan dan Penggalian	945.870,0	541.713,1	519.833,2	407.736,9	580.545,2
C Industri Pengolahan	2.254.423,9	2.467.766,5	2.655.297,7	2.830.668,4	2.998.229,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	30.776,1	38.209,0	47.918,2	55.563,3	61.123,6
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.108,5	56.355,4	62.059,2	66.782,8	71.414,8
F Konstruksi	1.830.534,8	1.929.782,2	2.090.379,7	2.308.869,3	2.554.035,8
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.021.859,3	5.999.141,8	7.233.207,3	7.952.233,5	8.896.456,5
H Transportasi dan Pergudangan	2.162.103,7	2.535.824,6	3.072.603,0	3.329.315,5	3.625.367,9
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	439.121,6	484.230,5	558.390,6	631.987,4	682.667,2
J Informasi dan Komunikasi	788.716,6	941.735,8	1.115.130,2	1.205.592,8	1.333.277,7
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.179.766,0	1.251.236,8	1.465.861,8	1.536.121,0	1.582.389,7
L Real Estate	480.596,2	526.996,7	586.664,0	634.744,9	715.290,4
M Jasa Perusahaan	554.290,1	633.413,1	729.191,4	792.132,2	860.369,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.597.559,5	2.021.306,5	2.152.994,6	2.263.899,9	2.503.891,0
P Jasa Pendidikan	830.899,7	956.332,3	1.091.377,9	1.190.858,8	1.288.997,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	419.766,2	473.040,5	544.568,9	587.990,4	635.721,5
R Jasa Lainnya	130.618,2	150.391,9	169.123,8	181.462,2	199.918,8
<b>PDRB</b>	18.977.510,71	21.293.452,91	24.405.528,00	26.294.309,98	28.929.728,48
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	18.129.994,94	20.855.763,68	23.967.718,64	25.904.375,94	28.368.101,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 2.11.  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176.100,2	180.644,7	183.855,4	187.682,2	194.162,7
B Pertambangan dan Penggalian	766.189,1	526.090,1	509.005,0	418.285,0	432.125,5
C Industri Pengolahan	1.866.508,2	1.962.940,8	2.045.889,0	2.124.292,0	2.205.318,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	27.639,6	29.450,5	31.178,2	31.726,2	33.645,4
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.081,3	41.270,4	42.990,4	43.958,3	46.128,1
F Konstruksi	1.479.150,5	1.516.106,7	1.578.659,8	1.703.565,8	1.809.482,7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.510,2	4.219.918,0	4.544.458,6	4.784.479,7	5.120.193,4
H Transportasi dan Pergudangan	1.887.577,5	1.995.122,5	2.242.842,8	2.398.293,7	2.516.597,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.428,7	350.227,2	379.073,8	415.165,6	447.018,7
J Informasi dan Komunikasi	709.840,2	776.304,7	843.486,1	900.356,3	974.847,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi	919.657,9	936.666,3	1.050.080,2	1.085.941,6	1.079.091,2
L Real Estate	392.461,3	402.011,5	421.727,5	444.988,5	474.671,3
M Jasa Perusahaan	418.398,7	446.930,1	476.179,4	504.519,6	531.246,6
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.142.178,9	1.215.546,1	1.251.814,4	1.282.749,4	1.341.765,9
P Jasa Pendidikan	674.122,5	725.595,6	771.534,5	805.599,0	858.389,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.416,9	401.894,3	430.571,1	457.497,0	486.045,0
R Jasa Lainnya	115.968,0	125.234,4	133.095,9	139.239,0	148.782,7
<b>PDRB</b>	15.080.229,5 1	15.851.953,8 0	16.936.442,0 8	17.728.338,7 7	18.699.511,0 1
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	14.387.706,8 4	15.400.736,5 0	16.484.678,8 1	17.321.018,1 6	18.279.010,5 3

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

#### 4. Struktur Perekonomian

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	259.500,2	285.976,4	310.926,4	318.350,8	340.031,5
B Pertambangan dan Penggalian	945.870,0	541.713,1	519.833,2	407.736,9	580.545,2
C Industri Pengolahan	2.254.423,9	2.467.766,5	2.655.297,7	2.830.668,4	2.998.229,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	30.776,1	38.209,0	47.918,2	55.563,3	61.123,6
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.108,5	56.355,4	62.059,2	66.782,8	71.414,8
F Konstruksi	1.830.534,8	1.929.782,2	2.090.379,7	2.308.869,3	2.554.035,8
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.021.859,3	5.999.141,8	7.233.207,3	7.952.233,5	8.896.456,5
H Transportasi dan Pergudangan	2.162.103,7	2.535.824,6	3.072.603,0	3.329.315,5	3.625.367,9
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	439.121,6	484.230,5	558.390,6	631.987,4	682.667,2
J Informasi dan Komunikasi	788.716,6	941.735,8	1.115.130,2	1.205.592,8	1.333.277,7
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.179.766,0	1.251.236,8	1.465.861,8	1.536.121,0	1.582.389,7
L Real Estate	480.596,2	526.996,7	586.664,0	634.744,9	715.290,4
M Jasa Perusahaan	554.290,1	633.413,1	729.191,4	792.132,2	860.369,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.597.559,5	2.021.306,5	2.152.994,6	2.263.899,9	2.503.891,0
P Jasa Pendidikan	830.899,7	956.332,3	1.091.377,9	1.190.858,8	1.288.997,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	419.766,2	473.040,5	544.568,9	587.990,4	635.721,5
R Jasa Lainnya	130.618,2	150.391,9	169.123,8	181.462,2	199.918,8
<b>PDRB</b>	18.977.510,71	21.293.452,91	24.405.528,00	26.294.309,98	28.929.728,48
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	18.129.994,94	20.855.763,68	23.967.718,64	25.904.375,94	28.368.101,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor sama seperti pada tahun 2017, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2018 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 2.13  
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1,34	1,27	1,21	1,18
B Pertambangan dan Penggalian	4,98	2,54	2,13	1,55	2,01
C Industri Pengolahan	11,88	11,59	10,88	10,77	10,36
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,18	0,20	0,21	0,21
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
F Konstruksi	9,65	9,06	8,57	8,78	8,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,46	28,17	29,64	30,24	30,75
H Transportasi dan Pergudangan	11,39	11,91	12,59	12,66	12,53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,27	2,29	2,40	2,36
J Informasi dan Komunikasi	4,16	4,42	4,57	4,58	4,61
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,22	5,88	6,01	5,84	5,47
L Real Estate	2,53	2,47	2,40	2,41	2,47
M Jasa Perusahaan	2,92	2,97	2,99	3,01	2,97
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,42	9,49	8,82	8,61	8,66
P Jasa Pendidikan	4,38	4,49	4,47	4,53	4,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,22	2,23	2,24	2,20
R,S Jasa Lainnya	0,69	0,71	0,69	0,69	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	95,53	97,94	98,21	98,52	98,06

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

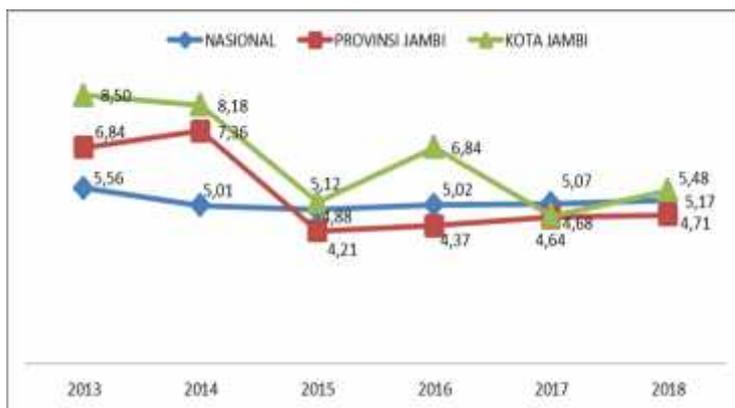
\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 30,75%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,53%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,36%;

sektor Konstruksi sebesar 8,83%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,66%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

**5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 201-2018, LPE Kota Jambi tertinggi pada tahun 2013 tercatat 8,50%. Pada tahun selanjutnya, LPE Kota Jambi mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2018, LPE Kota Jambi tercatat sebesar 5,48% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,71% dan LPE Nasional yang tercatat sebesar 5,17%.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Gambar 2.7.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sedangkan untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14.  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176.100,2	180.644,7	183.855,4	187.682,2	194.162,7
B Pertambangan dan Penggalian	766.189,1	526.090,1	509.005,0	418.285,0	432.125,5
C Industri Pengolahan	1.866.508,2	1.962.940,8	2.045.889,0	2.124.292,0	2.205.318,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	27.639,6	29.450,5	31.178,2	31.726,2	33.645,4
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.081,3	41.270,4	42.990,4	43.958,3	46.128,1
F Konstruksi	1.479.150,5	1.516.106,7	1.578.659,8	1.703.565,8	1.809.482,7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.510,2	4.219.918,0	4.544.458,6	4.784.479,7	5.120.193,4
H Transportasi dan Pergudangan	1.887.577,5	1.995.122,5	2.242.842,8	2.398.293,7	2.516.597,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.428,7	350.227,2	379.073,8	415.165,6	447.018,7
J Informasi dan Komunikasi	709.840,2	776.304,7	843.486,1	900.356,3	974.847,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi	919.657,9	936.666,3	1.050.080,2	1.085.941,6	1.079.091,2
L Real Estate	392.461,3	402.011,5	421.727,5	444.988,5	474.671,3
M Jasa Perusahaan	418.398,7	446.930,1	476.179,4	504.519,6	531.246,6
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.142.178,9	1.215.546,1	1.251.814,4	1.282.749,4	1.341.765,9
P Jasa Pendidikan	674.122,5	725.595,6	771.534,5	805.599,0	858.389,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.416,9	401.894,3	430.571,1	457.497,0	486.045,0
R Jasa Lainnya	115.968,0	125.234,4	133.095,9	139.239,0	148.782,7
<b>PDRB</b>	15.080.229,5 1	15.851.953,8 0	16.936.442,0 8	17.728.338,7 7	18.699.511,0 1
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	14.387.706,8 4	15.400.736,5 0	16.484.678,8 1	17.321.018,1 6	18.279.010,5 3

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2018 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5.120.193,4 juta; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.516.597,0 juta; sektor Industri Pengolahan sebesar 2.205.318,0 juta; sektor Konstruksi sebesar 1.809.482,7; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.341.765,9 juta.

Sedangkan untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15.  
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,45	2,58	1,78	2,08	3,45
B Pertambangan dan Penggalian	0,78	-31,34	-3,25	-17,82	3,31
C Industri Pengolahan	6,58	5,17	4,23	3,83	3,81
D Pengadaan Listrik dan Gas	17,53	6,55	5,87	1,76	6,05
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,26	2,97	4,17	2,25	4,94
F Konstruksi	4,07	2,50	4,13	7,91	6,22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	12,13	7,69	5,28	7,02
H Transportasi dan Pergudangan	8,21	5,70	12,42	6,93	4,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,07	4,10	8,24	9,52	7,67
J Informasi dan Komunikasi	3,82	9,36	8,65	6,74	8,27
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	1,85	12,11	3,42	-0,63
L Real Estate	4,02	2,43	4,90	5,52	6,67
M Jasa Perusahaan	6,16	6,82	6,54	5,95	5,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,63	6,42	2,98	2,47	4,60
P Jasa Pendidikan	1,32	7,64	6,33	4,42	6,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,51	10,28	7,14	6,25	6,24
R,S Jasa Lainnya	3,25	7,99	6,28	4,62	6,85
PDRB	8,18	8,18	5,12	6,84	4,68
PDRB TANPA MIGAS	8,61	8,61	7,04	7,04	5,07

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

## 6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013-2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga

berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.16.  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,9 5	18.977,5 1	21.293,4 5	24.405,5 3	26.294,3 1
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,7 4	15.080,2 3	15.851,9 5	16.936,4 4	17.728,3 4
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	10.710,2 5	12.086,2 7	13.123,5 7	14.189,0 1	15.682,3 4
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.122,70	9.598,45	10.072,1 5	10.526,9 6	11.071,3 6
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	65,44	63,65	63,54	62,16	62,45

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.287,97 miliar rupiah (2014); 4.702,83 miliar rupiah (2015); dan 5.000,77 miliar rupiah (2016); 5.154,58 miliar rupiah serta (2017) sebesar 5.274,12. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.17.  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.287,97	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.274,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.357,06	3.411,11	3.424,91	3.311,91	3.399,45
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	25,86	24,78	23,49	21,12	20,06
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,08	22,62	21,61	19,55	19,18

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.677,71 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp.4.6378 milyar pada tahun 2017. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur

Tabel 2.18.  
 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota  
 Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>PDRB</b>						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,9 5	18.977,5 1	21.293,45	24.405,5 3	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,7 4	15.080,2 3	15.851,95	16.936,4 4	17.728,34
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.677,71	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.006,63	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.678,80
<b>Persentase PMTB thd PDRB (persen)</b>						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28,21	26,31	24,06	22,99	23,76
2.	Atas Dasar Harga Konstan	28,74	26,75	25,33	24,94	26,39

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

## 7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,12 juta rupiah naik menjadi 44,48 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2013 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 24,48 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 29,99 juta rupiah pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.19.  
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	29.128,83	33.407,46	39.963,50	41.827,03	44.481,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.484,41	26.546,80	27.517,55	29.026,25	29.990,39
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	6,21	8,42	3,66	5,48	3,32

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

## 8. Inflasi

Laju inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 laju inflasi terjadi pada kelompok *volatile food*.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.  
Inflasi Kota Jambi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Inflasi	8,72	1,37	4,54	2,68	3,02	4,06

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Inflasi Kota Jambi tahun 2018 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,89 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,54 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,53 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,19 persen.

Jika melihat inflasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang terjadi pada *volatile food* maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

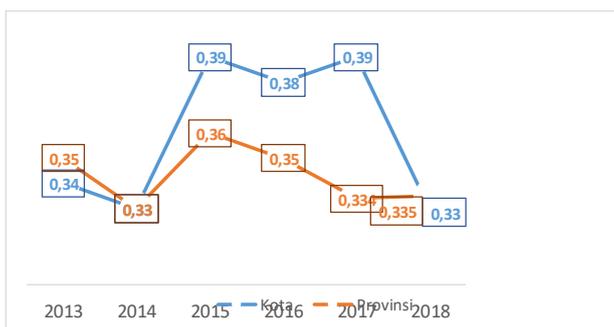
## 9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2018 mencapai 0,33 yang berarti pemerataan



pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,335. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita(pendapatan) penduduk Kota Jambitelah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Gambar 2.8.  
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2013-2018

## 2.1.2.1. Kesejahteraan Sosial

### 2.1.2.1.1. Pendidikan

#### 1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antaralain tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas gurupun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21.  
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	411.458	419.340	406.997	461.118	461.198	461.198
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	418.164	425.462	407.235	461.203	461.257	461.257
Angka melek huruf	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dimana pada data tersebut angka melek huruf untuk Penduduk diatas 15 tahun sudah sangat baik, yakni tersisa 0.01 yang harus menjadi perhatian kita.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,57 Tahun 2013 menjadi 10,67 pada Tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima Tahun yang lalu. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.  
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2012-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,57	10,62	10,63	10,65	10,66	10,67

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018

## 3. Angka Harapan Lama Sekolah

HLS Kota Jambi dari 13,62 poin menjadi 14,62 poin pada Tahun 2018 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan angka harapan sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23.  
Perkembangan Angka Harpan Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Lama Sekolah	13,62	13,80	13,80	13,81	14,63	14,62

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018

#### 4. Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, capaian APK pada tingkat SD/MI dari Tahun 2013 sampai 2018 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 102,23% sedangkan di Tahun 2018 menjadi 111,00 %. Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat. Di Tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 108,84% meningkat di Tahun 2018 menjadi 112,02%.

Pada tingkat SMA, APK tingkat SMA belum mencapai 100%, tertinggi baru mencapai 93,68% di Tahun 2016. Namun angka capaiannya mengalami kenaikan setiap Tahunnya. Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

Perkembangan angka partisipasi kasar di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24.

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C  
di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI/Paket A							
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64.398	70.520	71.011	71.197	73.485	73.521
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234
3	APK SD/MI, Paket A	102,23%	108,84%	108,87%	108,88%	110,95%	111,00
SMP/MTS/Paket B							
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24.634	24.634	34.894	35.962	34.985	34.992
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	22.633	31.614	32.574	31.236	31.236
3	APK SMP/MTS, Paket B	108,84%	108,84%	110,38%	110,40%	112,00%	112,02
SMA/SMK/Paket C							
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28.955	28.955	35.015	33.710	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	32.201	38.532	35.984	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APK SMA/SMK, Paket C	89,92%	89,92%	90,87%	93,68%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Persentase angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terhitung cukup tinggi bahkan melebihi 100% untuk tingkat SD dan SMP, hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari tahun 2013 sampai 2018 mengalami peningkatan dan berada pada angka di atas 100%. Di tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 102,23% meningkat di tahun 2018 menjadi 111,00%.

Pada tingkat SMP, APK di tingkat SMP sudah mencapai lebih dari 100% dan cenderung meningkat. Di tahun 2013 APK Kota Jambi mencapai 108,84% meningkat di tahun 2018 menjadi 112,02 %.

Pada tingkat SMA, APK tingkat SMA belum mencapai 100%, tertinggi baru mencapai 93,68% di tahun 2016. Namun angka capaiannya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Melihat angka capaian APK Kota Jambi di tiap tingkatan yang mendekati atau bahkan melebihi angka 100%, hal ini dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

#### 5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat tertentu pada tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada tahun bersangkutan.

Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.  
Angka Kelulusan SD/MI di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308
2.	Jumlah SiswaSD	10.695	9.842	11.164	11.164	11.074	11.308
3.	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.26.  
Angka Kelulusan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380
2.	Jumlah SiswaSMP/MTS	7.465	10.551	13.448	13.448	13.343	13.380
3.	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambimulai

tingkat SD/MI dengan tingkat SMP/MTS masih terbilang tinggi. Selain itu juga jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTS tersebar di wilayah Kelurahan sehingga memudahkan murid untuk bersekolah.

## 6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:

Tabel 2.27.  
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan  
SMA/SMK/Paket C  
di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>SD/MI/Paket A</b>							
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	60.847	64.684	65.154	65.325	66.212	66.212
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	62.992	64.793	65.228	65.393	66.234	66.234
3	APM SD/MI, Paket A	99,76%	99,83%	99,89%	99,90%	99,97%	99,97%
<b>SMP/MTS/Paket B</b>							
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	20.679	29.573	30.775	29.989	29.698	26.698
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22.633	31.614	32.574	31.614	31.236	31.236
3	APM SMP/MTS, Paket B	91,37%	93,54%	94,48%	94,86%	95,08%	95,08%
<b>SMA/SMK/Paket C</b>							
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 tahun	23.865	30.140	28.436	28.162	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32.201	38.532	35.984	36.550	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	APM SMA/SMK, Paket C	74,11%	78,22%	79,02%	79,22%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Tabel di atas menunjukkan APM Kota Jambi yang meningkat setiap tahunnya di setiap tingkatan. Untuk tingkat SD/MI, pada tahun 2013-2018 hampir seluruh anak usia sekolah bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,97%. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang

dicapai cukup tinggi di kisaran 95,08%. Sementara itu untuk capaian angka APM di tingkat SMA/MA/SMK, masih dapat dikatakan cukup tinggi dengan angka yang berkisar antara 74,11 sampai 79,22%.

#### 2.1.2.1.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28.  
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Kematian Bayi	27	9	9	9	12	7
2	Jumlah Kelahiran Hidup	13.592	13.079	12.745	10.430	13.039	10.603

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Indikasi penurunan angka kematian bayi dari 27 jiwa pada Tahun 2013 menjadi 7 orang Tahun 2018 didukung dengan meningkatnya jumlah kelahiran hidup bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi periode 2013-2018. Hal ini didukung juga dengan fakta adanya penurunan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB di Kota Jambi yang semakin menurun dari 0.03% Tahun 2013 turun menjadi 0.01 Tahun 2018.

Tabel 2.29.  
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	18	10	11	5	6	4
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805
3	Rasio PBGB (%)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

#### 2.1.2.1.3. Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan

kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30.  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351	-	268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	-	284.018
3	Rasio PYB (%)	92,69	89,87	92,68	-	94,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

\*\*\* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

#### 2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.31.  
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2018

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2013 sampai dengan 2018, jumlah klub olahraga sebanyak 30 klub 28 cabang olahraga dengan jumlah gedung hanya 2 unit, artinya gedung olahraga masih kurang.

Tabel 2.32.  
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Jumlah Cabang Olahraga (unit)	28	28	28	28	28	30
Jumlah Gedung Olahraga (unit)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2018

### 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

##### 2.1.3.1.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

##### 2.1.3.1.1.1. Urusan Pendidikan

#### 3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12); usia SMP (13–15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2018 untuk usia SD/MI sebesar 100,48 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 100,00 persen, lebih 0,48% adalah siswa luar Kota Jambi yang bersekolah di Kota Jambi. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 83,00 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2013 mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi. Semakin tinggi tingkatan sekolahnya semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya.

Tabel 2.33.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	62.847	64.684	67.552	62.444	66.212	61.106
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	58.300
1.3.	APS SD/MI	99,76	99,83	99,85	99,84	99,99	100,48

2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	28.369	29.573	30.357	27.918	29.698	26.651
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236	30.795
2.3.	APS SMP/MTs	91,66	93,54	93,63	99,82	95,07	83,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

#### 4. Ketersediaan Sekolah

Pada Tabel 2.30. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2013-2018. Secara umum, sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.34.  
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>SD/MI</b>							
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.317	2.327	2.327	2.432	2.595	2.602
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.992	64.793	67.651	62.544	66.234	58.300
1.3.	Rasio	0,036	0,035	0,034	0,038	0,039	0,044
<b>2. SMP/MTS</b>							
2.1.	Jumlah gedung sekolah	997	1.007	1.007	1.007	1.125	1.131
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.948	31.614	32.420	27.968	31.236	30.795
2.3.	Rasio	0,032	0,031	0,033	0,036	0,037	0,037

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Sebaran gedung sekolah perkecamatan dapat terlihat pada tabel 2.31, untuk tingkat SD dan SMP relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid dapat melengkapinya.

Tabel 2.35.  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2018

No	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs
1.	Kotabaru	37	10
2.	Alam Barajo	10	2
3.	Jambi Selatan	43	10
4.	Paal Merah	5	6

5.	Jelutung	31	6
6.	Pasar Jambi	6	3
7.	Telanaipura	38	15
8.	Danau Sipin	3	2
9.	Danau Teluk	10	1
10.	Pelayangan	6	1
11.	Jambi Timur	40	12
<b>Kota Jambi</b>		<b>229</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36.  
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2018

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	37	191	51	41
2.	Alam Barajo	26	53	8	18
3.	Jambi Selatan	76	236	55	46
4.	Paal Merah	6	19	17	9
5.	Jelutung	77	118	41	33
6.	Pasar Jambi	3	28	10	11
7.	Telanaipura	156	210	19	55
8.	Danau Sipin	1	60	2	3
9.	Danau Teluk	11	25	15	19
10.	Pelayangan	4	19	20	17
11.	Jambi Timur	69	147	68	92
<b>Kota Jambi</b>		<b>466</b>	<b>1.106</b>	<b>306</b>	<b>344</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37.  
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2018

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Kotabaru	38	122	34	18
2.	Alam Barajo	0	16	12	0
3.	Jambi Selatan	30	51	3	5
4.	Paal Merah	22	25	17	13
5.	Jelutung	49	8	4	4
6.	Pasar Jambi	36	16	2	7
7.	Telanaipura	64	116	4	17
8.	Danau Sipin	15	0	0	0
9.	Danau Teluk	0	17	0	0

No	Kecamatan	Ruang Kelas SD/MI			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
10.	Pelayangan	0	6	6	0
11.	Jambi Timur	39	98	13	5
<b>Kota Jambi</b>		<b>293</b>	<b>469</b>	<b>95</b>	<b>138</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

## 5. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.38.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	Jumlah Guru	3.267	3.561	3.477	3.354	3.607	3.206
1.2.	Jumlah Murid	65.732	69.870	69.958	69.973	66.212	62.336
1.3.	Rasio	0,049	0,050	0,049	0,047	0,054	0,051
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	Jumlah Guru	2.228	2.269	2.295	2.273	1.777	1.557
2.2.	Jumlah Murid	24.835	34.710	34.838	34.928	29.698	26.350
2.3.	Rasio	0,089	0,065	0,065	0,065	0,059	0,059

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2018 di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.39.

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2013-2018

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	412	8.254	0,049	139	2.179	0,063
2	Kec. Danau Sipin	294	4.620	0,063	167	3.397	0,049
3	Kec. Danau Teluk	104	1.456	0,071	28	584	0,047
4	Kec. Jambi Selatan	401	7.856	0,051	126	3.045	0,041
5	Kec. Jambi Timur	578	9.779	0,059	268	4.425	0,060
6	Kec. Jelutung	456	7.452	0,061	120	1.917	0,062
7	Kec. Kota Baru	392	7.650	0,051	310	4.802	0,064
8	Kec. Paal Merah	328	7.781	0,042	205	4.125	0,049
9	Kec. Pasar Jambi	79	1.258	0,062	133	1.258	0,105

10	Kec. Pelayangan	90	1.167	0,077	18	124	0,145
11	Kec. Telanai Pura	473	8.939	0,052	263	3842	0,068
<b>Jumlah</b>		<b>3.607</b>	<b>66.212</b>	<b>0,642</b>	<b>1.777</b>	<b>29.698</b>	<b>0,059</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

## 6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.  
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>SD/MI/Paket A</b>							
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308
2	Jumlah Siswa SD	10,695	9,842	11,164	11,164	11.074	11.308
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>SMP/MTS/Paket B</b>							
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7,383	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	10,551	13,448	13,448	13.343	13.308
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>SMA/SMK/Paket C</b>							
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	9,918	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	9,922	10,533	10,533	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%	Pengelolaan Provinsi	Pengelolaan Provinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2018

### 6.1.2.1.1.1. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.  
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Posyandu	453	459	460	460	460	464
2	Jumlah Balita	59.462	56.670	58.012	52.933	72.942	47.805
3	Rasio RPPB (%)	7,62	8,10	7,93	8,69	6,31	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.42.  
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	14	14	17	17
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620
3	Rasio RSPP (%)	0,0031	0,0030	0,0024	0,0024	0,0029	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.43.  
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	59	59	58
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

Tabel 2.44.  
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter	252	258	255	255	259	326
2	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134	609.620
3	Rasio DPP (%)	0,045	0,045	0,044	0,043	0,043	

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2018, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit, puskesmas Non perawatan 16 unit, puskesmas pembantu 38 unit, dan poskesdes 7 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 326 orang, dokter spesialis 151 orang, dokter gigi 71 orang, bidan 792 orang, dan perawat sebanyak 2.187 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu 19 dari 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

#### **6.1.2.1.1.2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan,

Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah dalam kerangka rencana pembangunan yang mengedepankan aspek *thematic, holistic, integrative dan spatial*.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45

**Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2018**

No	Variabel	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan Status Kota (Km)	506.67	506.67	506.67	510.452	510.452	510.452
2	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	331.56	344.54	431.38	456.00	466.14	484,93
3	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)	65.44	68.10	85.14	90.00	92.00	95.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang jalan yang baik di Kota Jambi setiap Tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 Tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar  $\pm 6,29\%$  dan ditambah lagi dengan peningkatan panjang jalan status kota dari 506,67 Km menjadi 510,452 Km pada Tahun 2016. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relative baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi.

Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi dilakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sedangkan pada aspek pengelolaan sumber daya air, dimulai dari Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari daerah hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu ± 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (sawmill/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km dengan capaian realisasi panjang drainase dalam kondisi baik dalam tabel berikut.

**Tabel 2.46.**  
**Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2013-2018**

No	Variabel	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase Status Kota (Km)	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2	127,2
2	Panjang Drainase Kondisi Baik (Km)	59,36	70,27	105,94	107,10	114,48	127,2
3	Ratio Jaringan Drainase Kondisi Baik (%)	46,67	57,60	83,29	84,20	90,00	100

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio panjang Drainase yang baik di Kota Jambi setiap Tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode 5 Tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar  $\pm 11,34\%$  per Tahunnya.

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap Tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47.**

**Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013-2018**

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Kota Jambi	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533	17.533
Luas RTH (Ha)	1.175,40	1.193,72	1.212,05	1.272,14	1.290,47	1.609,53	1.844,47
Ratio RTH (%)	6.70	6.81	6.91	7.26	7.36	9.18	10.52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2016 baru mencapai 7,36% atau seluas 1.290,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “*land banking*” setiap Tahunnya. Setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di Tahun 2018 telah mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 Ha. Penambahan luasan RTH ini secara signifikan didapatkan dari data ruang hijau aset Provinsi Jambi, vegetasi taman pada median dan bahu jalan (*pedestrian*), serta data luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih terus mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari data yang saat ini masih 77 % yang artinya masih ada 23% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.

**Tabel 2.48.**

**Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2018**

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pelanggan (SL)	61.660	62.883	64.847	69.379	72.965	77.020
Cakupan Pelayanan (%)	65	67	68	72	75	77

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk

pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49.  
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Perumahan Formal	44	13	57	30	46	190
2	Jumlah PSU yang sudah diserahkan ke Pemkot	-	-	2	6	1	9
3	Jumlah PSU yang sudah diverifikasi	-	-	53	19	13	85

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.50.  
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	300	232	532

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Tabel 2.51.  
Da Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak	Jumlah RTLH

Alam Barajo	7.064	6.122	942
Danau Sipin	7.722	6.367	1.355
Danau Teluk	2.357	1.855	502
Jambi Selatan	8.189	7.667	522
Jambi Timur	11.895	10.856	1.039
Jelutung	13.224	9.441	3.783
Kotabaru	30.216	27.848	2.368
Paal Merah	34.098	33.001	1.097
Pasar Jambi	3.074	1.574	1.500
Pelayangan	2.641	1.789	852
Telanaipura	11.390	10.121	1.269
<b>Total</b>	<b>131.870</b>	<b>116.641</b>	<b>15.229</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2017 jumlah RTLH sebanyak 15.229 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun sehingga yang tersisa saat ini sebanyak 14.697 unit. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh menjadi 206,24 hektar. Dan pada tahun 2018 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 152,99 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52.  
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Berdasarkan SK Walikota

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam		10,06	
2.	Kawasan Kumuh Beringin		23,02	
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam		45,41	

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung		3,71	
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh		18,01	
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru		13,93	
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar		3,41	
8.	Kawasan Kumuh Jelutung		27,03	
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil		9,89	
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya		4,12	
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya		3,41	
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas		2,60	
13.	Kawasan Kumuh Legok		147,34	
14.	Kawasan Kumuh Murni		14,04	
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin		1,61	
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang		64,19	
17.	Kawasan Kumuh Kasang		36,28	
18.	Kawasan Kumuh Rajawali		29,41	
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya		9,97	
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari		51,72	
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang		53,98	
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman		55,13	
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincih		8,79	
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah		41,13	
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali		14,16	
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali		18,09	
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sujur		36,16	
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura		2,55	
29.	Kawasan Kumuh Rawasari		7,29	
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar		13,64	
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete		6,97	
32.	Kawasan Kumuh Jelmu		12,14	
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut		31,10	

No	Nama Kawasan	Kriteria Kekumuhan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Sisa Luas (Ha)
34.	Kawasan Kumuh Tengah		14,26	
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor		2,80	
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang		70,54	
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu		23,91	
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang		54,78	
<b>TOTAL</b>			<b>986,57</b>	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini jumlah titik lampu jalan yang telah terpasang sampai dengandi Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.  
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang Terpasang di Kota Jambi

Kecamatan	Jumlah Lampu Terpasang
Telanaipura	1.179
Jambi Selatan	1.335
Jambi Timur	1.404
Pasar Jambi	908

Pelayangan	451
Danau Teluk	461
Kotabaru	2.377
Jelutung	1.358
Alam Barajo	2.121
Danau Sipin	1.034
Paal Merah	1.484
<b>TOTAL</b>	<b>14.112</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2018

Dari total sebanyak 14.112 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 150 watt sebanyak 652 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 507 titik.

Untuk jumlah pemukiman umum yang ada di Kota Jambi yang juga merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2017 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 926.368 M<sup>2</sup>.

#### **2.1.3.1.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2017, jumlah personil Satpol PP 263 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1:1500, dengan jumlah penduduk ±609.620 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2017 adalah 582 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 9,39.

Tabel 2.54.

### Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017	
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{263 \text{ orang}}{609.620 \text{ jiwa}}$
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	$\frac{582}{62}$	9,39

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55.  
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum  
Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggaran Perda	tad	tad	20	24	tad
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	tad	tad	20	24	tad
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	tad	tad	100	100	tad
Jumlah Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	102	377	552	703	tad
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	tad

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2018

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

#### 2.1.3.1.1.6. Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan social dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) padatahun 2018 sebanyak 16.112 orang lansia potensial dan 8.462 lansia miskin , untuk tahun 2018 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 166 orang mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana social khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah pantijompo.

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan social dan perlindungan sosial. Jaminan social bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan social ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan social dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan social seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2018 ditetapkan sebanyak 26.751 orang PMKS memperoleh bantuan social untuk pemenuhan dasar, untuk

mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 23.296 orang PMKS (87,08%).

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas social juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan social seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 5.870 dari tahun 2013 sebesar 6.229 orang menjadi 12.099 orang pada tahun 2018, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 66,06% dari tahun 2013 hingga 2018. Penurunan terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 3,94%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

Tabel 2.56.  
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Populasi PMKS	6.229	6.229	7.563	9.039	10.569	12.099
2.	Jumlah Penanganan	3.891	3.891	4.671	5.317	7.398	7.993
3.	Persentase	60,07	60,07	61,92	70,00	70,00	66,06

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

Selain data PMKS, terdapat juga beberapa terdapat beberapa jenis kasus/pelanggaran yang telah diidentifikasi oleh kepolisian resort beserta pengadilan di wilayah Kota Jambi. Beberapa data yang terhadap pelanggaran sosial tersebut dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57.  
Data Jumlah Pelanggaran / Kasus Di Kota Jambi

No	Uraian	Jumlah Kasus
1	Pelanggaran lalu lintas	13.826
2	Kecelakaan lalu lintas	403
3	Tahanan kepolisian	1.527
4	Perkara pidana anak	29
5	Perkara pidana biasa	1.005
6	Perkara tipikor	45

No	Uraian	Jumlah Kasus
7	Perkara pidana cepat	30
8	Perkara lalu lintas di pengadilan	34.959
9	Perkara pidana cepat di pengadilan	35.994

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.1.2. Urusan Layanan Wajib Non Dasar

#### 2.1.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Usuran ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2013-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58.  
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	230.478	235.722	254.351	-	268.264
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	-	284.018
3	Rasio PYB (%)	92,69	89,87	92,68	-	94,45

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

\*\*\* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.59.  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dt	284.018
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	412.249	420.428	428.542	dt	443.343
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,32	62,39	64,04	dt	64,06

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

\*\*\* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2017 di Kota Jambi sebesar 64% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60.  
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	639	2.164	1.665	2.237	2.703
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	8.450	6.491	4.692	5.903	5.431
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,56	33,34	35,49	37,90	49,77

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.61.  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016***	2017
1	Pengangguran Terbuka	18.185	26.569	20.098	dt	15.754
2	Angkatan Kerja (AK)	248.663	262.291	274.449	dt	284.018
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,31	10,13	7,32	dt	5,55

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2018

\*\*\* BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2017 sekitar 5,5 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

#### 2.1.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2013 – 2018 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan setiap tahunnya bertambah jumlah pegawai negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relative kecil terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62.  
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	-	101.423	113.460
2	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah (orang)	4.930	5.156	5.227	4.554	4.440	4.315
3	Persentase	5.34%	5.50%	6.41%	-	4.40%	3.80 %

Sumber: - BKPSDMD Kota Jambi, 2018 - BPS Provinsi Jambi 2018

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu enam tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.63.  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018

1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	80.234	82.761	92.842	-	101.423	113.460
2	Jumlah pekerja perempuan swasta (orang)	40.670	37.959	39.105	-	52.466	53.065
3	Persentase	50.69%	45.87%	45.87%	-	51.73%	46.77 %

Sumber: DPMPA Kota Jambi, 2018 dan BPS Provinsi Jambi 2018

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013 -2018, persentasi rata-rata perempuan yang berkerja mengalami peningkatan.

Tabel 2.64.  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	204.387	209.688	213.694	-	221.219	225.580
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	89.545	95.991	99.978	-	107.570	122.066
3	Persentase	43.81%	45.78	46.79%	-	48.63%	54.11%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018 dan BPS Provinsi Jambi 2018

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak)mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada tahun 2015 mencapai 60 kasus, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 16 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2013-2018 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (tahun

2013), 60 kasus (tahun 2015), 67 kasus (tahun 2017) dan pada tahun 2018 sebanyak 85 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

Tabel 2.65.  
Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan  
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus	67 kasus	85 kasus
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus	67 kasus	85 kasus
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.1.2.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain: beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging

ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambisudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2017 adalah: dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.459 kkal/kap/hari (103,9% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 63,57 gr/kap/hari (109% AKP) dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 63 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 59,12 gr/kap/hari (124% AKL) dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 47,34 gr/kap/hari, dan skor PPH 89,70.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supplay diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi

indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.66.  
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2017

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	271,5	1.140,8	53,6	53,1	0,5	26,8	26,5	25,0	25,0
Umbi-umbian	42,2	40,2	1,9	1,9	0,5	0,9	0,9	2,5	0,9
Pangan Hewani	135,0	266,4	12,5	12,4	2,0	25,0	24,8	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	38,2	344,4	16,2	16,0	0,5	8,1	8,0	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	6,1	33,0	1,6	1,5	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8
Kacang-kacangan	32,3	79,9	3,8	3,7	2,0	7,5	7,4	10,0	7,4
Gula	27,9	101,5	4,8	4,7	0,5	2,4	2,4	2,5	2,4
Sayur dan Buah	271,0	99,4	4,7	4,6	5,0	23,3	23,1	30,0	23,1
Lain-lain	48,8	23,4	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2018

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2017, PPH Kota Jambi sudah mendekati nilai optimal, yaitu telah mencapai 89,70 akan tetapi masih berada di bawah nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini diakibatkan salah satunya dengan kurangnya keberagaman konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi terutama kurangnya konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,8 dari skor ideal 1; Umbi-umbian dengan skor 0,9 dari skor ideal 2,5; Kacang-kacangan dengan skor 7,4 dari skor ideal 10; sayuran dan buah dengan skor PPHnya hanya 23,1 dari skor idealnya.

#### 2.1.3.1.2.4. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih dilakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.67.  
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	595	606	608	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	291	293	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	49	48	49	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan DPKAD Kota Jambi, 2018

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68.  
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Hak Milik	7.755	6.304	6.008	5.743	8.927
2.	Hak Guna Bangunan	1.296	540	906	890	1.817
3.	Hak Pakai	16	17	24	35	26
4.	Hak Pengelolaan	0	0	0	0	0
5.	Hipotek	5.532	5.526	5.198	4.929	4.037

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.2.6. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-das dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sample air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2017 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi: DO, Sulfida sbg (H2S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 18,87%. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2016 mencapai 80%.

Tabel 2.69.  
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	22	22	22	22	24
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	4	4	4	5	5
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jml Dok	-	0	1	6	0
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jml Dok	-	8	37	44	17
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan asumsi volume timbulan sampah sebesar 2,5 lt/orang/hari. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sama dengan volume sampah terangkut, rata-rata pada tahun 2017 sebesar 163 Ton/hari.

Tabel 2.70.  
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	332.150	370.475	378.670	406.397	410.260
2.	Volume Produksi Sampah	545.857	571.444	578.475	555.627	560.037
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	60,85	64,83	65,46	73,14	73,25
4.	Jumlah TPS	335	366	402	443	455
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> /hari)	n/a	836	906	994	1.018
6.	Jumlah Penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	679,50	635,83	587,01	580,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 45-64 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E.Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 82.

Tabel 2.71.  
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Kualitas Air	46.39	46.32	46.05	45.79	39.41
2.	Indeks Kualitas Udara	99.08	96.48	95.33	93.05	91.27
3.	Indeks Tutupan Lahan	n/a	25.14	26.84	27.77	27.77

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2018

Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar 27,77, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2014 dan 2017 adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITL \times 40\%)$$

$$IKLH \text{ 2014} = (46.32 \times 30\%) + (96.48 \times 30\%) + (25.14 \times 40\%) = 52,89$$

$$IKLH \text{ 2017} = (39.41 \times 30\%) + (91,27 \times 30\%) + (27,77 \times 40\%) = 50,21$$

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2014 ke tahun 2017 yaitu 52,89 menjadi 50,21 (kategori cukup).

### 2.1.3.1.2.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2017, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 348.022 orang. Jika dipersandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el baru mencapai 59,88%. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 74,55%

Tahun 2016 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 8.287 bayi dengan jumlah bayi lahir 8.935. Kondisi ini naik turun setiap tahunnya karena kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013, dimana bayi lahir 1 tahun yang berakte 9.191 bayi sedangkan bayi lahirnya 10.004. Dengan demikian, semua bayi yang lahir belum memperoleh akta kelahiran.

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2013-2017 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.72.  
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	9.191	9.116	8.327	8.287	tad
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	10.004	9.887	9.017	8.935	tad
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	401.560	411.483	418.231	438.234	581.230
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	299.371	301.113	301.122	308.077	348.022
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	74,55%	73,18%	72,00%	70,30%	59,88%
5.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	259.092	263.684	266.605	273.263	336.393
6.	Jumlah pasangan nikah	Pasangan	72.857	73.639	74.241	78.811	94.961

berakte nikah							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.1.2.8. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.73.  
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	70	70	70	70	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	70	70	70	70	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)						
	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)						
	a. Bidang Infrastruktur	0	22	202	324	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2019

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2017 telah tercapai 100%.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok.

Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

### 2.1.3.1.2.9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.74.  
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,06	2,04	2,05	2,05	2,06
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	78,96	78,11	74,34	71,27	72,25	73,50
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	25.275	23.627	91.431	91.431	68.280	67.513
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	77,1	76,06	72,32	67,99	68,78	69,99

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2019

#### 2.1.3.1.2.10. Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh

pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.  
Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	6	6	5	5	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	6	6	5	5	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	176	286	356	491	607
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	176	110	70	135	116
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	-	-	-	-	822
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%))	-	-	-	-	61%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	-	1	-	2
	b. Jumlah marka jalan (unit)	891	856	859	-	3341
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	329	441	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)	35	35	35	38	38
7.	Jumlah ATCS (unit)	-	-	-	-	-
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	-	-	-	13826	12769
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	195	237	262	403	414
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	37	43	32	25	30
	b. Luka Berat	103	47	22	19	3
	c. Luka Ringan			379	656	655
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	143	155	160	263	433

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya fluktuatif cenderung menurun. Pada

tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas tercatat 13.826 kasus. Jumlah kasus ini berkurang sampai dengan 12.769 kasus di tahun 2017. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi masih rendah.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 45 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.76.  
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%					
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%					
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang					
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio					
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%					
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	175	146	113	94	115
	b. Mobil Bus	Unit	1150	1861	894	863	805
	c. Mobil Barang	Unit	29389	20538	27259	27508	25342
	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	27	51	51	52	62

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	b. Mobil Bus	Unit	401	446	457	466	478
	c. Mobil Barang	Unit	102289	12542	14488	15829	16876
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	45	45	45	45
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	30000	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	37000	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	37000	50000	50000	50000	50000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	40000	60000	60000	60000	60000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	45000	75000	75000	75000	75000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	50000	100000	100000	100000	100000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	55000	120000	120000	120000	120000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	7000	10000	10000	10000	10000
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	12500	15000	15000	15000	15000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah					
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	13000	20000	20000	20000	20000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.2.11. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan

Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Commented [A1]: DIMASUKAN DATA SPBE YANG DIPEROLEH SAAT INI DAN YG AKAN DATANG

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi system pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini di dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti :

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan

2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- ) Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- ) Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- ) Dan 35 Indikator, Merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2018 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,22 (Cukup) dengan tingkat kematangan pada level 2 (interaksi). Sedangkan Probinsi Jambi mendapat nilai indeks SPBE 1,8 (Cukup).

Sedangkan untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

**Tabel 2.77.**  
**Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018**

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Website milik Pemerintah Daerah	3	5	8	14	25	28
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	5,55	9,25	14,81	25,92	46,29	51,85
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-	
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	-	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2019

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

**Tabel 2.78.**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2013-2018**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15	
2.	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32	
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu Tahun 2014 sampai Tahun 2015. Pada periode Tahun ini semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran

radio nasional yang jumlah konstan pada 1 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.

**Tabel 2.79.**  
**Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2013 s/d 2018 Kota Jambi**

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	8	8	8	13	13	13
2.	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Penyiaran TV Lokal	2	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Penyiaran TV Nasional	6	6	10	14	14	14
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2019

#### Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2018 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif dari tahun 2017 dengan jumlah 218 unit, hal ini berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasannya paradigma pembinaa koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik, sesuai dengan visi Kota Jambi “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”,

**Tabel 2.80.**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi aktif	346	362	377	381	218
2	Jumlah koperasi	774	787	801	804	674
3	Persentase koperasi aktif	44,70	46,00	47,07	47,39	32,34

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2018

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hingga tahun 2018 jumlah UMKM sebesar 10.763 unit dengan kondisi pada tahun 2013 sebesar 10.556 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan pada tahun 2017 jumlah UMKM yang memiliki sertifikat sebanyak 335 unit. Sampai tahun 2018 secara keseluruhan UMKM yang telah memiliki sertifikat sebanyak 539 unit, terjadi peningkatan sebesar 62,15% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM

dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan sampai tahun 2018 baru 0,0078% pelaku UMKM atau sebanyak 95 pelaku yang mendapatkan kesempatan mengikuti pameran.

Tabel 2.81.  
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Unit	10.556	10.545	10.704	10.763	10.763
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0047	0,0071	0,0070	0,0074	0,0078
		Unit	50	75	75	80	95
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	-	-
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	-	15	58	335	539
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	-	-	-	-	77,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang perdagangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan.

Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi setiap tahunnya menunjukkan variasi dan juga semakin menjanjikan. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2017 sebesar Rp 640,53 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi tahun 2016 sebesar Rp 541,94 milyar. Namun pada tahun 2018 realisasi investasi sedikit menurun menjadi Rp. 317,73 milyar.

Tabel 2.82.

Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)  
Kota Jambi 2014-2018

NO	URAIAN	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (unit)	5	12	22	14	17
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyar)	48	413,13	541,94	640,53	317,73
3.	Jenis Izin yang Dilayani	43	43	51	73	73
4.	Izin yang Diterbitkan	13.062	16.651	11.265	10.172	9.835

Sumber: DPMPSTSP Kota Jambi, 2019

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih belum selesainya Rancangan Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proses maupun waktu dalam menerbitkan rekomendasi perizinan. Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.83.

Daya Serap Tenaga Kerjadi Kota Jambi 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN	87	160	957	2.859	2.909
2.	Jumlah seluruh PMDN	5	12	22	14	17
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	87	91	96	143	116

Sumber: DPMPSTSP Kota Jambi, 2019

Berdasarkan tabel di atas, daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, pada tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 87% , terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 91% dan 96% dan kemudian tahun 2017 meningkat signifikan menjadi sebesar 143%. Pada tahun 2018 sebesar 116%.

#### 2.1.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84.  
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah klub olahraga (buah)	28	28	28	28	28	30
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	28	28	28	28	28	30
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	15	15	15	14	20	50
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	1	6	6	6	6	6

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.2.14. Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota.

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang

andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Jambi telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi sebagai Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi penyelenggaraan urusan statistik. Hasil dari pelaksanaan urusan statistik antara lain adalah Buku “Kota Jambi dalam Angka” sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Kota Jambi. Sejak tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

#### **2.1.3.1.2.15. Persandian**

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS),

sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.85.  
Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	1	1	1	2	2
2.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	50	100	66,67	50	75

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.1.2.16. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dan sejarah serta dan pengembangan seni dan kebudayaan. Pelestarian dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni, pementasan seni budaya, lomba seni dan festival budaya serta pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Jambi.

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86.  
Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	3	5	5	5
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	-	-	-	-	-
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2019

#### 2.1.3.1.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup:
  - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup:
  - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada tahun 2014 hanya sebanyak 1.215 judul mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 sebanyak 23.142 judul, secara perbandingan jumlah buku dengan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana untuk tahun 2018 sebesar 7,81%.

Secara detail pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87.  
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah perpustakaan	Buah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	12.692	14.896	28.435	37.337	30.274
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	1.215	18.298	19.569	20.128	23.142
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	1.863	41.326	44.639	46.180	50.021
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	568.062	576.067	583.487	591.134	614.329
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi	Persen	0,33	7,17	7,65	7,81	8,14

Sumber: Dinas Kearsip dan Perpustakaan Kota Jambi, 2019

#### 2.1.3.1.2.18. Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.  
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah OPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Buah	-	-	1	12	6

2.	Jumlah OPD	Buah	50	50	50	50	50
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	Persen	0	0	2	24	15

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2019

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.2.1. Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional.

Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya, namun Kota Jambi terus berbenah dalam meningkatkan daya guna potensi destinasi pariwisata, seperti pembangunan tugu keris, pedestrian, Hutan Kota, taman-taman Kota hingga Danau Sipin. Jumlah restoran dan hotel berbintang maupun non bintang terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini menandakan geliat ekonomi Kota Jambi terus tumbuh.

Tabel 2.89.  
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,15	2,31	2,27	2,29	2,40	2,36
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dok	-	-	-	1	-	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Restoran	Unit	Tad	tad	479	527	617	672
5.	Jumlah Hotel							

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	a. Berbintang	unit	tad	tad	23	26	28	30
	b. Non Bintang	unit	tad	tad	68	67	68	69

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2019

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 tahun terakhir yang peningkatannya belum signifikan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2013-tahun 2017 berada pada kisaran 2%, yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,15%, dan pada tahun 2017 sebesar 2,40%.

#### 2.1.3.2.2. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.90.  
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Padi	ton	9.577,38	7.186,30	2.012	4.383	5.509,5
2.	Produksi Palawija	ton	1.133,09	2.280,32	1.292,92	3.012,26	6.750,36
3.	Produksi Sayur-sayuran	ton	7.401,31	7.498,12	54.570	8.497,8	6.660,31
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	kwintal	26.912,2	27.290,5	34.329,85	28.010,5	10.327,8
5.	Produksi Daging	Kg	9.548.257	6.427.090	5.451.876	6.024.856	tad
6.	Produksi Telur	Kg	4.647.466	4.075.622	2.665.976	2.818.750	tad

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Luas padi sawah yang dipanen dalam Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebesar 1.359 Ha dengan produksi sebesar 5.509,5 ton. Jika dibandingkan tahun 2016 yang luas panennya sebesar 1.349 Ha produksi sebesar 4.383 ton berarti

terjadi peningkatan luas panen dan produksi masing-masing sebesar 0.7% dan 25.7%.

Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung sebesar 351,5 ton, ubi kayu sebesar 6.294,5 ton, ubi jalar 95,28 ton, dan kacang tanah sebesar 54,08 ton. Data produksi tanaman buahbuahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 74,8 ton, alpukat 485,5 ton, pepaya 3.658,04 ton, dan pisang 2.037,49 ton, mangga dan rambutan masing-masing sebesar 486,05 ton dan 1.131,57 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

#### Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanya bersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;

- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pelindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2018 tercatat ada 21 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 7 unit yang kategori sebagai pasar tradisional/rakyat. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 1 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 3 lokasi, dibandingkan tahun 2017 hanya 2 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin /periodik; dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.91.  
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pasar yang diawasi						
	a. Pasar Tradisional	Unit	6	6	6	7	7
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	frekuensi	-	-	-	-	365 hari
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	26,46	28,17	29,64	30,24	30,75
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	5.021,86	5.999,14	7.223,21	7.952,23	8.896,45
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	19	19	19	21	21
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	1	1	1	1	1
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	-	-	2	2	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2018

#### 2.1.3.2.3. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*, yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir.

Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi

sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.92.  
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah IKM	Unit	-	2.403	2.884	2.990	3.120
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	-	-	402	792	390
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	-	-	3	3	3
4.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	-	20	30	45	34
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas HaKI	Unit	-	10	20	35	10
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	11,88	11,59	10,88	10,77	10,36
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	2.254,42	2.467,77	2.655,30	2.830,67	2.998,23

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2015 hingga 2018, yaitu dari 2.403 unit menjadi 3.120 unit. Untuk IKM yang mendapat binaan/bantuan, mengikuti promosi/pameran serta mendapatkan fasilitas Haki memang terjadi penurunan.

Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi terus menunjukkan peningkatan dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama periode tahun 2013-2018. Peningkatan sektor industri ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah sentra industri yang berkembang setiap tahunnya.

#### 2.1.3.2.4. Kelautan dan perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berada pada kisaran 0,06%-0,07%.

Potensi areal perikanan di Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar 6.917,54 Ha, terdiri dari perairan umum 968 Ha, kolam 163,54 Ha, dan Keramba 5.786 Ha. Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan. Produksi ikan pada tahun 2013 sebesar 3.519,49 ton menurun menjadi 3.140,72 ton pada tahun 2017.

Tabel 2.93.  
Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013 (ton)	2014 (ton)	2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)
1	Perairan Umum	697,33	598,47	678,27	908,34	751,20
2	Sawah	0	0	0	0	0
3	Tambak (Kolam)	1.545,66	1.662,96	1.246,75	1.130,75	979,97
4	Keramba	1.282,99	1.312,88	1.082,95	1.435,98	1.409,55
	<b>Total</b>	<b>3.519,49</b>	<b>3.574,31</b>	<b>3.007,97</b>	<b>3.475,06</b>	<b>3.140,72</b>

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### 2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per tahun yang telah disusun terus meningkat selama periode tahun 2013-2017, yaitu dari 13 dokumen menjadi 14 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh PD lainnya.

Hal ini menjadi salah satu indikasi masih belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini adalah banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multi sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kapasitas SDM perencanaan yang salah satu indikasinya dari masih terbatasnya jumlah Perencana di Kota Jambi yang sampai dengan tahun 2017 berjumlah 1 (satu) orang atau 1,61% dari jumlah pegawai Bappeda Kota Jambi.

Tabel 2.94.  
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah dokumen perencanaan	Dok/th	7	6	6	6	6
2.	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tersusun	Dok/th	-	2	2	1	1
3.	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan, social dan budaya yang tersusun	Dok/th	-	-	7	2	4
4.	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersusun	Dok/th	6	4	5	4	3

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2018

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.95.  
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah program RKPD	54	54	54	54	54

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah program RPJMD	54	54	54	54	54
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.3.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 12,70% pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 26,50% pada tahun 2017. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah: PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan surat edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistem informasi manajemen daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.96.  
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2013-2018

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	41,81	42,71	52,12	49,31	56,85	58,37
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	12,70	18,50	19,00	18,30	26,50	20,85
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	12,87	10,90	11,90	8,50	9,00	11,55
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	85,64	87,19	85,45	86,04	89,54	89,95
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	112	125	86	91	102	100,89
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tad	WDP	Disclermer	WTP	WTP	WTP
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	23,72	23,17	26,99	27,79	28,02	28,24
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	55,09	54,83	48,55	47,28	40,71	38,94
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2019

#### 2.1.3.3.3. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan "merit system" semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (public servant). Indikator kinerja dalam rangka mendorong padapeningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara profesional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi

jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam diklatpim dalam penyesuaian jabatan, menerapkan diklat pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2013-2017 yang tersebar di 50 perangkat daerah.

Tabel 2.97.  
Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ASN	Orang	8.134	7.902	8.030	6.886	6.581
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	1	16	13	8	10
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	175	380	416	323	319
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	3.608	4.493	4.602	3.855	3.722
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	2.978	1.622	1.635	1.445	1.307
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	164	126	122	108	97
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	0	0	1	0	2
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	15	0	11	19	19
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	80	0	0	0	7
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	Orang	399	340	80	370	240
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	37	0	243	0	1
12.	Jumlah ASN pensiun setiap tahun	Orang	308	160	245	364	343
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang ditangani	Kasus	55	52	88	40	36
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	65	80	88	90	95

Sumber: BKPSDMDKota Jambi, 2018

#### **2.1.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan**

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi

#### **2.1.3.3.5. Pengawasan**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada tahun 2017 mencapai 68 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai tahun 2017, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 100%.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Jambi telah meraih skor 71,28. Dengan pencapaian skor tersebut artinya, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.98.  
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	75,0	71,9	66,7	66,2	64,52
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	56	96	96	89	68
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	10%	10%	20%	30%	40%
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	N/A	N/A	N/A	Level II
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	N/A	58,27	55,09	55,74	71,28

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2018

### 2.1.3.2.1. Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun

dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi sebanyak 45 orang yang berasal dari 8 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 8 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 6 anggota dari fraksi Gerindra, 5 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Hanura, 4 anggota dari fraksi PKB, 5 anggota dari fraksi Golkar dan 4 anggota dewan dari fraksi PPP.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.99.  
Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	PERDA yang ditetapkan	Perda	7	17	15	12	12
2.	RAPERDA yang disetujui dalam Prolegda	Ranperda	13	22	24	17	18
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Kep	40	29	36	30	30
4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2019

#### 2.1.3.2.2. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat

daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Humas

Tabel 2.100.  
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai LPPD	1,66 (sedang)	1,66 (sedang)	2,84 (tinggi)	3,06 (sangat tinggi)	Hasil blm keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	11	12	16	16	5
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	25	51	42	80	5
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	-	3	1	1	5
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKJiP	n/a	n/a	n/a	CC	B
7.	Jumlah kerjasama daerah	12	11	7	13	23
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2018

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah didefinisikan oleh *Centre for Regional and Urban Studies (CURDS)*, Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

##### **2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

##### **a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi,

minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.101.  
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga  
di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2013	2014	2015	2016**	2017*
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34
ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64
Rata-rata konsumsi RT					
ADHB (Juta Rp)	80,63	89,73	96,04	102,51	111,84
ADHK 2010 (Juta Rp)	68,68	71,26	73,71	76,06	78,95
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	18,81	21,28	22,78	24,32	26,53
ADHK 2010 (JutaRp)	16,02	16,90	17,48	18,04	18,73

Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	4,76	3,76	3,44	3,19	3,81
Perkapita	4,36	5,45	3,48	3,19	3,81

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Selama periode 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 64,58 persen (2013); 63,69 persen (2014); 61,63 persen (2015); 58,14 persen (2016) dan 59,64 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 64,58 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 58,14 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per-rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 80,63 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 89,73 juta Rupiah (2014); 96,04 juta Rupiah (2015); 102,51 juta Rupiah (2016); dan 111,84 juta Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 3 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,76 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 18,81 s.d 26,53 persen. Peningkatan tersebut tentu

berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102.  
Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2013	2014	2015	2016**	2017*
Makanan, Minuman, dan Rokok	42,98	43,42	42,93	44,29	44,55
Pakaian dan Alas Kaki	5,52	5,59	5,50	5,20	5,08
Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,40	11,13	11,64	12,01	12,65
Kesehatan & Pendidikan	10,26	10,35	10,71	10,43	10,22
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	27,70	27,14	26,82	25,63	25,07
Hotel & Restoran	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22
Lainnya	1,95	2,17	2,20	2,23	2,21
<b>Total Konsumsi</b>	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Jambi, bahwa konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 42,98 persen (2013); 43,42 persen (2014); 42,93 persen (2015); 44,29 persen (2016) dan 44,55 (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

#### **2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

##### **a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Sampai dengan tahun 2017 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

##### **b. Aksebilitas Daerah**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.

### Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Panjang Jalan (KM)	506,27	506,27	506,27	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4					
	b. Roda 2					
3.	Rasio					

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2018

#### c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.

Tabel 2.104.  
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ledeng (Perpipaan)	61.660	62.883	64.847	69.379	72.965
2.	Sumur Lindung	20.223	21.435	21.862	22.148	20.435
3.	Sumur Tidak Terlindung	5.389	5.389	4.980	3.201	3.241
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	91.261	9.572	109.502	110.270	122.389
5..	Jumlah Rumah Tangga	119.935	123.216	124.216	125.007	130.678
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2018

#### d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak ..... rumah tangga. Adapun pada tahun 2017, rumah tangga pengguna listrik meningkat menjadi ..... rumah tangga. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada berikut

Tabel 2.105.  
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Tangga	139.083	142.016	144.017	145.872	147.784
2.	Jumlah Pelanggan PLN	290.887	290.887	371.983	247.105	428.587
3.	Rasio Elektrifikasi	209%	205%	258%	169%	290%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

#### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

##### a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106.  
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2018

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	4 hari	11 dokumen	Gratis

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	4 hari	11 dokumen	Gratis
3.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4 hari	10 dokumen	Gratis
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4 hari	9 dokumen	Gratis
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	4 hari	11 dokumen	Gratis
6.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPP)	4 hari	11 dokumen	Gratis
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14 hari	9 dokumen	Sesuai Perda 10 Tahun 2015
8.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	14 hari	10 dokumen	Sesuai Perda 10 Tahun 2015
9.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 hari	9 dokumen	Gratis
10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4 hari	15 dokumen	Gratis

Sumber: DPMPSTSP Kota Jambi, 2019

#### b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 215.444.433.999,00 atau tercapai sebesar 105,87% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 203.500.000.000,00 selain pajak daerah terdapat retribusi yang pada tahun 2018 sebesar Rp. 40.389.059.087,09 atau sebesar 91,77% dari target sebesar Rp. 44.012.000.000,00. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parker.

Tabel 2.107.  
Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Jambi  
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
----	--------	------	------	------	------	------

1.	Jumlah Pajak Daerah					
	Target	112.472.000.000	190.882.000.000	187.252.000.000	198.940.000.000	203.500.000.000
	Realisasi	128.824.086.123	147.889.448.423	158.740.884.099	201.429.136.841	215.444.433.999
	Persentase	115%	77%	85%	101%	105,87%
2.	Jumlah Retribusi					
	Target	46.585.433.400	63.057.026.000	73.679.471.000	46.403.840.000	44.012.000.000
	Realisasi	59.939.980.258	58.812.352.554	80.679.063.851	43.077.425.944	40.389.059.087,09
	Persentase	129%	93%	110%	93%	91,77%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2019

### c. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan tahun 2017 tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karenafaktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 2.108.  
Jumlah Kasus Kejahatan Di Kota Jambi Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus Narkoba	98	194	209	141

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	6	2	5	5
3.	Jumlah Kasus Seksual	23	11	29	9
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	209	352	265	213
5.	Jumlah Kasus Pencurian	528	596	614	686
6.	Jumlah Kasus Penipuan	528	626	616	549
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	-	-

Sumber: Polresta Jambi, 2018

#### d. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.109.  
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Demonstrasi Politik	-	10	-	tad	tad
2.	Demonstrasi Ekonomi	280	158	65	tad	tad
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	-	-	tad	tad

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Jumlah</b>	<b>280</b>	<b>168</b>	<b>65</b>		

Sumber: Kesbangpol Kota Jambi, 2018

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 248.761 meningkat menjadi 284.018 pada tahun 2017. Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Jumlah angkatan kerja tahun 2017 didominasi lulusan SMA umum/kejuruan sebesar 45,7% dan lulusan universitas sebesar 20,7%. Hal ini

tidak terlepas dari iklim investasi yang kondusif yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi tahun 2013 sebesar Rp. 1.300.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.146.860 per pekerja per bulan. Peningkatan ini menunjukkan positifnya pertumbuhan perekonomian di Kota Jambi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.110.  
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

Tahun	Angkatan Kerja		Total Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
	Bekerja	Pengangguran				
2013	230.243	18.518	248.761	160.376	60,80	7,44
2014	235.722	26.569	262.291	158.137	62,39	10,13
2015	254.351	20.098	274.449	154.093	64,04	7,32
2016	BPS Kota Jambi tidak melakukan Sensus Sakernas 2016					
2017	268.264	15.754	284.018	159.325	64,06	5,55

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2017 mencapai 5,55% sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional sebesar 5,50%. Ketersediaan angkatan kerja yang cukup banyak dengan tingkat pendidikan yang memadai memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tantangan tersebut harus dijawab oleh pemerintah dengan membuat kebijakan - kebijakan pembangunan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap surplus tenaga kerja cukup banyak (*labour intensive*).

Tabel 2.111.  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1	52.594	53.778	54.668	55.491	tad
2.	Jumlah lulusan S2	4.382	4.490	4.556	4.610	tad
3.	Jumlah lulusan S3	392	402	406	409	tad

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	59.381	60.694	61.645	62.526	tad
5.	Jumlah penduduk	556.332	568.062	576.067	583.487	591.134
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	1.067,36	1.068,44	1.070,10	1.071,59	tad

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

#### b. Tingkat Ketergantungan.

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka *dependency ratio* / rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per tahun 2017, rasio ketergantungan Kota Jambi berada pada angka 40,9 dimana angka ini menurun dari tahun 2016 sebesar 41,69. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.112.  
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	148.730	148.722	148.672	148.302	
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	19.131	19.916	20.828	21.826	
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	167.861	168.638	169.500	170.128	
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	392.327	399.424	406.566	413.359	
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	42.79	42.22	41.69	41.16	

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja RKPD tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2019*		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang dievaluasi Tahun 2019*		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Bidang Urusan Pendidikan																	
		Program Peningkatan Akses, Mutu Dan Tata Kelola Pendidik	- Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD)	59.51 59.15 61.90	111.853.850.716	95.07%	106.342.108.304	121.598.505.200										DINAS PENDIDIKAN	
			- Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, & Angka Partisipasi Sekolah SD (APK, APM & APS SD) dan Rerata UAS SD	111.00 99.97 100.48															











					Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Terlaksananya Penyusunan SOP kebencanaan, rencana Aksi daerah tentang penanggulangan Bencana dan Pemetaan daerah rawan bencana		5.951.035.000	96.21%	5.725.335.400	14.650.000									
					<b>Sosial</b>															
					PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Penurunan Angka PMKS	8.49	2.206.655.000	90.32%	1.992.999.700	2.739.152.000								DINSOS	
					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
					<b>Tenaga Kerja</b>															
					Program Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan perlindungan tenaga kerja	5,50%	701.051.000	94.26%	660.823.561										DTKK
						Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja yg mengikuti pelatihan keterampilan berbasis														













Kebudayaan																			
					Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata	Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi dalam event seni budaya dan cagar budaya yang dipugar	N/A	2.533.900.000	95,58%	1.042.088.900	2.474.305.000								DPK
Perpustakaan																			
					Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	4.766	532.994.000	99,46%	530.128.000	725.920.500								DKP
						Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	30.336												
Kearsipan																			
					Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah yang Tertata dan Terkelola Sesuai Standar Kearsipan.	10607 dok	492.820.000	99,49%	490.322.000	696.890.177								DKP

					Tersedia Tenaga Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan yang Memenuhi Standar Kompetensi															
					Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan															
					<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>															
					<b>Pariwisata</b>															
					Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata	Jumlah aktivitas kepariwisataan	2,4	2.533.900.000	95,58%	1.042.088.900									DPK	
					<b>Pertanian</b>															
					Program Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan	terwujudnya peningkatan produksi, mutu produk dan diverifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	2495 kkal/kapita/hari	4.103.687.000	95,70%	3.927.270.421										DPKP
							63,57 gram/kapita/hari													

				perikanan		59,12 gram/kapita/hari														
				<b>Kehutanan</b>																
				<b>Energi dan Sumberdaya mineral</b>																
				<b>Perdagangan</b>																
				Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	88	4.833.488.750	93.96%	4.541.348.150											
				Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, Dan Pengawasan Industri Dan Perdagangan	Cakupan bina perdagangan	88	7.031.243.500	97.60%	5.446.412.103											DPP
				<b>Perindustrian</b>																
				Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan, Dan Pengawasan Industri Dan Perdagangan	cakupan bina industri kecil menengah	7,6	7.031.243.500	98.97%	1.435.803.000											DPP





				Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Indeks Reformasi Birokrasi		2.421.610.000	91,33%	2.211.776.350	1.876.190.000									INSPEKTORAT	
				<b>Sekretariat Dewan</b>																
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		77%	33.675.172.500	83,97%	27.940.186.280											
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD																SETWAN
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD			954.770.000	84,28%	804.670.950	1.464.981.000										
				<b>Sekretariat Daerah</b>																
				Program Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana Pemkot		10.586.525.000	60,25%	6.378.487.600	175.000.000										SETDA







### 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Jambi secara umum dapat terpilah dalam Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; serta Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

#### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan di Kota Jambi diidentifikasi melalui analisa data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Jambi, bahwa tidak semua data mencerminkan peningkatan atau penurunan capaian sasaran. Namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Jambi dengan dasar bahwa Kota Jambi sebagai Ibukota dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dengan target akhir RPJMD maka **permasalahan pembangunan daerah** Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Berdasarkan presentase jumlah penduduk miskin kota jambi dari tahun ketahun mengalami penurunan tetapi apabila dilihat dari jumlah penduduk mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah warga miskin berdasarkan data BPS Kota Jambi penduduk miskin pada tahun 2017 yaitu sebesar 52.080 atau 8,84% dari total jumlah penduduk. Data menunjukkan tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Jambi disebabkan oleh masih rendahnya pemberdayaan penduduk miskin, untuk itu diperlukan penyediaan akses kebutuhan dasar (misalnya: pendidikan, kesehatan, air bersih) dan pemberdayaan warga miskin; serta peningkatan perlindungan masalah sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.**

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya

kualitas pelayanan pendidikan (Rendahnya kualitas daya saing siswa, Rendahnya daya tampung sekolah, Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit, Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, Rendahnya kompetensi tenaga pendidik, Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13, Distribusi tenaga pendidik tidak merata), layanan kesehatan yang belum optimal, disebabkan oleh Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular, Rendahnya sapsras pelayanan kesehatan dasar, Rendahnya kualitas tenaga kesehatan, Masih kurangnya Alat kesehatan, Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat. Serta masih rendahnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal dan belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan.

2. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran, Rendahnya Kualitas Produk dan daya saing UMKM/IKM, Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan, Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan, Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan, dan masih minimnya penyelenggaraan event berskala Nasional/Internasional.
  3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.
  4. Pelayanan infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya jaringan drainase dan belum optimalnya pelayanan parkir.
- 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dari permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi dan dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan **isu strategis pembangunan Kota Jambi tahun 2020** sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan: menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah sosial dan meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan.
2. Upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan :
  - ) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi distribusi guru.
  - ) Meningkatkan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, optimalisasi tindakan preventif, promotif, dan kuratif.
  - ) Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Upaya untuk meningkatkan Daya saing daerah dalam bidang ekonomi melalui penyediaan kualitas produk lokal yang berdaya saing, penyediaan sarana prasarana perdagangan, meningkatkan sinergisitas antar stakeholders kepariwisataan, dan penyelenggaraan job fair.
4. Optimalisasi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui penyediaan sarana dan prasarana TIK.
5. Peningkatan Pelayanan infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, bedah rumah, peningkatan SR air bersih, mengurangi genangan air melalui pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi dan penyediaan pelayanan Sarana dan prasarana perhubungan darat.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Ekonomi Kota Jambi diperkirakan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi Indonesia, dan juga akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Presiden Terpilih pada Pemilu tahun 2019. Struktur perekonomian Kota Jambi pada kurun waktu 2013-2018 masih didominasi sektor Sekunder dan Tersier. Sumbangan 5 (lima) sektor sama seperti pada tahun 2018, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Melihat struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2018 dan juga visi RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, maka arah kebijakan ekonomi ke depan masih mengarah pada pengembangan perdagangan dan jasa.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2018 dan Perkiraan Tahun 2019

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

#### b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

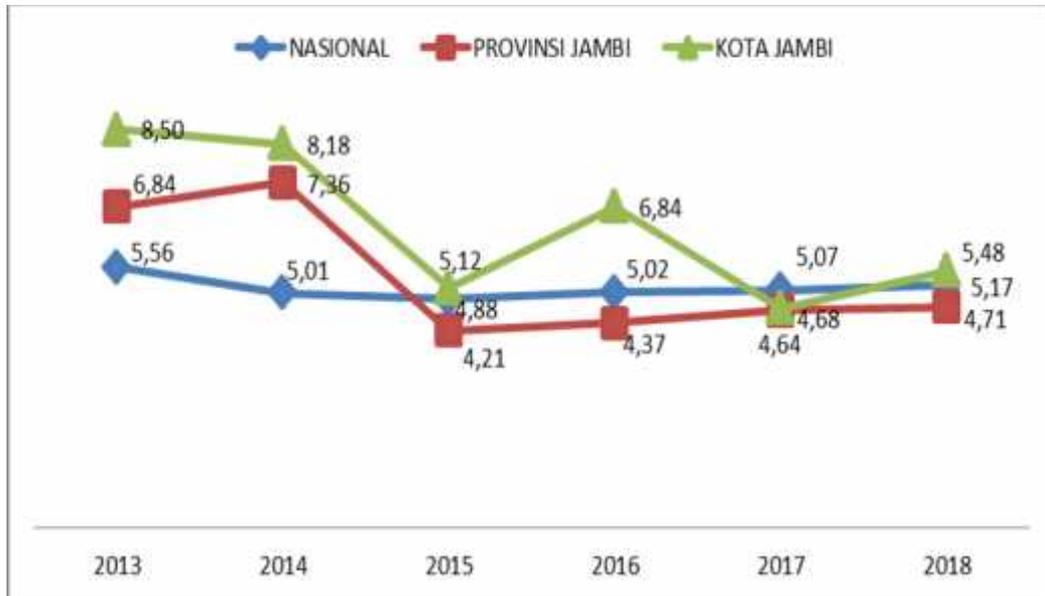
#### c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan dan tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

##### 3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2013-2018, LPE Kota Jambi tertinggi pada tahun 2013 tercatat 8,50%. Pada tahun selanjutnya, LPE Kota Jambi mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional. Pada tahun 2018, LPE Kota Jambi tercatat sebesar 5,48% berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 4,71% dan LPE Nasional yang tercatat sebesar 5,17%. Untuk mengetahui

perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Gambar 3.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176.100,2	180.644,7	183.855,4	187.682,2	194.162,7
B Pertambangan dan Penggalian	766.189,1	526.090,1	509.005,0	418.285,0	432.125,5
C Industri Pengolahan	1.866.508,2	1.962.940,8	2.045.889,0	2.124.292,0	2.205.318,0
D Pengadaan Listrik dan Gas	27.639,6	29.450,5	31.178,2	31.726,2	33.645,4
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	40.081,3	41.270,4	42.990,4	43.958,3	46.128,1

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
dan Daur Ulang					
F Konstruksi	1.479.150,5	1.516.106,7	1.578.659,8	1.703.565,8	1.809.482,7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.510,2	4.219.918,0	4.544.458,6	4.784.479,7	5.120.193,4
H Transportasi dan Pergudangan	1.887.577,5	1.995.122,5	2.242.842,8	2.398.293,7	2.516.597,0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.428,7	350.227,2	379.073,8	415.165,6	447.018,7
J Informasi dan Komunikasi	709.840,2	776.304,7	843.486,1	900.356,3	974.847,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi	919.657,9	936.666,3	1.050.080,2	1.085.941,6	1.079.091,2
L Real Estate	392.461,3	402.011,5	421.727,5	444.988,5	474.671,3
M Jasa Perusahaan	418.398,7	446.930,1	476.179,4	504.519,6	531.246,6
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.142.178,9	1.215.546,1	1.251.814,4	1.282.749,4	1.341.765,9
P Jasa Pendidikan	674.122,5	725.595,6	771.534,5	805.599,0	858.389,0
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.416,9	401.894,3	430.571,1	457.497,0	486.045,0
R Jasa Lainnya	115.968,0	125.234,4	133.095,9	139.239,0	148.782,7
PDRB	15.080.229,51	15.851.953,80	16.936.442,08	17.728.338,77	18.699.511,01
PDRB TANPA MIGAS	14.387.706,84	15.400.736,50	16.484.678,81	17.321.018,16	18.279.010,53

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2018 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5.120.193,4 juta; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.516.597,0 juta; sektor Industri Pengolahan sebesar 2.205.318,0 juta; sektor Konstruksi sebesar 1.809.482,7; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.341.765,9 juta.

Sedangkan untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.  
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,45	2,58	1,78	2,08	3,45
B Pertambangan dan Penggalian	0,78	-31,34	-3,25	-17,82	3,31
C Industri Pengolahan	6,58	5,17	4,23	3,83	3,81
D Pengadaan Listrik dan Gas	17,53	6,55	5,87	1,76	6,05
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,26	2,97	4,17	2,25	4,94
F Konstruksi	4,07	2,50	4,13	7,91	6,22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	12,13	7,69	5,28	7,02
H Transportasi dan Pergudangan	8,21	5,70	12,42	6,93	4,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,07	4,10	8,24	9,52	7,67
J Informasi dan Komunikasi	3,82	9,36	8,65	6,74	8,27
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	1,85	12,11	3,42	-0,63
L Real Estate	4,02	2,43	4,90	5,52	6,67
M Jasa Perusahaan	6,16	6,82	6,54	5,95	5,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,63	6,42	2,98	2,47	4,60
P Jasa Pendidikan	1,32	7,64	6,33	4,42	6,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,51	10,28	7,14	6,25	6,24
R,S Jasa Lainnya	3,25	7,99	6,28	4,62	6,85
PDRB	8,18	8,18	5,12	6,84	4,68
PDRB TANPA MIGAS	8,61	8,61	7,04	7,04	5,07

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2019 berada pada angka 5,66% dan tahun 2020 berada pada angka 5,81%. Angka ini diproyeksi berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah meningkatkan realisasi investasi, menjaga ketertiban umum, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014–2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	259.500,2	285.976,4	310.926,4	318.350,8	340.031,5
B Pertambangan dan Pengalihan	945.870,0	541.713,1	519.833,2	407.736,9	580.545,2
C Industri Pengolahan	2.254.423,9	2.467.766,5	2.655.297,7	2.830.668,4	2.998.229,5
D Pengadaan Listrik dan Gas	30.776,1	38.209,0	47.918,2	55.563,3	61.123,6
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	51.108,5	56.355,4	62.059,2	66.782,8	71.414,8
F Konstruksi	1.830.534,8	1.929.782,2	2.090.379,7	2.308.869,3	2.554.035,8
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.021.859,3	5.999.141,8	7.233.207,3	7.952.233,5	8.896.456,5
H Transportasi dan Pergudangan	2.162.103,7	2.535.824,6	3.072.603,0	3.329.315,5	3.625.367,9
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	439.121,6	484.230,5	558.390,6	631.987,4	682.667,2
J Informasi dan Komunikasi	788.716,6	941.735,8	1.115.130,2	1.205.592,8	1.333.277,7
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.179.766,0	1.251.236,8	1.465.861,8	1.536.121,0	1.582.389,7
L Real Estate	480.596,2	526.996,7	586.664,0	634.744,9	715.290,4
M Jasa Perusahaan	554.290,1	633.413,1	729.191,4	792.132,2	860.369,7
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.597.559,5	2.021.306,5	2.152.994,6	2.263.899,9	2.503.891,0

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
P Jasa Pendidikan	830.899,7	956.332,3	1.091.377,9	1.190.858,8	1.288.997,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	419.766,2	473.040,5	544.568,9	587.990,4	635.721,5
R Jasa Lainnya	130.618,2	150.391,9	169.123,8	181.462,2	199.918,8
<b>PDRB</b>	18.977.510,71	21.293.452,91	24.405.528,00	26.294.309,98	28.929.728,48
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	18.129.994,94	20.855.763,68	23.967.718,64	25.904.375,94	28.368.101,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor sama seperti pada tahun 2017, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2018 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 3.4.  
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,37	1,34	1,27	1,21	1,18
B Pertambangan dan Penggalian	4,98	2,54	2,13	1,55	2,01
C Industri Pengolahan	11,88	11,59	10,88	10,77	10,36
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,18	0,20	0,21	0,21
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
F Konstruksi	9,65	9,06	8,57	8,78	8,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,46	28,17	29,64	30,24	30,75
H Transportasi dan Pergudangan	11,39	11,91	12,59	12,66	12,53

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,27	2,29	2,40	2,36
J Informasi dan Komunikasi	4,16	4,42	4,57	4,58	4,61
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,22	5,88	6,01	5,84	5,47
L Real Estate	2,53	2,47	2,40	2,41	2,47
M Jasa Perusahaan	2,92	2,97	2,99	3,01	2,97
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,42	9,49	8,82	8,61	8,66
P Jasa Pendidikan	4,38	4,49	4,47	4,53	4,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,22	2,23	2,24	2,20
R,S Jasa Lainnya	0,69	0,71	0,69	0,69	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	95,53	97,94	98,21	98,52	98,06

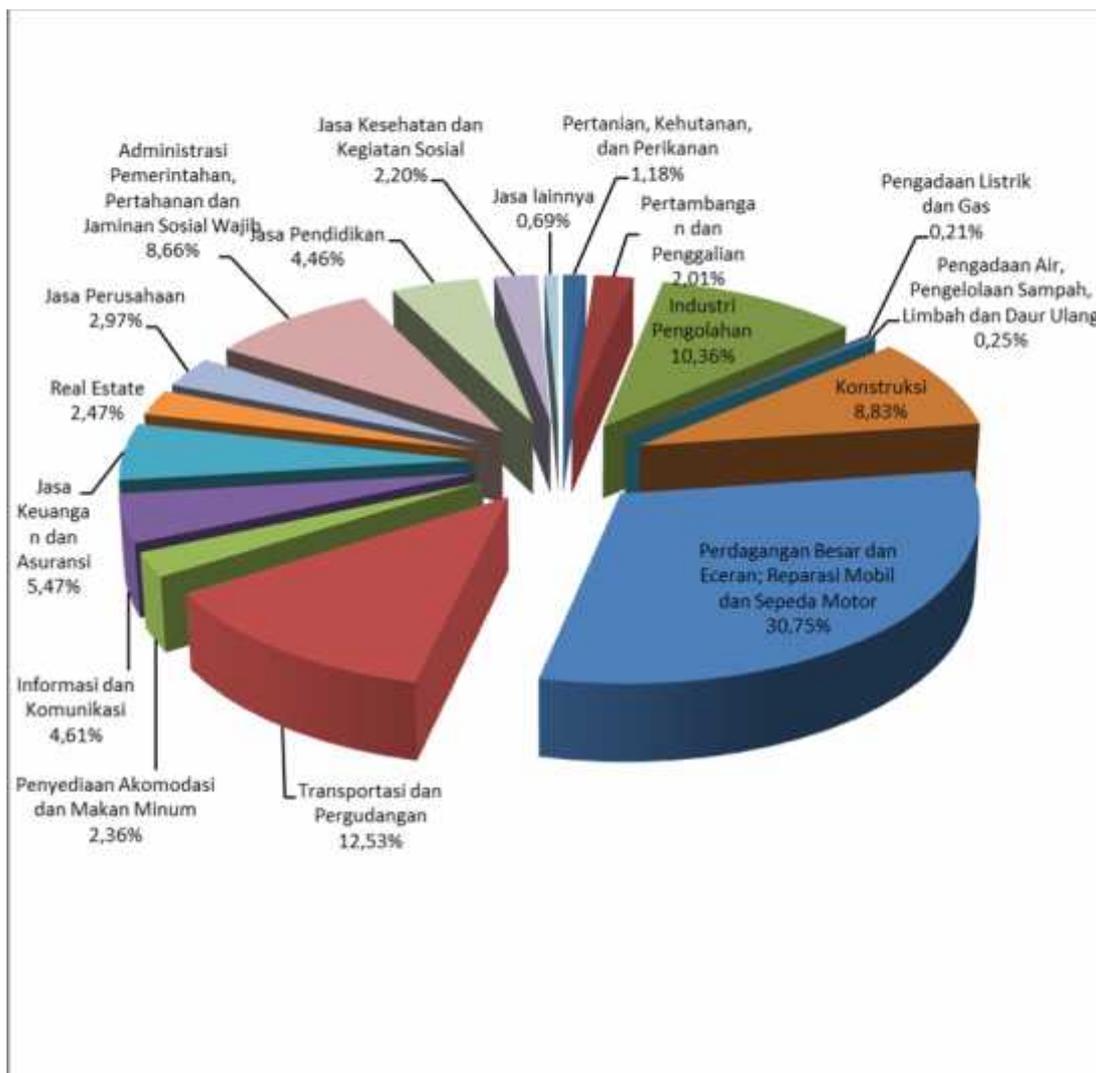
Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 30,75%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,53%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,36%; sektor Konstruksi sebesar 8,83%; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,66%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2018 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2  
 Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha  
 Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2018

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013-2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai

pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.5  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,95	18.977,51	21.293,45	24.405,53	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,74	15.080,23	15.851,95	16.936,44	17.728,34
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	10.710,25	12.086,27	13.123,57	14.189,01	15.682,34
2.	Atas Dasar Harga Konstan	9.122,70	9.598,45	10.072,15	10.526,96	11.071,36
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	64,58	63,69	61,63	58,14	59,64
2.	Atas Dasar Harga Konstan	65,44	63,65	63,54	62,16	62,45

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi

akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.287,97 miliar rupiah (2014); 4.702,83 miliar rupiah (2015); dan 5.000,77 miliar rupiah (2016); 5.154,58 miliar rupiah serta (2017) sebesar 5.274,12. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 3.6  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB  
Kota Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,9 5	18.977,5 1	21.293,4 5	24.405,5 3	26.294,3 1
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,7 4	15.080,2 3	15.851,9 5	16.936,4 4	17.728,3 4
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.287,97	4.702,83	5.000,77	5.154,58	5.274,12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.357,06	3.411,11	3.424,91	3.311,91	3.399,45
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	25,86	24,78	23,49	21,12	20,06
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,08	22,62	21,61	19,55	19,18

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.15, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 4.677,71milyar pada tahun 2013 menjadi Rp.4,6378milyar pada tahun 2017. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.7  
 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota  
 Jambi Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,9 5	18.977,5 1	21.293,45	24.405,5 3	26.294,31
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,7 4	15.080,2 3	15.851,95	16.936,4 4	17.728,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	4.677,71	4.993,04	5.123,10	5.611,09	6.247,44
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.006,63	4.033,81	4.014,60	4.223,48	4.678,80
Persentase PMTB thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28,21	26,31	24,06	22,99	23,76
2.	Atas Dasar Harga Konstan	28,74	26,75	25,33	24,94	26,39

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

### 3.1.1.2. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2013 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,12 juta rupiah naik menjadi 44,48 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2013 sebesar Rp. 24,48 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 29,99 juta rupiah pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.8.  
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya  
Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.583,9 5	18.977,5 1	21.293,4 5	24.405,5 3	26.294,3 1
2.	Atas Dasar Harga Konstan	13.939,7 4	15.080,2 3	15.851,9 5	16.936,4 4	17.728,3 4
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	29.128,8 3	33.407,4 6	39.963,5 0	41.827,0 3	44.481,1 3
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.484,4 1	26.546,8 0	27.517,5 5	29.026,2 5	29.990,3 9
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	6,21	8,42	3,66	5,48	3,32

Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

### 3.1.1.3. Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal administered price terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 laju inflasi terjadi pada kelompok volatile food.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.  
Inflasi Kota Jambi Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
Inflasi	8,72	1,37	4,54	2,68	3,02	4,06

Sumber: BPS Kota Jambi, 2019

Inflasi Kota Jambi tahun 2018 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,89 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,54

persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,53 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,19 persen.

Jika melihat inflasi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang terjadi pada volatile food maka kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah fokus pada peningkatan jumlah pasokan dengan memperhatikan tata niaga perdagangan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar dan menumbuh kembangkan usaha pedagang-pedagang kecil. Dengan kegiatan yang diarahkan pada Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan melaksanakan penyuluhan sumber-sumber pangan alternatif yang disesuaikan dengan kondisi Kota Jambi.

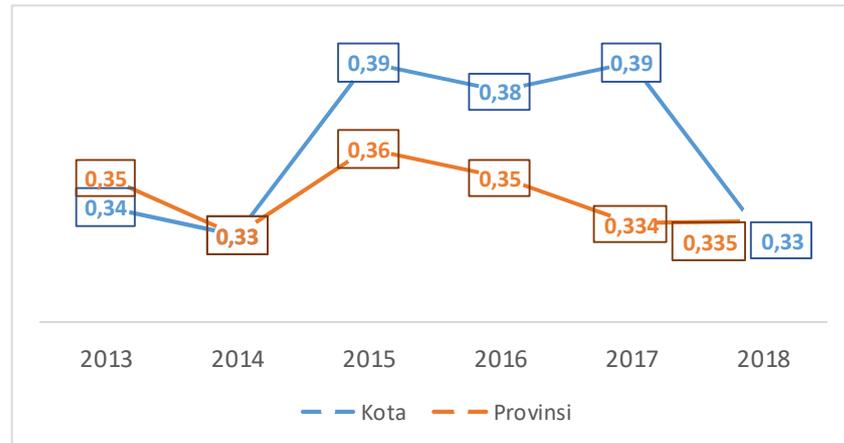
Target inflasi Kota Jambi tahun 2019 pada angka 3,5% dengan angka deviasi 1%, sedangkan target inflasi tahun 2020 berdasarkan tren 5 tahun terakhir adalah sebesar 3,00% dengan angka deviasi 1%, angka ini sama dengan target nasional. Inflasi Kota Jambi dipengaruhi oleh administered price, core inflation dan volatile food. Upaya pengendalian Inflasi Kota Jambi yang berasal dari faktor internal adalah komitmen dari pemerintah kota dari sisi pengeluaran pemerintah (government expenditure) yang efektif dan efisien harus sesuai dengan anggaran kas agar tidak menumpuk di triwulan IV, melaksanakan operasi pasar dan mengoptimalkan neraca input output barang dan jasa.

#### 3.1.1.4. Koefisien Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2018 mencapai 0,33 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,335. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan)

penduduk Kota Jambitelah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2018

Gambar 3.3.  
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi  
Tahun 2013-2018

Target Gini rasio Kota Jambi tahun 2020 adalah sebesar 0,31 angka ini sama dengan target Provinsi Jambi. Upaya dalam menurunkan gini rasio Kota Jambi salah satunya pengembangan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan pihak swasta/lembaga pelatihan yang terkait.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kondisi perekonomian daerah tahun 2019 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2020 adalah:

#### a. Faktor Eksternal

)Potensi kenaikan inflasi yang berpotensi terjadi dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat dari tren harga minyak dunia yang terus meningkat.

)Tantangan yang dihadapi Kota Jambi tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh

pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik.

)Adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kota Jambi dalam melakukan persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Kota Jambi.

)Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Jambi di tahun 2019.

)Laju Inflasi di Kota Jambi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan (administered price dan inflasi inti).

#### b. Faktor Internal

)Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

)Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017-2019) tercatat rata-rata sebesar 22% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

Tabel 3.10  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	397.327.847.290	338.891.882.592,96	364.142.193.000	402.031.622.000	442.917.916.000
1.1.1	Pajak daerah	201.429.136.841	215.444.388.499	223.000.000.000	246.235.000.000	270.860.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	43.077.425.944	40.389.059.087,09	46.726.000.000	47.568.000.000	48.826.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.066.340.479	8.854.962.599,49	9.000.000.000	10.000.000.000	10.269.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.754.944.026	74.203.426.907,38	85.416.193.000	98.228.622.000	112.962.916.000
1.2	Dana perimbangan	1.013.005.895.282	1.110.714.904.091,00	1.134.707.598.000	1.144.291.970.000	1.179.293.447.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	108.336.723.678	118.633.409.807	137.956.917.000	139.000.000.000	141.000.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	714.783.378.000	714.783.378.000	757.404.051.000	764.748.606.000	795.344.649.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	189.885.793.604	277.298.116.284	239.346.630.000	240.543.364.000	242.948.798.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.299.495.375	175.270.526.028,23	161.204.094.000	182.750.576.000	188.287.067.000
1.3.1	Hibah	2.819.000.000	59.419.509.209,40	61.845.400.000	58.911.800.000	61.845.400.000
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.760.495.375	94.131.016.818,83	81.347.485.000	99.531.971.000	104.430.458.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		18.000.000.000	11.291.209.000	13.291.209.000	15.291.209.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.720.000.000	3.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	1.500.633.237.947	1.624.877.312.712,19	1.660.053.885.000	1.727.712.172.000	1.810.498.430.000

Tabel 3.11  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
Kota Jambi  
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	770.842.287.000	781.427.555.000
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	4.157.723.000	4.178.512.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.133.000	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	759.889.727.857	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000
2.2	Belanja Langsung	862.510.115.270	921.345.540.132,20	915.500.926.000	984.865.632.000	1.038.126.249.000
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	65.517.669.000	66.828.022.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	492.330.323.000	501.526.147.000
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	417.329.373.000	469.772.080.000
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	984.865.632.000	1.038.126.249.000
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000	1.841.855.716.000

Tabel 3.12  
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
 Kota Jambi  
 Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
03.01	Penerimaan Pembiayaan					
03.01.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	67.173.120.000	32.357.286.000
03.01.04	Penerimaan pinjaman daerah				400.000.000.000	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>134.489.386.517</b>	<b>131.650.797.288</b>	<b>50.558.257.885</b>	<b>467.173.120.000</b>	<b>32.357.286.000</b>
03.02	Pengeluaran pembiayaan					
03.02.01	Pembentukan dana cadangan					
03.02.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000		15.000.000.000	
03.02.03	Pembayaran pokok hutang	181.148.041			0	1.000.000.000
03.02.04	Pemberian pinjaman daerah					
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.169.148.041</b>	<b>5.000.000.000</b>		<b>15.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>127.320.238.476</b>	<b>126.650.797.288</b>	<b>50.558.257.885</b>	<b>452.173.120.000</b>	<b>31.357.286.000</b>

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
Kota Jambi

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019	PROYEKSI 2020
1	PAJAK DAERAH	201.429.136.841,40	215.444.388.499	223.000.000.000	246.235.000.000
2	RETRIBUSI DAERAH	43.077.425.943,53	40.389.059.087,09	46.726.000.000	47.568.000.000
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.066.340.478,60	8.854.962.599,49	9.000.000.000	10.000.000.000
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	144.754.944.025,57	74.203.472.407,38	85.416.193.000	98.228.622.000
	JUMLAH PAD	397.327.847.289,10	338.891.882.592,96	364.142.193.000	402.031.622.000
5	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	108.336.723.678,00	118.633.409.807	137.956.917.000	139.000.000.000
6	D A U	714.783.378.000,00	714.783.378.000	757.404.051.000	764.748.606.00
7	D A K	189.885.793.604,00	277.298.116.284	239.346.630.000	240.543.364.000
8	D I D	0	0		
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1.013.005.895.282,00	1.110.714.904.091,00	1.134.707.598.000	1.144.291.970.000
9	PENDAPATAN HIBAH	2.819.000.000,00	59.419.509.209,40	61.845.400.000	61.845.400.000
10	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	80.760.495.375,60	94.131.016.818,83	81.347.485.000	99.531.971.000
53 11 1	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	0	18.000.000.000	11.291.209.000	13.291.209.000
12	BANTUAN KEUANGAN	6.720.000.000,00	3.720.000.000	6.720.000.000	6.720.000.000
	JML LAIN-LAIN PEND. DAERAH	90.299.495.375,60	175.270.526.028,23	161.204.094.000	181.388.580.000
	JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA	1.500.633.237.946,70	1.624.877.312.712,19	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;

- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2020 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- ) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- ) Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- ) Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

#### Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat , ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pinjaman daerah untuk percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik baik melalui lembaga perbankan/non perbankan.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.

- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

#### Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.628.500.835.180,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

#### Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2018 mencapai Rp 338.891.882.592,96 atau 100,89% dari target penerimaan sebesar Rp 335.902.135.250,00.

Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2017 yakni sebesar Rp 397.327.847.289,10, maka PAD Tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan rekening pendapatan dana BOS yang pada tahun 2017 ditempatkan di dalam komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, pada tahun 2018 dipindahkan tempatnya ke rekening Pendapatan Hibah pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2017 dengan Tahun 2018.

Tabel 3.14

Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2017 dengan TA 2018

No	Uraian	2017			2018		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pajak Daerah	198.940.000	201.429.136	101,25	203.500.000	215.444.388	105,87
2	Ret. Daerah	46.403.840	43.077.425	92,83	44.012.000	40.389.059	91,77
3	Bagi laba atas penyertaan modal pada perush milik negara/BUMD	8.060.000	8.066.340	100,08	8.850.000	8.854.962	100,06

4	Lain-lain PAD yg sah	137.488.793	144.754.944	105,28	79.540.135	74.203.472	93,29
TOTAL		390.892.633	397.327.847	101,65	335.902.135	338.891.882	100,89

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

### Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2017 dan 2018 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15  
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan  
TA 2017 dengan TA 2018

No	Uraian	2017			2018		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak	74.200.629	67.301.369	90,67	91.035.267	71.532.045	78,58
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	37.305.300	41.035.354	110,22	27.855.002	47.101.364	169,09
3	Dana Alokasi Umum	714.783.378	714.783.378	100	714.783.378	714.783.378	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	231.500.605	189.885.793	82,02	291.823.567	277.298.116	95,02
TOTAL		1.057.789.912	1.013.005.895	95,77	1.125.497.214	1.110.714.904	98,69

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

Target dana perimbangan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.125.497.214.930,00 dan realisasinya mencapai Rp 1.110.714.904.091,00 atau 98,69 %.

### Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi atau Pemerintah Daerah lainnya. Selama tahun 2018, target pendapatan hibah sebesar Rp. 62.534.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 59.419.509.209,40 (95,02%). Untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yg ditargetkan sebesar Rp 81.347.485.000,00 yang dapat terealisasi sebesar Rp 94.131.016.818,83 (115,71 %).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2017 dengan tahun 2018 di bawah ini :

Tabel 3.16  
Perbandingan Target dan Realisasi LLPdYS TA 2017 dengan TA 2018

No	Uraian	2017			2018		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pendapatan Hibah	2.000.000	2.819.000	140,95	62.534.000	59.419.509	95,02
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	86.964.861	80.760.495	92,87	81.347.485	94.131.016	115,71
4	Dana Penyesuaian Otsus	0	0	0	18.000.000	18.000.000	100,00
5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	6.720.000	6.720.000	100	5.220.000	3.720.000	71,26
TOTAL		95.684.861	90.299.495	94,37	167.101.485	175.270.526	104,89

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga tehnis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2018 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.755.151.632.467,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 995.261.904.610,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 759.889.727.857,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2017 sebesar Rp 1.671.160.550.942,00 maka tahun 2018 belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan.

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Jambi

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Proyeksi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	770.842.287.000
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Proyeksi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	14.725.400.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	4.157.723.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.133.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.105.867.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	793.123.410.000
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	65.517.669.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	492.330.323.000
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	417.329.373.000
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	975.177.365.000
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2018, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan adalah untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 pembiayaan di Kota Jambi untuk realisasi penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 134.489.386.517 dan Rp 131.650.797.287,90. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.169.148.041 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

## Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Anggaran 2019	Proyeksi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	40.446.607.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	40.446.607.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000	0	0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	181.148.041	0	0	1.000.000.000
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	7.169.148.041	5.000.000.000	0	1.000.000.000
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	127.320.238.476	126.650.797.287	50.558.257.885	39.446.607.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2019

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD tahun anggaran 2019, pembiayaan netto ditargetkan Rp 50.558.257.885, sedangkan realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2017 sebesar Rp 127.320.238.476 dan tahun 2018 sebesar Rp. 126.650.797.287.

## BAB IV

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu **“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa	: karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
Berbasis Masyarakat	: <i>community based</i> merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak	: berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya	: memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima	: upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

**Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi**

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

**Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat**

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

**Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan**

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

**Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja

**Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan**

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 4.1.  
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Kota Jambi**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020			
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,44			
						Indeks Profesionalitas ASN	74%			
						Nilai SAKIP	A			
						Indeks persepsi anti Korupsi	3,69			
						Indeks Kepuasan Masyarakat	86%			
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	6%	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%			
						Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	100%	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%
									Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan
		Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%						
		3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	5,67%	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan pelayanan transportasi	64,38%	
Persentase Pelayanan Perparkiran	80.74%									
Cakupan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat	74%									
Rasio jalan kota dalam kondisi baik	91.79%									
Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	40%									
Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	68,39%									
Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	1,07%									
Rasio Bangunan dalam kondisi baik	61,99%									
Titik genangan	19 Titik									
Ratio ketaatan RTRW	95.2%									

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,59 %	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	97.5%
					Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	47,14
						Indeks Kualitas Udara	91.84
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,05
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.81	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	52%
					Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,6%
					Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,38%
					Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
					Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430.5 M
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,22%	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,25%
					Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8,54%
						Persentase Daya Saing Produk IKM	5,35 %
						Persentase koperasi berkualitas	19,27%
					5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.61					
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	17,32					
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,69					
Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,05					
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,46%					
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan						
Indeks Pembangunan Gender	94,91%	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.91			
			Indeks Pemberdayaan Gender	68.20			
Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2020	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43%	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61,43 %
					Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	50 %
			Persentase Penduduk Miskin	7,29%	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%

## **4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### **4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2020, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2020. Visi “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, keseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia yang menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2020, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Tema RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2020 adalah pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua

pemangku kepentingan.. Rencana pembangunan nasional tahun 2020 dijabarkan dalam 5 prioritas nasional sebagai berikut:

PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan infrastruktur perkotaan.

- d. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

PN 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 4. Ketahanan Pangan, Air, energi dan Lingkungan Hidup, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

PN 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, yang dijabarkan lagi kedalam Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.

- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2020

Tabel 4.2.  
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
		Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		Mendorong pembangunan Gender		
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana	Share Sektor Sekunder	21,5%
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Total Factor Productivity	1.
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif		
		Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan		
3	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
		Memperluas akses terhadap air minum layak	Akses terhadap air minum layak	75%
		Memperluas akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak	75%
		Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	95%
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Ketersediaan Energi	1.
		Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat		
		Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	Peningkatan Pemanfaatan EBT	1.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.

5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Meningkatkan tata kelola layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Meningkatkan akuntabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia	77
		Meningkatkan kemampuan ASN		
		Meningkatkan kamtibmas		

### 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Jambi

NO	NAMA DEWAN	NO REG	FRAKSI	KOMISI	POKIR
1	Wahyudi Panpri (8)	1,1	PAN	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan perbaikan jalan lingkungan rt. 20 dan rt 21 kelurahan sungai asam</li> <li>2. Pembangunan poskamling rt. 20 rt. 21 kelurahan sungai asam</li> <li>3. Pengadaan sarana olahraga bulu tangkis dan tenis meja rt. 21 kelurahan sungai asam</li> <li>4. Perbaikan tempat ibadah (langgar) rt. 21 kelurahan sungai asam</li> <li>5. Pengendalian distribusi gas bersubsidi untuk usaha</li> <li>6. Pengaspalan jalan rt. 10 (jalan menuju sd negeri 18) kelurahan sungai asam</li> <li>7. Pengadaan tenda dan kursi inventaris rt 10 kelurahan sungai asam</li> <li>8. Program bangkit berdaya untuk rt 12 kelurahan beringin</li> </ol>
2	YENNY SINAGA, S.Th, (3)	1,1	PDI Perjuangan	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan dan pemasangan hydrant untuk penanggulangan pertama kebakaran di RT. 07 Kelurahan Lebak Bandung</li> <li>2. Penyaluran serta pemberian tunjangan untuk janda dan anak terlantar Kelurahan Lebak Bandung</li> <li>3. Validasi data untuk penerima Program Keluarga Harapan Kelurahan Lebak Bandung</li> </ol>
3	NYIMAS MAZNIATI (3)	1,2	HANURA	IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan dan pendataan terhadap kios dan ruko yang kosong di daerah Pasar Jambi</li> <li>2. Penyaluran bantuan pinjaman modal untuk para pedagang usaha mikro kecil di RT. 06 Kelurahan OKH</li> <li>3. Pemanfaatan/ difungsikannya lahan yang berada di daerah bekas bioskop Ria</li> </ol>
4	YENNY SINAGA, S.Th, (7)	1,2	PDI - PERJUANGAN	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan drainase di rt. 07 kelurahan beringin, rt. 06 kelurahan jelutung dan rt. 19 kelurahan cempaka putih</li> <li>2. Penyediaan dana bantuan untuk warga kurang mampu di rt. 19 kelurahan cempaka putih</li> <li>3. Pembangunan bak sampah (tps) di rt. 03 dan rt. 04 kelurahan talang jauh</li> <li>4. Penertiban dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga (penegakan perda)</li> <li>5. Peningkatan lampu jalan kelurahan talang jauh rt. 03 dan rt. 04</li> <li>6. Pengendalian pendistribusian gas bersubsidi di kelurahan beringin</li> <li>7. Pengendalian arus lalu lintas di kawasan jelutung yang rawan macet</li> </ol>
5	APRIZAL, S.Ag (4)	1,3	Golkar	II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran program beasiswa di tiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA untuk anak yatim piatu dan kurang mampu</li> <li>2. Peningkatan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Daerah</li> <li>3. Pengadaan dan pemasangan hydrant untuk penanggulangan pertama kebakaran di RT. 27 Kelurahan Handil Jaya</li> <li>4. Perbaikan got/ parit saluran air di Perumnas Kelurahan Kebun Handil</li> </ol>
6	NYIMAS MAZNIATI (6)	1,3	HANURA	IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perobohan istana anak-anak untuk mengoptimalkan lahan parkir di pasar jambi yang semakin padat</li> <li>2. Kantor lurah orang kayo hitam dibesarkan/ ditingkatkan untuk aula dan kegiatan pkk</li> <li>3. Pembangunan turap di rt 07 kelurahan orang kayo hitam yang sudah rusak serta pembangunan drainase di rt tersebut</li> <li>4. Pembangunan sarana olahraga di pasar jambi</li> <li>5. Penanganan masalah banjir di jalan rt. 03, 04, 05 kelurahan pasar jambi yang dikarenakan drainase yang ada saat ini kecil</li> <li>6. Penertipan pungli pada pedagang kecil yang terjadi di pasar jambi</li> </ol>
7	EKO SETIAWAN, SE (4)	1,4	GERINDRA	IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan peserta untuk program-program yang terkait dengan kesehatan baik BPJS, Kartu Sehat ataupun program lainnya</li> </ol>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Perbaikan jalan di Lr. Sitak RT.34 Kelurahan Jelutung</li> <li>3. Pembangunan drainase di Lr. Sitak RT.34 Kelurahan Jelutung</li> <li>4. Solusi penanggulangan banjir di RT. 51 Kelurahan Jelutung</li> </ul>
8	M. FUAD SAFARI, Sos, I (6)	1,4	DEMOKRAT	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi pembangunan drainase di rt. 02 kelurahan payo lebar yang sudah diajukan pada tahun 2014</li> <li>2. Perbaikan drainase dari rt. 19 sampai rt. 26 karena terjadi pendangkalan kelurahan payo lebar</li> <li>3. Perbaikan drainase pada rt. 33 yang mana drainase tersebut aliran airnya melimpah sampai ke jalan</li> <li>4. Pengadaan mirror atau kaca untuk tikungan jalan di rt. 17 kelurahan payo lebar</li> <li>5. Realisasi pengadaan lampu jalan sebanyak empat titik di rt. 20 kelurahan payo lebar di dekat asrama baiturahim dan sd negeri 180 yang mana sudah diajukan di musrembang</li> <li>6. Kos-kosan di rt. 03 belum ada izin yang jelas serta penghuninya tidak melapor ke ketua rt agar ditindak lanjuti karena sudah meresahkan warga</li> </ul>
9	APRIZAL, S.Ag (14)	1,5	GOLKAR	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaspalan dan pengecoran jalan rt 23 kelurahan handil jaya</li> <li>2. Pengadaan lampu dan tiang lampu jalan di rt.13 kelurahan handil jaya</li> <li>3. Perbaikan gorong-gorong di rt. 14 kelurahan handil jaya</li> <li>4. Pengelolaan taman di sebelah kantor lurah handil jaya agar diserahkan ke warga</li> <li>5. Pengaspalan rt. 01 jl. H. Suandi</li> <li>6. Perbaikan (pengerukan) drainase di rt. 12 sampai ke rt. 16 kelurahan handil jaya</li> <li>7. Perbaikan instalasi kabel listrik di rt. 26 kelurahan handil jaya karena terlalu banyak yang rendah</li> <li>8. Pengaspalan jalan di rt. 26 pada jl. Empit raya, jl. Empit 3, jl. Empit darajaya kelurahan handil jaya</li> <li>9. Pengaspalan di rt. 03 pada jl. mayangsari 3, jl. paplin dan jl. aster rt. 06</li> <li>10. Honor guru paud dianggarkan</li> <li>11. Penertiban parkir di jalan sekitar kampus baiturrahim</li> <li>12. Mobil sampah agar masuk ke lingkungan ke lurahan lebak bandung</li> <li>13. Peningkatan insentif rt</li> <li>14. Realisasi lampu jalan lingkungan sebanyak enam titik di rt. 34 kelurahan lebak bandung</li> </ul>
10	EKO SETIAWAN, SE (6)	1,6	GERINDRA	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan lampu jalan di depan masjid pada jl. melati i dan jl.melati ii rt. 48 kelurahan jelutung</li> <li>2. Peningkatan lampu jalan di daerah puncak</li> <li>3. Perbaikan jalan di rt. 28 kelurahan jelutung depan abdurahman</li> <li>4. Pengaspalan dan pengadaan lampu jalan di lorong ampel rt. 55 kelurahan jelutung</li> <li>5. Pembangunan drainase di rt. 29 di dekat sd tunas abadi</li> <li>6. Pengendalian pendistribusian gas bersubsidi di kelurahan jelutung</li> </ul>
11	SUTIONO, ST (12)	2,1	PDI - PERJUANGAN	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan balai adat dan budaya yang berfungsi sebagai tempat belajar bagiwarga di kelurahan mudung laut</li> <li>2. Penambahan lampu jalan serta tiang lampu jalan sebanyak 7 titik di rt. 06 kelurahan mudung laut</li> <li>3. Pengawasan dan pengangkutan sampah dari tps rt. 06 dan rt. 07 kelurahan mudung laut</li> <li>4. Pengendalian limbah rumah tangga di rt. 06 kelurahan mudung laut</li> <li>5. Mengembangkan pemasangan tiang listrik dan lampu jalan sebanyak lima titik untuk jalan lorong di rt. 08 kelurahan mudung laut</li> <li>6. Pemasangan tiang listrik serta lampu jalan sebanyak dua belas titik di rt. 09</li> </ul>

					kelurahan mudung laut 7. Penambahan lampu jalan jembatan di perbatasan kelurahan tengah sebanyak dua titik 8. Pemasangan lampu jalan untuk gapura depan sekolah paud ke arah rt. 09 sebanyak lima titik 9. Pengawasan pembangunan pasar baru kota jambi di kelurahan tanjung sari 10. Perbaikan jalan di jl. singosari kelurahan tanjung sari 11. Penambahan lampu jalan rt. 16 kelurahan tanjung sari 12. Perbaikan saluran air (got) yang buntu di rt. 09 kelurahan tanjung sari
12	ABDUS SOMAD (4)	2,1	PPP	I	1. Pembangunan jalan lingkungan 600 x 4 meter RT. 09 Kelurahan Mudung Laut 2. Perbaikan peninggian Jalan Usaha Tani 50 - 80 cm Kelurahan Mudung Laut 3. Pengadaan tiang listrik di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut 4. Pembangunan pembuatan box calver RT. 09 Kelurahan Mudung Laut
13	SUTIONO, ST (14)	2,2	PDI Perjuangan	II	1. Pengadaan tiang dan lampu jalan di RT. 08 Kelurahan Kasang Jaya sebanyak 5 titik 2. Penyaluran bantuan sosial PKH di RT.08 Kelurahan Kasang Jaya kepada keluarga penerima manfaat dan tepat sasaran 3. Penyaluran bantuan mesin perontok padi untuk Kelompok tani Kelurahan Kasang Jaya 4. Pengadaan pembuatan pintu air irigasi untuk kelompok tani di Kelurahan Kasang Jaya 5. Pengadaan tiang dan lampu jalan di RT. 14 Kelurahan Kasang Jaya sebanyak 3 titik 6. Pengadaan tiang dan lampu jalan di RT. 24 arah penggilingan padi Kelurahan Tanjung Sari sebanyak 5 titik 7. Overlay jalan lingkungan sepanjang 250 meter di RT.19 Kelurahan Tanjung Sari 8. Pengawasan terhadap Sekolah yang melakukan pungutan biaya perpisahan di Sekolah Dasar Kelurahan Talang Banjar 9. Perbaikan pembangunan jalan pada Jl. Cendana 1 dan Jl. Cendana 2 Kelurahan Talang Banjar 10. Pengadaan pemasangan lampu jalan di Jl. Cendana 2 Kelurahan Talang Banjar 11. Realisasi pengadaan mobil ambulans di Kelurahan Talang Banjar 12. Penyaluran bantuan sosial Rastha di RT. 14 Kelurahan Talang Banjar agar disegerakan 13. Pengecoran jalan lingkungan dengan parit tutup sepanjang 300 meter di RT. 08 Kelurahan Kasang Jaya 14. Pengecoran jalan lingkungan dengan parit tutup sepanjang 250 meter di RT. 09 Kelurahan Kasang Jaya
14	ABDULLAH THAIF, A. (4)	2,2	PKB	IV	1. Perbaikan jalan setapak antara rt 14 dan 15 kelurahan rajawali 2. Pembuatan dan perbaikan drainase di rt. 09 kelurahan rajawali 3. Perbaikan jalan di rt. 11 dan rt.21 kelurahan rajawali 4. Pengendalian limbah rumah tangga di rt 16,17,20,25 kelurahan rajawali
15	PARIS SIREGAR, SE (4)	2,3	PDI - PERJUANGAN	II	1. Pembangunan drainase di gang 85 rt. 30 kelurahan talang banjar 2. Perbaikan jalan lorong dan penerangan jalan rt. 30 kelurahan talang banjar 3. Pembangunan turap kelurahan talang banjar untuk mencegah musibah saat curah hujan tinggi karena menyebabkan banjir di sd sehingga membutuhkan perbaikan lokal 4. Pengawasan penambahan bangunan kios pasar talang banjar
16	ABDULLAH THAIF, A. (4)	2,3	PKB	IV	1. Pengadaan pemasangan lampu jalan di RT. 07 Kelurahan Kasang 2. Perbaikan jalan setelah Masjid Mujahidin Kelurahan Kasang 3. Bantuan pembelian tanah untuk tempat pemakaman Kelurahan Kasang 4. Pelatihan usaha ataupun ketenaga kerjaan untuk warga RT. 07 Kelurahan Kasang

17	SARTONO, SH, M.Hum (4)	2,4	PAN	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pendistribusian gas bersubsidi serta pengawasan terhadap pangkalan- pangkalannya</li> <li>2. Pembangunan pembuatan parit di lingkungan RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 Kelurahan Tanjung Sari</li> <li>3. Pelebaran parit di Lr. Garuda RT.27 dan RT. 28 Kelurahan Talang Banjar</li> <li>4. Pengadaan dan pemasangan hydrant untuk penanggulangan pertama kebakaran di RT. 03 Kelurahan Tanjung Sari</li> </ol>
18	PUTRA ABSOR (4)	2,4	GERINDRA	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan jalan lingkungan sepanjang 350 meter di rt. 05 kasang</li> <li>2. Masyarakat sekitar sekolah di harapkan dapat menjadi prioritas penerimaan siswa baru</li> <li>3. Pengawasan penyaluran dana bantuan dari pusat untuk usaha kecil menengah dan koperasi</li> <li>4. Peningkatan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan</li> </ol>
19	HORIZON, SE, ME (2)	2,5	DEMOKRAT	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan serta validasi data untuk penerima bantuan PKH di RT.09 Kelurahan Kasang Jaya</li> <li>2. Perbaikan pelebaran parit RT.09 Kelurahan Kasang Jaya</li> </ol>
20	SARTONO, SH, M.Hum (3)	2,5	PAN	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan instalasi listrik di rt. 23 kelurahan tanjung sari sekitar sd negeri 159</li> <li>2. Pembangunan drainase rt. 23 kelurahan tanjung sari</li> <li>3. Perbaikan jalan lingkungan rt. 23 kelurahan tanjung sari</li> </ol>
21	ABDUS SOMAD (3)	2,6	PPP	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penimbunan jalan, penampalan dan pengaspalan jalan dari kelurahan tanjung johor sampai kelurahan tahtul yaman</li> <li>2. Penambahan bpjs dan pkh bagi keluarga yang kurang mampu</li> <li>3. Dana csr dari perusahaan untuk masyarakat kelurahan tanjung johor</li> </ol>
22	HORIZON, SE, ME (4)	2,7	DEMOKRAT	I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pendataan dan penyaluran penerimaan bantuan rasta lebih diperhatikan di kelurahan tanjung sari</li> <li>2. Pengawasan pendistribusian gas bersubsidi 3 kg di kelurahan tanjung sari</li> <li>3. Peningkatan pelayanan kesehatan</li> <li>4. Peningkatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan</li> </ol>
23	RR. NULLY KURNIASIH (11)	3,1	DEMOKRAT	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat dan obat foging beserta tenaga petugasnya di tiap-tiap kelurahan sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah yang terjadi saat musim hujan</li> <li>2. Perbaikan kabel listrik yang kendur setinggi 2 meter dari jalan di Lr. Haji Kamil arah ke Perumahan Mutiara</li> <li>3. Perbaikan jalan di Lr. Haji Kamil</li> <li>4. Pengadaan LPJU pada Lr. Mawar RT. 13, 14, 16, 17 dan 18 Kelurahan Wijayapura yang telah lama diusulkan</li> <li>5. Pengadaan LPJU sebanyak 3 titik di RT. 32 Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>6. Perbaikan Jl. Belido I Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>7. Perawatan dan perbaikan draenase di Jerambah Bolong dan Simpang Ahok yang mengalami pendangkalan dan menyebabkan banjir di RT. 32 Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>8. Perbaikan jalan menuju ke Puskesmas dan ke arah RT. 10 Kelurahan Lingkar Selatan</li> <li>9. Pembangunan pembuatan drainase di Jl. Letkol Tarmizi Tahir</li> <li>10. Perbaikan jalan lingkungan di RT. 12 Kelurahan Paal Merah</li> <li>11. Pembangunan Pelebaran drainase di RT. 12 Kelurahan Paal Merah</li> </ol>
24	RR. NULLY KURNIASIH (6)	3,1	DEMOKRAT	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan drainase di rt. 36 kelurahan paal merah</li> <li>2. Perbaikan (pengecoran) jalan perumahan rt. 38 kelurahan paal merah</li> <li>3. Perbaikan drainase dan gorong-gorong di rt. 24 dan rt. 38 kelurahan paal merah</li> <li>4. Pengadaan lampu jalan sebanyak empat titik di rt. 24 dan rt 38 kelurahan paal merah</li> <li>5. Realisasi pembangunan drainase di rt. 26 lorong rambutan kelurahan paal merah</li> <li>6. Pengendalian pendistribusian gas 3 kg di kelurahan paal merah</li> </ol>
25	JUNEDI SINGARIMBUN,	3,2	PDI -	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perampungan penggalian untuk jaringan pipa gas rumah tangga di paal merah</li> </ol>

	(17)		PERJUANGAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Perbaikan jalan di jalan perumahan bumi paal merah indah</li> <li>3. Realisasi Ipju di rt. 50</li> <li>4. Perbaikan jalan yang menuju ke kantor lurah paal merah</li> <li>5. Perbaikan jalan rt. 47 yang merupakan jalan akses menuju sekolah dasar di paal merah</li> <li>6. Perbaikan drainase dari rt. 25 dan rt. 26 yang terputus</li> <li>7. Pembuatan jalan niaga di rt. 08 untuk memperlancar perekonomian dan alternatif jalan anak sekolah yang biasa melewati jalan lintas</li> <li>8. Pembuatan box cover gorong-gorong di rt. 39 dan rt. 52 kelurahan paal merah</li> <li>9. Pengadaan Ipju di rt. 39 dan rt. 52 kelurahan paal merah</li> <li>10. Perbaikan jalan di rt. 37 (Ir. suka damai) yang menuju rt. 50 serta pembangunan drainase</li> <li>11. Pembuatan gorong-gorong di rt. 32 kelurahan paal merah</li> <li>12. Penambahan lampu jalan empat titik di rt 32 kelurahan paal merah</li> <li>13. Perbaikan (pengerukan) drainase di rt. 32 kelurahan paal merah</li> <li>14. Pembangunan jalan lingkungan akses ke masjid di rt 07 kelurahan paal merah</li> <li>15. Pembangunan drainase di rt 25 kelurahan paal merah</li> <li>16. Perbaikan jalan di rt. 46 kelurahan paal merah sebanyak tiga titik</li> <li>17. Perampungan jaringan galian pipa gas di rt. 46 kelurahan paal merah</li> </ul>
26	SUPRANOTO, SP (8)	3,3	PDI - PERJUANGAN	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan jalan lingkungan serta pembuatan parit di rt. 17 yang merupakan jalan tembusan ke kantor lurah thehok</li> <li>2. Perbaikan drainase di depan langgar miftahul jannah kelurahan thehok</li> <li>3. Pembuatan jalan setapak di jl. pacitan rt. 08 kelurahan thehok</li> <li>4. Realisasi usulan musrenbang untuk kelurahan kelurahan di kecamatan paal merah</li> <li>5. Efisiensi pengangkutan sampah di depan pemakaman umum sukarejo</li> <li>6. Pengawasan pendistribusian gas bersubsidi 3 kg di kelurahan eka jaya</li> <li>7. Pengawasan dan pengelolaan pengangkutan sampah di pinggir jalan rt. 29 liposos 2</li> <li>8. Perbaikan jalan setapak di rt. 15 kelurahan thehok</li> </ul>
27	PARDOMUAN (21)	3,4	PKB	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan lampu jalan Ir. mahkamah i (kuburan) kelurahan talang bakung</li> <li>2. Peninjauan dan pengadaan tiang lampu jalan dari Ir. kartini sampai dengan Ir.mulyo kelurahan talang bakung</li> <li>3. Pembuatan parit besar dari kuburan rt. 42 sampai ke perumahan hamparan mulyo di kelurahan talang bakung</li> <li>4. Pemasangan lampu jalan di jl. koprall ramli samping pasar rt.16 kelurahan pasir putih</li> <li>5. Realisasi pembuatan/ perbaikan jalan di jalan gang bersama tembusan jalan poros</li> <li>6. Penambahan tiang dan lampu jalan sebanyak tujuh titik di rt. 38 kelurahan talang bakung</li> <li>7. Peninjauan untuk realisasi pembuatan jalan setapak di rt. 45 perumahan ratu daha</li> <li>8. Perbaikan jalan perumahan ratu dahan dari blok d sampai dengan musholla</li> <li>9. Penambahan lampu jalan sebanyak enam titik dan empat tiang perumahan ratu daha rt. 45</li> <li>10. Perbaikan drainase di rt. 45 perumahan ratu daha</li> <li>11. Pengaspalan jalan di rt. 46 dan rt. 16 kelurahan talang bakung</li> <li>12. Penambahan lampu jalan serta tiang di rt. 46 dan rt. 16 kelurahan talang bakung</li> <li>13. Pembuatan dan pembanguan jalan Ir. pangadi luhur sampai dengan Ir. damai di rt. 24 kelurahan talang bakung</li> <li>14. Penambahan tiang listrik sebanyak lima belas titik di rt. 24 kelurahan talang bakung</li> <li>15. Realsasi program bedah rumah sebanyak lima unit di rt. 24 kelurahan talang bakung</li> </ul>

					<p>16. Realisasi pembuatan jalan di rt. 45 kelurahan talang bakung</p> <p>17. Penyambungan pipa pdam sekitar 18 rumah tidak disetujui pdam di rt. 45 dan rt. 18 kelurahan talang bakung</p> <p>18. Penanggulangan banjir di rt. 46 perumahan safira kelurahan talang bakung</p> <p>19. Penyelesaian masalah tanah hibah yang sudah di timbun seluas 3 meter serta agar dapat dilakukan pengerasan jalan</p> <p>20. Pengadaan tiang lampu jalan serta lampu jalan sebanyak enam titik di rt. 29 arah ke kuburan kelurahan eka jaya</p> <p>21. Penambahan lampu jalan dan tiang lampu jalan di rt. 37 kelurahan talang bakung</p>
28	DARMAWAN (6)	3,5	GERINDRA	i	<p>1. Perbaikan jalan di rt. 07 lr. mabes kelurahan wijaya pura kurang lebih sepanjang 150 meter</p> <p>2. Perbaikan jalan di rt. 07 lr. haji kamil (gang 75) serta penambahan lpju</p> <p>3. Perbaikan jalan simpang masjid nurul ihsan rt. 19 ke arah sma unggul sakti</p> <p>4. Perbaikan jalan lingkungan di lr. arwana</p> <p>5. Perbaikan jalan di lr. widati ke arah masjid rt. 20</p> <p>6. Pemasangan lampu jalan di rt. 20 kelurahan wijayapura</p>
29	MUHILI AMIN, SH (6)	3,6	GOLKAR	I	<p>1. Perbaikan jl. bumi ayu serta pemasangan lpju di rt. 09 kelurahan thehok</p> <p>2. Perbaikan jalan lingkungan dan drainase di rt 05 kelurahan thehok</p> <p>3. Realisasi perbaikan jl. pacita rt. 14 kelurahan thehok</p> <p>4. Efisiensi penyaluran raskin</p> <p>5. Pelatihan untuk warga sebagai wadah usaha kecil dan menengah di rt. 09 kelurahan thehok</p> <p>6. Penyaluran kartu sehat dan berobat gratis di rt. 12 kelurahan thehok</p>
30	HJ.RAHMAINUR (5)	3,7	HANURA	I	<p>1. Pembuatan jalan di rt. 22 kelurahan talang bakung di jl. anggrek agar tembus di lr.baja dan lr. teratai</p> <p>2. Perbaikan jalan di rt.19 kelurahan talang bakung di jl. darmapala</p> <p>3. Realisasi pembuatan parit di rt. 13 kelurahan talang bakung</p> <p>4. Realisasi pembuatan jalan dan parit di rt. 10 kelurahan talang bakung</p> <p>5. Perampungan jalan yang semula diajukan 400 meter hanya teraspal 100 meter di jl.perjuangan penghubung antara rt.12 dengan rt. 14</p>
31	SYAIFUL IHSAN, SE (5)	4,1	PAN	II	<p>1. Renofasi arah kiblat langgar nur islam di rt.11 simpang iii sipin</p> <p>2. Pembangunan poskamling permanen di rt.11 kelurahan simpang iii sipin</p> <p>3. Perbaikan jalan di lr. hj. aminah rt. 17 (samping posyandu rt. 17) kelurahan simpang iii sipin</p> <p>4. Perbaikan jalan di jl. baitul muslim rt. 17 kelurahan simpang iii sipin</p> <p>5. Perbaikan jalan siswa iii bidan farida rt. 32 kelurahan simpang iii sipin</p>
32	SYOFNI HERAWATI, SP (5)	4,10	PKB	III	<p>1. Pembenahan drainase dan pengadaan pemasangan lpju di sebelas titik rt. 32 kelurahan simp. iii sipin</p> <p>2. Renovasi posyandu dan kepemilikan tanah warga yang didirikan posyandu di rt. 17 simpang iii sipin</p> <p>3. Penambahan pemasangan polongan air di jl. sunan bonang rt. 17 simpang iii sipin</p> <p>4. Pembangunan jalan di jl. kemuning, lr. mulyana, lr. baitu saddah dan lorong samping kantor lurah simpang tiga sipin</p> <p>5. Pengawasan pembuangan limbah ke drainase dan tempat pembuangan sampah yang tidak lagi dikelola bank sampah</p>
33	HJ. HENDRIANI, S.Pd (18)	4,2	DEMOKRAT	IV	<p>1. Perbaikan jalan rt. 19 jalan masuk ke perumahan kota baru indah kelurahan beliung</p> <p>2. Pelebaran dan pengaspalan jalan, pengadaan lpju dan perbaikan gorong - gorong di rt. 07 kelurahan beliung</p> <p>3. pengadaan lpju dan pembuatan septitank di rt. 06 kelurahan beliung</p> <p>4. Pengaspalan jalan rt. 12 di daerah patimura sebanyak 10 lorong</p> <p>5. Perbaikan jalan lingkungan dan perbaikan lpju di rt. 45 kelurahan beliung</p> <p>6. Pengadaan lampu jalan dan tiang lampu jalan di rt. 08 kelurahan beliung</p> <p>7. Perbaikan gedung posyandu rt. 45 kelurahan beliung</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pembangunan drainase di rt. 22 sampai dengan rt. 23 sepanjang 200 meter keluraha beliong</li> <li>9. Pengadaan lampu jalan dan posyandu di rt. 20,28,31 kelurahan beliong</li> <li>10. Perbaikan jalan di rt. 01 kelurahan rawasari</li> <li>11. Perbaikan jalan di rt. 07 kelurahan mayang mangurai di jl. margasari</li> <li>12. Pengaspalan jalan di rt. 18 kelurahan rawasari di jl. pinang putih sepanjang 700 meter</li> <li>13. Relokasi tempat pembuangan sampah (tps) di wilayah kelurahan beliong</li> <li>14. Perbaikan parit buntu di rt. 08 kelurahan beliong</li> <li>15. Pengelolaan sampah rumah tangga di rt. 18 kelurahan rawasari</li> <li>16. Kelancaran pengurusan ktp di kecamatan kota baru</li> <li>17. Pengawasan penyaluran pendistribusian gas bersubsidi 3 kg di rt. 18 kelurahan rawasari</li> <li>18. Pengadaan sarana olahraga (senam pagi) setiap hari minggu di rt. 06 kelurahan beliong</li> </ul>
34	MARIA MAGDALENA,SS (19)	4,3	PDI - PERJUANGAN	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penerimaan siswa baru sesuai aturan yang telah ditetapkan</li> <li>2. Optimalisasi fungsi dana bos</li> <li>3. Pengaspalan dan pembuatan saluran air (parit) serta lpju di depan langgar muklisin dan di depan lorong langgar muklisin di lr.langgar muklisin rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>4. perbaikan pengaspalan jalan lr. prawira dan lpju di simpang lorong rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>5. pembuatan parit, perbaikan jalan dan perbaikan lpju dua titik di lr. air mancur rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>6. perbaikan pengaspalan jalan dan perbaikan lpju sebanyak dua titik di rt. 04 kelurahan bagan pete</li> <li>7. perbaikan jalan 400 meter serta pengaspalan jalan dan pembuatan drainase di lr. bank rt. 07 kelurahan rawasari</li> <li>8. perumahan mayang mangurai indah sebelas tahun tidak mendapatkan/ tidak tersentuh pemerintah (pengaspalan dan lpju)</li> <li>9. pengecoran jalan setapak di lr. sawit tembusan ke langgar rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>10. perbaikan jalan serta perbaikan lpju dua titik di lr. berkah rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>11. pembuatan jembatan, pembuatan kanal dan perbaikan jalan di rt. 24 kelurahan mayang mangurai</li> <li>12. pengaspalan di lr. jambu rt. 07 kelurahan bagan pete</li> <li>13. pembangunan posyandu di rt. 08 kelurahan rawasari</li> <li>14. pembangunan posyandu di rt. 04 kelurahan bagan pete</li> <li>15. penyaluran umkm di rt.08 kelurahan rawasari</li> <li>16. perbaikan jalan di jl. kenali rt. 33 kelurahan kenali asam bawah</li> <li>17. pengawasan perampungan pembuatan gorong-gorong, perbaikan jalan dan pengadaan lpju di rt. 33 kelurahan kenali asam bawah</li> <li>18. pembentukan perda khusus csr wilayah pertambangan (pertamina) untuk percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kenali asam bawah</li> <li>19. kelancaran pelayanan proses pengobatan atau penanganan pasien yang menggunakan sktm</li> </ul>
35	YULIUS NUR, SP (10)	4,4	GOLKAR	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan jalan lingkungan dan pengadaan pemasangan tiang listrik di rt. 07 kelurahan bagan pete serta bantuan perbaikan musholah</li> <li>2. Renovasi serta perbaikan drainase di rt. 17 kelurahan bagan pete</li> <li>3. Perbaikan jalan (pengecoran dan pengaspalan) di gang perumahan pinang merah di rt. 18 kelurahan bagan pete</li> <li>4. Pengawasan penyaluran gas bersubsidi 3 kg di kelurahan bagan pete</li> <li>5. Bantuan pembuatan sertifikat berupa program prona untuk warga perumahan pinang merah kelurahan bagan pete</li> </ul>

					<p>6. Pembuatan dan perbaikan drainase sepanjang 1500 meter di jalan lingkungan rt. 18 perumahan pinang merah kelurahan bagan pete</p> <p>7. Pembuatan parit dan dam di perbatasan rt. 30 kelurahan bagan pete</p> <p>8. Pembuatan dan pengelolaan rutin sampah rumah tangga di depan perumahan dibeliung</p> <p>9. Perbaikan jalan, pemasangan dan renovasi lpju tiga titik di rt.31 jalan menuju mts</p> <p>10. Pengecoran pengaspalan jalan, pembuatan dan perbaikan drainase serta pemasangan lpju di gang-gang perumahan rt. 36</p>
36	H. JEFRIZEN, SE (6)	4,5	PDI - PERJUANGAN	III	<p>1. Pengadaan pemasangan lpju di rt. 35 mayang mangurai</p> <p>2. Pembangunan pembuatan drainase di rt. 36 mayang mangurai</p> <p>3. Pengawasan pendistribusian gas bersubsidi 3 kg di mayang mangurai</p> <p>4. Perbaikan jalan lingkungan, pengadaan lpju dan penanggulangan banjir di rt. 28,35, dan 40 kelurahan mayang mangurai</p> <p>5. Realisasi pembuatan jalan lingkungan dan drainase di rt. 43 kelurahan mayang mangurai</p> <p>6. Penambahan perbaikan lpju di tembusan masjid annur di daerah jalan perumahan barcelona</p>
37	SUHERMAN, SE (25)	4,6	HANURA	III	<p>1. pengadaan pemasangan lpju di jalan tembusan rt. 72 sebanyak dua titik kelurahan kenali besar</p> <p>2. pembuatan box culvert ukuran 4 x 8 meter di belakang masjid nurul iman ke jl. adelweis serta pembuatan drainase sepanjang 350 meter di rt. 44 kelurahan kenali besar</p> <p>3. pengecoran dan pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 2.500 meter serta pemasangan lpju sebanyak tujuh titik di rt. 58 kelurahan kenali besar</p> <p>4. pemasangan lampu jalan 25 titik dan pemasangan tiang lampu jalan 22 titik di jl. merak rt. 60 kelurahan kenali besar</p> <p>5. pembuatan drainase, pemasangan lampu jalan 4 titik serta tiang jalan di jalan perumahan lr. kenali jaya kelurahan kenali besar rt. 53</p> <p>6. pembuatan parit jalan perumahan griya kencana asri</p> <p>7. perbaikan jalan lr. sejahtera (bogenvil) sepanjang 100 meter rt. 46 kelurahan kenali besar</p> <p>8. perbaikan jalan lr. damai sepanjang 100 meter rt. 46 kelurahan kenali besar</p> <p>9. perbaikan parit perumahan lotus 30 meter rt. 69 kelurahan kenali besar</p> <p>10. pengerasan/ konblok halaman sd negeri 222</p> <p>11. pemasangan lpju sebanyak 11 titik rt. 69 kelurahan kenali besar</p> <p>12. pemasangan lpju 7 titik di rt. 50 kelurahan kenali besar</p> <p>13. pembangunan posyandu rt. 16 kelurahan kenali besar</p> <p>14. pengaspalan jalan lr. harapan, lr. keluarga dan pemasangan lampu jalan rt. 16 kelurahan kenali besar</p> <p>15. perbaikan jalan lr. sei. bengkal 750 meter menuju masjid serta pembuatan dan perbaikan drainase serta pemasangan pengadaan lpju di rt. 71 kelurahan kenali besar</p> <p>16. pembuatan parit jalan lr. serai serumpun 300 meter di rt. 07 kelurahan kenali besar</p> <p>17. perampungan jl. serai serumpun dan jl. bestika rt. 07 kelurahan kenali besar</p> <p>18. pembuatan drainase lr. basamo 300 meter dan pengadaan pemasangan lpju 3 titik rt.39 kelurahan kenali besar</p> <p>19. pembuatan parit jalan lr. mangga 70 meter di rt. 41 kelurahan kenali besar</p> <p>20. perbaikan drainase perumahan griya kenali jaya 200 meter rt. 59 kelurahan kenali besar</p> <p>21. perbaikan parit depan spbu kenali besar dan depan united traktor rt. 43</p> <p>22. perampungan pengaspalan jalan rt. 66 kelurahan kenali besar sepanjang 500 meter</p> <p>23. perampungan pengaspalan jalan rt. 55 kelurahan kenali besar sepanjang 1.500 meter</p> <p>24. pengaspalan jalan lr. keluarga rt. 01 kelurahan kenali besar 70 meter</p>

					25. pengaspalan jalan lr. gang salam rt. 40 kenali besar 150 meter
38	JASRUL, S.Ag (4)	4,7	GERINDRA	IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan renovasi penambahan pembangunan gedung sekolah paud serta instalasi listrik di rt. 25 kelurahan kenali asam atas</li> <li>2. realisasi usulan proposal yang di teruskan kecamatan ke bappeda sekitar 50 item pengajuan pembangunan infrastruktur jalan dan lpuj belum terealisasi di kelurahan kenali asam atas</li> <li>3. pemasangan jaringan instalasi gas city di kelurahan kenali asam atas</li> <li>4. bantuan untuk mengoptimalkan pelayanan pdam di kelurahan kenali asam atas</li> </ol>
39	H.MUSTAMAR, SE (16)	4,8	DEMOKRAT	II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan gorong-gorong di dekat masjid rt. 08 kelurahan bagan pete</li> <li>2. pengawasan terhadap ruko-ruko yang tidak membuat parit-parit di rt. 08 kelurahan bagan pete</li> <li>3. penambahan pemasangan tiang listrik di rt.28 kelurahan mayang mangurai</li> <li>4. perampungan pembuatan jalan sepanjang 50 meter yang semula berasal dari program pnpdm di lr. sultan thaha rt. 31 kelurahan bagan pete</li> <li>5. pengaspalan jl. politeknik rt. 04 kelurahan bagan pete</li> <li>6. perampungan jalan dari program bangkit berdaya sepanjang 1.350 meter baru terealisasi 50 meter di lr. sepatat depan madrasah dan tpu di rt. 04 kelurahan bagan pete</li> <li>7. penggantian tiang listrik kayu menjadi beton di rt. 19 kelurahan bagan pete</li> <li>8. penambahan pembangunan ruangan kelas belajar di sd negeri 211</li> <li>9. pengadaan pemasangan lpuj di perumahan cipta pesona rt. 05 sekitar 6 titik</li> <li>10. penggantian tiang listrik kayu menjadi beton kurang lebih 200 tiang di rt. 23 dan realisasi usulan 3 paket jalan pada tahun 2015</li> <li>11. pemasangan lpuj dan pembuatan jalan menuju mts di rt. 23 kelurahan bagan pete</li> <li>12. himbauan dan pengawasan terhadap pengembang perumahan agar menyediakan fasilitas umum (tpu)</li> <li>13. perampungan realisasi pengaspalan jalan lr. melati sepanjang 800 meter rt. 21 kelurahan bagan pete dan pengadaan pemasangan tiang listrik</li> <li>14. pemasangan instalasi jaringan gas rumah tangga di kelurahan bagan pete</li> <li>15. pemasangan instalasi pdam di rt. 05 kelurahan bagan pete</li> <li>16. pemasangan lpuj di lr. komando jl. paribakti rt. 09 bagan pete</li> </ol>
40	FRON PURBA, SE (10)	4,9	GERINDRA	III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemasangan lpuj di simpang iv perumahan permata biru sebanyak 3 titik bagan pete</li> <li>2. penertiban dan pendataan perumahan yang tidak memiliki pajak bumi dan bangunan bagan pete</li> <li>3. penataan jaringan listrik di rt. 18 bagan pete</li> <li>4. perbaikan jalan lingkungan dan saluran air di rt. 18 bagan pete</li> <li>5. perbaikan penataan kabel listrik dan penambahan pemasangan tiang listrik di ujung jalan lr. melati 1 dan 2 rt. 18 bagan pete</li> <li>6. perbaikan parit jalan poros rt. 32 bagan pete</li> <li>7. perbaikan jalan menuju perumahan pinang merah dan permata biru di 3 titik kelurahan bagan pete</li> <li>8. pemasangan tiang listrik dan lampu jalan di jl. mawar 4 bagan pete</li> <li>9. pembuatan dan pembenahan tempat sampah di rt. 18 bagan pete</li> <li>10. air pdam tidak mengalir di rt. 18 sementara biaya beban terus dibayar tiap bulan</li> </ol>
41	H. MUHAMMAD NASIR, (14)	5,1	DEMOKRAT	IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan pengawasan terhadap penduduk keluar dan masuk yang diharapkan dapat membantu ketua rt untuk menelusuri data ketika ada penduduk yang mengajukan persyaratan menikah ataupun pembuatan pasport</li> <li>2. pengawasan terhadap proses pendataan dan pencetakan ktp yang salah orang</li> </ol>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>3. perampungan pagar tempat pemakaman umum kurang lebih 100 meter di rt. 02 kelurahan penyengat rendah</li> <li>4. perbaikan jalan di rt. 01, 17, 02 dan 04 di kelurahan buluran kenali</li> <li>5. pembangunan turap di rt. 01 kelurahan buluran kenali</li> <li>6. pembuatan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah (tps) di rt. 01 kelurahan penyengat rendah</li> <li>7. bantuan mobil container (arm roll) di rt. 12 kelurahan penyengat rendah</li> <li>8. penambahan dan pemasangan tiang listrik di rt.08 dan 09 ulugedong kec danau teluk</li> <li>9. perbaikan dan penambahan jalan setapak di rt.08 kel.ulu gedong kec.danau teluk</li> <li>10. pembangunan dan perbaikan pagar tpu kel.ulu gedong</li> <li>11. pembangunan dan perbaikan tpu kel.tanjung pasir</li> <li>12. perbaikan atau rehap jalan setapak rt.04 kel ulu gedog</li> <li>13. pembangunan atau rehap gedung kesenian dan adat kec.danau teluk</li> <li>14. penambahan dan pemasangan tiang listrik serta lampu jalan sebanyak 16 tiang di rt. 12 kelurahan penyengat rendah Ir. kenidai</li> </ul>
42	Ir. M.A. FAUZI (8)	5,2	PDI - PERJUANGAN	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan jalan di rt. 15 kelurahan sungai putri</li> <li>2. perbaikan drainase dan parit jalan yang patah di rt. 16 kelurahan sungai putri</li> <li>3. perbaikan drainase di rt. 20 kelurahan sungai putri</li> <li>4. perbaikan jalan di Ir.purnawira rt. 21 kelurahan sungai putri</li> <li>5. pengaspalan sepanjang 200 meter dan perbaikan irigasi di rt. 21 kelurahan sungai putri</li> <li>6. realisasi pengaspalan jalan di rt. 22 kelurahan sungai putri</li> <li>7. pengawasan pendistribusian gas bersubsidi 3 kg di kelurahan sungai putri</li> <li>8. pengawasan penyaluran bantuan rastra di kelurahan sungai putri</li> </ul>
43	BAMBANG GUNAWAN, (12)	5,3	GOLKAR	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pemasangan lpu dan perbaikan drainase di rt. 16 kelurahan simpang iv sipin</li> <li>2. perbaikan jalan lingkungan yang merupakan jalan akses menuju smp negeri 7 serta pengadaan pemasangan lpu di depan masjid rt. 24 kelurahan simpang iv ipin</li> <li>3. penertiban dan pengawasan pabrik pengolahan kayu</li> <li>4. pelebaran jalan rd. p. kolopaking kelurahan simpang iv sipin yang padat dipagi hari karena merupakan akses jalan ke kantor bulog, dinas perpustakaan dan arsip provinsi jambi</li> <li>5. pembangunan jalan lingkungan dan pembuatan tps (tempat pembuangan sampah) untuk empat rt di komp. permata citra iv rt. 18 kelurahan buluran kenali</li> <li>6. perbaikan jalan di rt. 01 kelurahan teluk kenali sepanjang 63 meter</li> <li>7. bantuan untuk ukm berupa tempat penjualan ikan dan buah-buahan serta timbangan</li> <li>8. bantuan modal, bibit dan kerambah ikan serta perlengkapannya</li> <li>9. pelebaran jalan di rt. 22 simpang empat sinjai</li> <li>10. pengawasan penyaluran raskin, kis dan blt yang tidak tepat sasaran di rt. 16 simpang iv sipin</li> <li>11. peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat (bpjs kesehatan)</li> <li>12. bantuan gerobak sampah dan pengawasan pengelolaan sampah di kelurahan teluk kenali</li> </ul>
44	H. CANDRA JOHAN (14)	5,4	PPP	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. perbaikan dan pembuatan drainase di lingkungan rt. 04 kelurahan pematang sulur kurang lebih 600 meter</li> <li>2. pengaspalan jalan lingkungan di rt. 04 kelurahan pematang sulur jl. pelangi 1,2 dan 3 kurang lebih 800 meter</li> <li>3. perbaikan jalan di jl. a.thalib dari jl. yulius usman menuju lapangan golf dan kantor pu provinsi rt. 23 kelurahan pematang sulur</li> <li>4. normalisasi perbaikan saluran air dari jl. yulius usman melintasi kompleks kehutanan golf 1 dan golf 3 berakhir disamping</li> </ul>

					<p>lapangan golf</p> <p>5. renovasi box culvert di samping lapangan golf agar ditinggikan dan diperbesar</p> <p>6. pengaspalan jl. depan masjid a. rahman di jl. yulius usman rt. 23 kelurahan pematang sulur</p> <p>7. pengaspalan jalan alternatif dari jl. yulius usman (depan kompleks guru) menuju jl. patimura (depan rcti)</p> <p>8. pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan dan pembuatan drainase di rt. 21 kelurahan pematang sulur</p> <p>9. pengaspalan jalan lingkungan di jl. pakis 2 rt. 06 kelurahan pematang sulur sepanjang 250 meter</p> <p>10. pengaspalan jl. bunga raya rt. 06 kelurahan pematang sulur sepanjang 300 meter</p> <p>11. pembuatan turap di tanah pemakaman umum pematang sulur rt. 17</p> <p>12. penambahan jam pelajaran agama islam di setiap sekolah negeri</p> <p>11. penambahan sekolah madrasah negeri</p> <p>12. pengadaan pelatihan -pelatihan untuk ketenaga kerjaan yang bekerja sama dengan blk provinsi jambi untuk masyarakat kota jambi</p> <p>13. pembuatan bak sampah untuk warga rt. 18 kelurahan pematang sulur</p> <p>14. penambahan lampu jalan di sepanjang jl. departi purbo dan lingkungan rt. 18 kelurahan pematang sulur</p>
45	RS. PRAYOGIE, S. KOM (6)	5,5	DEMOKRAT	IV	<p>1. pembangunan jalan sentosa perumahan villa sentosa kel. talang bakung rt 33</p> <p>2. realisasi pemasangan pdam di rt. 17 kelurahan pematang sulur</p> <p>3. pengawasan pelayanan sarana kesehatan di puskesmas pembantu yang dijadikan puskesmas induk</p> <p>4. perbaikan jalan di lorong - lorong rt. 18 kelurahan pematang sulur</p> <p>5. pembangunan drainase di rt. 19 kelurahan pematang sulur yang merupakan jalan akses menuju masjid nurul ikhlas</p> <p>6. perbaikan drainase di dekat lapangan golf arah menuju ke kantor kpu</p>
46	UMAR FARUK, A.Md (3)	5,6	GERINDRA	II	<p>1. perbaikan jalan di daerah pertanian kelurahan olak kemang rt.09,10 dan 12 yang terhubung dengan jl. puting</p> <p>2. pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan lampu jalan di rt. 09 kelurahan olak kemang sebanyak satu titik</p> <p>3. perbaikan dan penambahan jalan setapak di rt.09 ulu gedong</p>
47	SONY ZAINUL H, SH (4)	5,7	HANURA	I	<p>1. pembuatan tempat pembuangan sampah permanen di rt. 03 kelurahan selamat</p> <p>2. perbaikan drainase di rt. 03 kelurahan selamat</p> <p>3. kenaikan honor ketua rt</p> <p>4. perbaikan jalan lorong di rt. 02 kelurahan selamat</p>
48	SULAIMAN SYAWAL, S. (8)	5,8	PKB	II	<p>1. realisasi pembangunan jalan ke masjid nuruddin rt. 24 kelurahan legok</p> <p>2. pembuatan sarana olahraga berupa sarpras di rt. 24 kelurahan legok</p> <p>3. perbaikan jalan dan pembuatan drainase di sekitar masjid rt. 01 kelurahan pematang sulur</p> <p>4. bantuan pinjaman kendaraan gerobak roda tiga untuk pengangkutan sampah di komp. telanai indah rt. 07 kelurahan pematang sulur</p> <p>5. bantuan renovasi sarana olahraga lapangan tenis di komp. telanai indah rt. 07 kelurahan pematang sulur</p> <p>6. pembuatan tempat sampah di setiap rt kelurahan pematang sulur</p> <p>7. pembuatan pangkalan gas bersubsidi 3 kg di rt. 01 kelurahan penyengat rendah</p> <p>8. perampungan pembangunan lanjutan pagar tempat pemakaman umum (tpu) hidayatullah rt. 01 kelurahan penyengat rendah</p>
49	ACHMAD RASYID (3)	5,9	PAN	IV	<p>1. penambahan dan pendataan kembali penerima rastra dan bansos khususnya di kelurahan legok</p> <p>2. pengawasan pendistribusian gas bersubsidi 3 kg kelurahan legok</p> <p>3. realisasi penerapan sekolah gratis</p>

#### 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2020 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

**Tabel 4.2.4**  
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih dan air limbah
		Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik
		Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan
		Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur
		Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
		Meningkatkan manajemen pengendalian dan pengelolaan persampahan
		Meningkatkan perlindungan, pengendalian dan pengawasan lingkungan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
		Meningkatkan sarana prasarana kesehatan Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN
		Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif
		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		Mengembangkan pola pembiayaan pendidikan
		Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
		Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
		Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga

		Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan
		Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
		Meningkatkan pemenuhan hak anak
		Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan
	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan manajemen tataniaga
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga
		Menjaga stabilitas Ketahanan Pangan
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif
		Penguatan Kelembagaan Koperasi
		Meningkatkan Pola Pangan Harapan
		Meningkatkan pendapatan riil per kapita masyarakat
		Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS
		Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS
	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan kepastian hukum dan kenyamanan bermasyarakat
		Meningkatkan aksesibilitas, atraksi dan amenitas serta promosi kepariwisataan
		Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan MICE ( <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> )
		Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
		Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk lokal
		Meningkatkan pengetahuan terhadap Budaya Daerah
		Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**TABEL 4.3.**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**  
**DAN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN</b>											
<b>PERKIM</b>											
1	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan</b>	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		83%			87%				
1	Kegiatan Penyelenggaraan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan sektor Kawasan Permukiman	Kota Jambi	4			9				
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Kota Jambi	2010	3.918.000.000		3310	3.819.000.000			
		Persentase Kawasan Permukiman yang dilakukan Pembinaan	Kota Jambi	125,01			152,47				

			Persentase Luasan permukiman Kumuh dikawasan perkotaan	Kota Jambi	72,49			112,63				
2	<b>Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan</b>		Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR									
	1	Kegiatan Penyelenggaraan, Penyediaan dan Penataan Perumahan	Perentase Jumlah Dokumen Perencanaan sektor Perumahan	Kota Jambi	8	3.500.0 NJU00.000		14	35.220.000.000			
			Perentase Jumlah MBR yang memiliki Rumah	Kota Jambi	4500			7700				
			Persentase Tingkat Hunian Rusunawa	Kota Jambi	1			2				
			Persentase Jumlah PSU Perumahan yang dilakukan Penanganan	Kota Jambi	25			35				
			Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan ke PEMDA	Kota Jambi	40			50				
			Jumlah Perumahan yang dibina dan diawasi	Kota Jambi	2,5			3,5				
3	<b>Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum</b>		Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum									
	1	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Penerangan Jalan Umum	Persentase Pemenuhan Penerangan Jalan Umum	Kota Jambi	40,26	21.000.000.00 0		75,61	30.000.000.000			
			Persentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik	Kota Jambi	1000			1500				
	2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemakaman dan Penataan TPU	Jumlah Makam yang dikelola dan ditata	Kota Jambi	22	2.000.000.000		34	3.000.000.000			
		<b>PU</b>										

<b>1</b>	<b>Program Fasilitas, Koordinasi Pembinaan dan Keterpaduan Tata Ruang</b>		Rasio Kesesuaian Ruang		95.2%			95.5%			
	1	Penataan Ruang Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang	Kota Jambi	1	2.000.000.000		2	1.000.000.000		
	2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap tata ruang	Kota Jambi	84,00	1.500.000.000		86,00	792.060.000		
<b>2</b>	<b>Program Perencanaan Teknis ke PU-an</b>		Rasio dokumen Perencanaan yang diimplementasikan		85%			90%			
	1	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Ke-PU an	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Jambi	43	6.142.257.000		46	6.564.000.000		
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan capaian kinerja ke Pu	Kota Jambi	4	80.000.000		4	84.000.000		
	3	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga ahli/terampil dan asosiasi yang bersertifikat	Kota Jambi	120	600.000.000		120	630.000.000		
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai</b>		Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik		15,79%			47,37%			
	1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase/Sungai dan Pengendalian Banjir	Jumlah sistem drainase/sungai yang ditangani	Kota Jambi	14,75	25.000.000.000		22,62	37.950.000.000		
			Jumlah dari pembebasan Lahan dan Perbaikan Saluran drainase	Kota Jambi				9,00	17.700.000.000		
			Jumlah Kolam Rentensi Mengurangi titik banjir dan Pembelian Lahan/1 Titik (2 Ha)	Kota Jambi				7,00	14.000.000.000		

4	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan		Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum		68,39%			69,39%			
			Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah		1,56%			2,16%			
			Rasio Bangunan dalam kondisi baik		61,46%			69,54%			
1	Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/air Minum	Jumlah SR Air Minum	Kota Jambi	80,151	3.072.244.000			81,717	3.225.856.200		
2	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Pemukiman Penduduk	Jumlah SR Air Limbah	Kota Jambi	1253	21.027.756.000			4253	24.732.120.000		
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung/Utilitas Pemerintah	Jumlah unit pemeliharaan dan pembangunan	Kota Jambi	46	54.000.000.000			46	84.000.000.000		
		-Pembangunan Gedung Parkir			35.000.000.000						
		-Penataan Pedestrian dan box utilitas			25.000.000.000						
		-Terminal Rawasari			15.000.000.000						
		-RSUD HAS			30.000.000.000						
		-Gedung Serba Guna			35.000.000.000						
		-Sport Centre Kota Jambi			80.000.000.000						
		-Kawasan Ecowisata Danau Sipin			50.000.000.000						
		-Pengembangan Hutan Kota Sabki			25.000.000.000						

					0						
		-Peremejaan Pipa PDAM			50.000.000.00 0						
		-Pedestrian Trotoar dalam Kota			35.000.000.00 00						
		-Pengembangan Pasar Induk Talang Gulo			10.000.000.00 0						
		-Pembangunan Pasar Alam Barajo			10.000.000.00 0						
	4	Peningkatan Operasional SPAL D	Jumlah Kapasitas Pengolahan lumpur tinja	Kota Jambi	1679	1.900.000.000		2518,5	7.881.076.088		
5		<b>Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik		91.79%			94.53%			
			Ratio jembatan dalam Kondisi Baik		97.3%			97.3%			
	1	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Status Kota	Jumlah km jalan status kota dalam Kondis baik	Kota Jambi	468,56	20.000.000.00 0		482,52	23.268.000.000		
	2	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Non Status Kota (Jalan Lingkungan)	Jumlah Km Jalan lingkungan yang dibangun	Kota Jambi	20	72.000.000.00 0		20	82.815.244.470		
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	Kota Jambi	646	3.000.000.000		646	10.867.053.750		
	4	Peningkatan Operasional Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan	Kota Jambi	100%	500.000.000		100	952.749.000		
		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
1		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Indeks pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		64.84%			64.90%			

1	Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran serta kerusakan lingkungan	Terinventarisasi sumber pencemar air sungai dan danau	Kota Jambi	1 Danau	683.000.000		1 Danau	699.000.000			
		Jumlah pembinaan perusahaan		40			50				
		Terlaksananya uji emisi kendaraan		1500			1500				
		Terinventarisasi lahan kritis									
		Status kerusakan tanah akibat produksi Biomassa					1 Dokumen				
2	Kegiatan Pengujian Kadar Polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah Sampel yang di uji	Kota Jambi	300 sampel	690.000.000		350 sampel	719.000.000			
		Penambahan ruang lingkup parameter pengujian		udara 6 parameter							
		Terakreditasinya parameter					udara 6 parameter				
3	Kegiatan Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah usaha /kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan / SPPL	Kota Jambi	50 dokumen	560.000.000		50 dokumen	576.000.000			
		Jumlah kajian lingkungan hidup		1 kajian RPPLH			1 kajian NSDA				
		Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup		1 dokumen			1 dokumen				
4	Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan	Pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan;	Kota Jambi	100 perusahaan;	143.000.000		100 perusahaan;	144.000.000			
		penanganan kasus pengaduan lingkungan;		100% penanganan kasus			100% penanganan kasus				

2	<b>Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam</b>		Indeks tutupan lahan		37,05%			41,69%			
			Indeks kualitas air		47,14%			50,96%			
			Indeks kualitas udara		91,84%			92,38%			
1	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim	Kota Jambi	4	400.000.000		5	403.000.000			
2	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	Luas taman	Kota Jambi	13,77 ha	9.078.000.000		13,77 ha	9.354.000.000			
		Jumlah sekolah Adiwiyata		30 sekolah			30 sekolah				
3	Kegiatan Pengelolaan Hutan Kota	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Taman Hutan Kota M. Sabki, Bagan Pete dan Hutan rengas	Kota Jambi	3 lokasi, 62.77 ha	1.500.000.000		3 lokasi, 62.77 ha	1.550.000.000			
3	<b>Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah</b>		Persentase Jumlah Sampah yang ditangani		78%		76%				
			Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber		22%		25%				
1	Kegiatan Pengurangan sampah dan peningkatan kinerja bank sampah	Tonase sampah terpilah	Kota Jambi	10 Ton/bulan	3.998.689.775		15 ton/bulan	3.016.124.263			
		Jumlah KK terlayani TPS 3R		7.500 KK			10.000 KK				
		Jumlah peserta sosialisasi pengolahan sampah berbasis peran serta masyarakat		3.500 orang			3.500 orang				
2	Kegiatan Peningkatan kinerja penanganan sampah	Persentase jalan yang terlayani penyapuan	Kota Jambi	72%	14.945.000.00		75%	15.674.750.000			

			Melakukan pengukuran komposisi dan densitas sampah		1 dokumen	0		1 dokumen				
			Tersosialisasinya pemillahan sampah ditingkat sumber		500 orang			500 orang				
	3	Kegiatan Peningkatan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Penanganan limbah B3 pada kegiatan usaha	Kota Jambi	50 usaha	400.000.000		50 usaha	400.000.000			
			Penanganan limbah B3 pada fasilitas usaha		40 fasilitas kesehatan			40 fasilitas kesehatan				
	4	Kegiatan Peningkatan pengelolaan angkutan dan mobilisasi	Volume sampah yang terangkut dan persentase sampah yang tertangani di kota jambi	Kota Jambi	79,78%	15.979.500.000		80,42%	16.905.975.000			
	5	Kegiatan Peningkatan kinerja operasional TPA Talang Gulo	Terbentuknya zona penataan sampah	Kota Jambi	60%	6.093.810.225		100%	6.662.150.737			
			Baku mutu air leacheat/lindi		1 dolumen			1 dolumen				
			Tonase sampah organik terolah menjadi kompos		10 ton/hari			10 ton/hari				
			Pemanfaatan gas methan sebagai energi terbarukan		120 KK			150 KK				
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>												
	1	<b>Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan</b>	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan		74%			84%				
				Cakupan yang terlayani angkutan umum		54.75%			70.19%			
	1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Keselamatan Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kota Jambi	67%	5.000.000.000		77%	7.000.000.000			

			Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik									
	2	Kegiatan Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan yang Melaksanakan Uji Kendaraan	Kota Jambi	80%	2.500.000.000		90%	15.000.000.000			
			Tingkat Ketersediaan Pengembangan PKB Berbasis Teknologi									
			Persentase Layanan Angkutan Darat									
			Persentase Sarana Prasarana Terminal Layak Fungsi									
	3	Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Tersedianya Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Kota Jambi	5	1.600.000.000		5	500.000.000			
2	<b>Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas</b>		Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan		36 Titik			28 Titik				
	1	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Terlaksananya Razia Penertiban Angkutan Umum dan Pengendalian Kelancaran Arus Lalu Lintas	Kota Jambi	95	1.700.000.000		95	600.000.000			
	2	Kegiatan Penegakan Hukum Lalu lintas dan Angkutan dan Angkutan Jalan	Terlaksananya Razia Penertiban Angkutan Umum dan Pengendalian Kelancaran Arus Lalu Lintas	Kota Jambi	40	650.000.000		40	400.000.000			

	3	Kegiatan Sosialisasi dan biumbingan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan	Terlaksananya Razia Penertiban Angkutan Umum dan Pengendalian Kelancaran Arus Lalu Lintas	Kota Jambi	40	200.000.000		40	400.000.000			
<b>6</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Perparkiran</b>		Persentase Pelayanan Perparkiran		80.74%			88.99%				
	1	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Terpungutnya Retribusi Parkir secara Maksimal	Kota Jambi	92%	800.000.000		100%	3.000.000.000			
	2	Kegiatan penertiban dan penataan parkir	Sarana Parkir dan Petugas Semakin Teratur	Kota Jambi	385 titik	450.000.000		415 titik	500.000.000			
	3	Kegiatan Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana parkir	Tersedianya Fasilitas Parkir yang memadai	Kota Jambi	11	1.600.000.000		13	1.500.000.000			
		<b>SATPOL PP</b>										
		<b>Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah</b>	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat		85%			90%				
			Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi		74%			79%				
	1	Kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	meningkatnya Sosialisasi Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	Kota Jambi	Razia Yustisi Skala( Kecil,Sedang,Besar= 87 Kali), Tipiring= 24 Kali, Penyidikan dan	3.000.000.000		Razia Yustisi Skala( Kecil,Sedang,Besar= 87 Kali), Tipiring= 25 Kali, Penyidikan dan Penyelidikan= 85 Kali, Gelar Perkara= 25 Kali	3.076.000.000			

					Penyelidikan= 84 Kali, Gelar Perkara= 24 Kali							
2	Kegiatan Pengaman, Pengawasan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	meningkatnya Pengaman, Pengawasan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	Kota Jambi	Penertiban Skala( Kecil,Sedang,Besar=100 Kali), Pamwalkat=10 Kali, Pamwal=10 kali, Piket Jaga Rumdis=12 Bulan, Pam Hari Besar dan Keagamaan Acara pemda=25 kali, Pam Piket Mako= 12 Kali, Piket Jaga Portal=60 Kali, Pengawasan dan Pembinaan Trantibum Kelurahan dan Kecamatan=40 Kali,Senergisitas Antar Leading	3.221.000.000		Penertiban Skala( Kecil,Sedang,Besar=100 Kali), Pamwalkat=10 Kali, Pamwal=10 kali, Piket Jaga Rumdis=12 Bulan, Pam Hari Besar dan Keagamaan Acara pemda=25 kali, Pam Piket Mako= 12 Kali, Piket Jaga Portal=60 Kali, Pengawasan dan Pembinaan Trantibum Kelurahan dan Kecamatan=40 Kali,Senergisitas Antar Leading Sektor Terhadap Gakda=12 bulan, Operasi Cipta Kondisi Praja Wibawa=12 Kali	3.331.000.000				

					Sektor Terhadap Gakda=12 bulan, Operasi Cipta Kondisi Praja Wibawa=12 Kali							
	<b>Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat</b>		Rasio Petugas perlindungan masyarakat		68%			72%				
	1	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Jambi	Gelar Pasukan Praja Wibawa= 1 Kali, Pembinaan Fisik dan Mental=22 Kali , Was Internal Dan Gak Lin= 22 kali, Picket Jaga	232.000.000		Gelar Pasukan Praja Wibawa= 1 Kali, Pembinaan Fisik dan Mental=22 Kali , Was Internal Dan Gak Lin= 27 kali, Picket Jaga Gar lin= 15 Kali, Korsik=22 Kali	428.281.200			

					Gar lin= 10 Kali, Korsik=11 kali							
	2	Kegiatan Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Meningkatnya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Kota Jambi	Pos Kamling=27 Kali, Pekat=15 Kali, P2WKSS=7 Hari, Pencegahan Konflik Sosial=15 Kali, Rakor Pembentukan Satlinmas=1 Kali, Pembekalan Satlinmas TPS PILGUB=5 Hari	590.000.000		Pos Kamling=27 Kali, Pekat=15 Kali, P2WKSS=7 Hari, Pencegahan Konflik Sosial=15 Kali, Rakor Pembentukan Satlinmas=1 Kali	417.718.800			
		<b>DAMKAR</b>										
		<b>Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan</b>	Cakupan pelayanan kesiagaan dini		100%			100%				
			Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan		100%			100%				
	1	Kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat										

		dan Sosialisasi Penanganan Bencana				446.310.000			448.900.000			
	2	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan kebakaran				71.002.500			72.000.000			
	3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan				3.092.534.200			24.100.000.000			
	4	Kegiatan Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana				51.200.000			52.000.000			
	5	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan				518.316.100			519.000.000			
	6	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				182.025.000			185.000.000			
	7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran				845.806.000			843.000.000			
	8	Kegiatan Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan				185.806.200			190.000.000			
	9	Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Penanggulangan Bencana							154.000.000			
	10	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan				250.000.000			251.000.000			
	11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan				85.000.000			86.100.000			

12	Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Logistik Kebencanaan				128.000.000			86.100.000			
13	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam				26.000.000			27.000.000			
	<b>DUKCAPIL</b>										
	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan		96%			99%				
		cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		86,5%			91 %				
		validitas database kependudukan		89%			91%				
1	Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terpenuhinya penerbitan KTP, KK dan KIA dan dokumen kependudukan lainnya		50.000 Blanko KIA dan sarana Penunjang Pencetakan	928.311.000		25.000 Blanko KIA dan sarana Penunjang Pencetakan	950.000.000			
2	Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Tersedianya dokumen pencatatan sipil		15,000 Akta Catatan Sipil	97.875.000		15,000 Akta Catatan Sipil	107.875.000			
3	Kegiatan Peningkatan Kerjasama pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		37 PKS OPD, 5 Mitra, mesin IKM, publikasi, ATK	185.000.000		5 Mitra, mesin IKM, publikasi, ATK	185.000.000			
4	Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	terlaksananya pemutakhiran data kependudukan		11 Kecamatan	750.000.000		-	-			
5	Kegiatan Sosialisasi administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan.		11 Kecamatan	275.000.000		11 Kecamatan	285.000.000			

6	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Operator SIAK yang mengikuti Pelatihan SIAK	40 Orang	80.000.000	40 Orang	85.000.000				
7	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil	Form Adminduk, Sosialisasi, Pemeilharaan Sistem, Buku Agregat, dan Publikasi serta Honorarium Tim	1.510.814.000	Form Adminduk, Sosialisasi, Pemeilharaan Sistem, Buku Agregat, dan Publikasi serta Honorarium Tim	50.000.000				
<b>KOMINFO</b>										
<b>Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik</b>		Persentase Peningkatan ekosistem TIK	45%		60%					
		Cakupan akses dan kualitas informasi publik	60%		70%					
1	Kegiatan Pengelolaan aplikasi informatika	rasio jumlah OPD yang tercakup jaringan TIK	80,64%	4.831.156.000	90,32%	7.000.000.000				
		persentase peningkatan data center	50%		70%					
		persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi	19%		32%					
		persentase layanan manajemen data dan informasi pemerintah daerah	15%		25%					
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	rasio tindak lanjut pengaduan publik	35%	1.071.500.000	70%	1.300.000.000					
	rasio jumlah PPID perangkat daerah yang sesuai regulasi	75%		85%						

	2		rasio jumlah informasi publik		60%			75%			
			rasio jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)		20%			35%			
			rasio jumlah website perangkat daerah		60%			75%			
			rasio penyelesaian sengketa informasi publik		50%			75%			
			rasio jumlah monitoring opini dan aspirasi publik		1			2			
			rasio jumlah kebijakan teknis pengelolaan informasi publik		5			7			
	3	Kegiatan Tata kelola teknologi informatika dan komunikasi	rasio jumlah nama domain dan sub domain		100%	400.000.000		100%	950.000.000		
			rasio jumlah regulasi dan kebijakan dan monev dibidang nama domain, sub domain, website dan konten		100%			100%			
			Penyelenggaraan Government Chief Information Officer		n/a			ada			
			Rasio peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis TIK		40%			50%			

			Rasio jumlah regulasi, kebijakan, dan monev penyelenggaraan e-government		15%			20%				
			jumlah promosi dan sosialisasi layanan public berbasis elektronik		1 kali			4 kali				
			persentase layanan sistem komunikasi intra pemerintah		60%			80%				
		<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	Rasio jumlah informasi milik pemerintah yang diamankan		35%			50%				
	1	Kegiatan Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi		35%	400.000.000		50%	460.000.000			
			jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan		7 kali			10 kali				
			persentase insiden keamanan informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan		60%			75%				
			jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi		60%			70%				

			jumlah sistem elektronik yang disertifikasi keamanannya sesuai peraturan perundang-undangan		15%			20%				
			jumlah laporan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan informasi		5			7				
	<b>Program Manajemen Data / Informasi / Statistik Daerah</b>		Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah		20%			39%				
	1	Kegiatan Pengkoordinasian pelaksanaan survey, verifikasi, kompilasi, dan diseminasi data statistik	Tersedianya data/ informasi/ statistik daerah (Buku Kota Jambi dalam Angka, Buku PDRB, Buku Inflasi)		20%	125.000.000		39%	150.000.000			
	<b>PTSP</b>											
	<b>Program : Peningkatan Realisasi Investasi</b>		Realisasi Investasi		430.5 M			474.62 M				
	1	Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan		1 Tahun	270.000.000		1 tahun	277.000.000			
	2	Kegiatan Penyusunan Rencana Penanaman Modal Daerah	Tersedianya Peraturan Tentang Rencana Penanaman Modal Daerah		Dokumen	70.000.000		Dokumen	75.000.000			
	3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kali/Perusahaan	65.000.000		Kali/Perusahaan	70.000.000			

4	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan secara Elektronik	1 Tahun	273.000.000	1 Tahun	276.000.000				
<b>Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,75 %		86,85 %					
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan Bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial		1 Tahun	270.000.000	1 tahun	225.000.000				
2	Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan dan lingkungan		1 Tahun	270.000.000	1 Tahun	323.000.000				
3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penataan Arsip Perizinan		1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	55.000.000				
4	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan		1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	213.000.000				
<b>PERPUSTAKAAN</b>										
<b>Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>		Jumlah arsip yang terselamatkan	1200		1200					
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	36		36					
1	Kegiatan Akuisisi, Pengolahan dan	Jumlah Perwal tentang			5					

	Layanan Kearsipan Kota Jambi	Pengolahan Arsip		4	664.150.000			642.000.000			
		Jumlah Seminar Storyline Sejarah		1			1				
		Jumlah Arsip yang diolah		1.200			1.200				
		Jumlah Arsip yang Terakuisisi pada LKD		1			2				
		Jumlah Preservasi Arsip Statis pada LKD					1				
		Jumlah Dokumen SOP Layanan Kearsipan pada LKD					1				
		Jumlah Pegawai LKD yang diikutkan Inhouse Training oleh tim ANRI		30			1				
		Jumlah OPD yang Mendapat Pendampingan teknis implementasi SIKD		1			1				
		Jumlah OPD yang dievaluasi pelaksanaan SIKD		1			1				
		penyusunan naskah sumber									
		penerbitan naskah sumber									
		fumigasi									
		alih media arsip		1			1				
		pameran arsip					1				
		kontens diorama kearsipan									

			pemusnahan		1							
			Pendataan Arsip Vital					1				
			Jumlah Asistensi Pembinaan OPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan									
			Jumlah Asistensi Pembinaan Ormas/Orpol, Perusahaan		22			22				
			Jumlah OPD, Bagian dan Kelurahan yang Mendapat Audit dan Monitoring Kearsipan		19			19				
			Pendataan Ormas/Orpol dan Perusahaan		20			14				
			Gerakan Nasional Sadar Arsip		10			15				
			Coaching Clinic Pra Lomba Kearsipan Internal bagi OPD			582.850.000		60	395.206.419			
			Workshop Penyusutan Arsip		60			60				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kearsipan		60			60				
			Coaching Clinic Dasar-dasar Kearsipan Bagi OPD		60			60				
			Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi OPD					60				

			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Aktif Bagi OPD				60				
			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip In Aktif Bagi OPD				60				
			Workshop Pengelolaan Arsip Vital Bagi OPD				60				
			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi OPD		60		60				
			Coaching Clinic Pemberkasan Arsip Bagi OPD				60				
			Coaching Clinic Dasar-dasar Kearsipan Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				
			Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan		60		60				
			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Aktif Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				
			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip In Aktif Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				
			Workshop Pengelolaan Arsip Vital Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				
			Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				

			Coaching Clinic Pemberkasan Arsip Bagi Ormas/ Orpol dan Perusahaan				60				
			Lomba Kearsipan Untuk Tingkat OPD dan Pengelola Kearsipan				60				
			Lomba Kearsipan Untuk Tingkat Kelurahan dan Pengelola Kearsipan				1				
			Lomba Kearsipan Untuk Tingkat SD, SMP dan Pengelola Kearsipan								
	<b>Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan</b>		Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Tahunan		37.836 Pengunjung		42.836 Pengunjung				
	<b>1</b>	Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Bertambahnya Jumlah Buku karya cetak		500	745.234.600	500	761.100.000			
			Bertambahnya Jumlah e-book		110		115				
			Jumlah Pengunjung		40.336		45.336				
			Jumlah transaksi peminjaman		3.553		4.452				
			Jumlah Bahan Pustaka yang dilestarikan		100		100				
	<b>2</b>	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Perpustakaan,	Sosialisasi Kepada Tenaga Pengelola Perpustakaan		40	323.765.400	40	339.900.000			

		Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca	Kerjasama antar Perpustakaan dan Pihak Ketiga/Stake Holder		3			3			
			Expose Perpustakaan		5			5			
			Pendataan Perpustakaan/pojok baca		76			37			
			Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan/ pojok baca		59			76			
		<b>INSPEKTORAT</b>									
1		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh</b>	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH		100%			100%			
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal Secara Berkala Sesuai PKPT		461 Laporan	1.500.000.000		461 Laporan	1.515.000 .000		
	2	Kegiatan Penanganan kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat		25 Kasus	250.000.000		25 Kasus	265.000.000		
	3	Kegiatan Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LKJ dan Review LKPD secara Tepat Waktu		83 Laporan	225.000.000		83 Laporan	230.000.000		
	4	Kegiatan Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	- Terselenggaranya FGD SPIP di OPD; - Terselenggaranya kegiatan pengawasan pungli		16 Laporan	240.000.000		16 Laporan	247.500.000		

5	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	230 Temuan	399.250.000	240 Temuan	405.000.000			
6	Kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya Evaluasi PMPRB; - Terselenggaranya Survey Penilaian Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi; - jumlah Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Zona Integritas (ZI) dan Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	- 1 kali - 1 kali - 0 PD	291.500.000	- 1 kali - 1 kali - 0 PD	330.050.000			
<b>BAPPEDA</b>									
<b>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>		Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%		100%				
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPd, KUA PPAS)	Tersedianya RKPd Kota Jambi, RPJMD 2018-2023 serta KUA dan PPAS	6 dokumen	2.150.500.000	6 dokumen	2.300.000			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, laporan Pertanggungjawaban	4 dokumen	434.950.000	4 dokumen	450.000			

			Walikota (LKPJ), Kumpulan Pidato									
		Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Ekonomi dan SDA		10 urusan	434.950.000		10 urusan	500.000			
			Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA		5 dokumen			5 dokumen				
		Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Sosbud dan Pemerintahan		10 urusan	321.000.000		10 urusan	350.000			
			Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan		3 dokumen			3 dokumen				

		Perencanaan Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		15 urusan			15 urusan				
						379.540.000			400.000			
			Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		3 dokumen			3 dokumen				
		Perencanaan Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		10 urusan			10 urusan				
						559.900.000			600.000			
			Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		3 dokumen			3 dokumen				
		<b>Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah</b>	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan		100%			100%				

		Koordinasi, Penelitian dan Pengembangan			200.000.000			300.000.000			
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan		35 OPD			37 OPD			
			Pelaksanaan kemampuan OPD dalam hal penatausahaan penerimaan dan pengeluaran belanja		80%			85%			
			Jumlah OPD yang menyampaikan laoran data barang milik daerah yang akurat dan tepat waktu		20 OPD			30 OPD			
			Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK		40 OPD dan 11 BLUD			40 OPD dan 21 BLUD			
	1	Kegiatan Penyusunan analisis standar belanja dan standar harga satuan regional				281.912.500					
	2	Kegiatan Penyusunan Ranperda dan Ranperkada APBD				217802000					
	3	Kegiatan Penyusunan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD				242571500					
	4	Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah				88301750					

5	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah				310800000						
6	Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian pengeluaran keuangan daerah				170000000						
7	Kegiatan Operasional majelis pertimbangan TGR				127750000						
8	Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Bendahara				226520000						
9	Kegiatan Pegelolaan Perbendaharaan dan kas Umum daerah				87250000						
10	Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah				509092250						
11	Kegiatan Pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah				300000000						
12	Kegiatan Pengamanan barang milik daerah				250000000						
13	Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				210000000						
14	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan				150000000						
15	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD				350000000						
16	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja				100000000						

		SKPD										
		<b>Kecamatan Danau Teluk</b>										
		<b>Program Pelayanan Umum Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	61.300.800		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	31.250.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	77.620.000		12 bulan				
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Fasilitasi Bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	25.600.000		12 bulan				
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Olak Kemang	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Olak Kemang			282.046.600						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Panjang	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Pasir Panjang			250.650.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana	Jumlah saran dan prasarana			270.063.000						

		dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pasir	yang difasilitasi di Kelurahan Tanjung Pasir									
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Raden	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tanjung Raden			293.996.600						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ulu Gedong	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Ulu Gedong			295.096.600						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan											
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Olak Kemang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Olak Kemang			287.663.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pasir Panjang			381.662.000						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Pasir			415.240.200						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Raden	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Raden			279.313.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ulu Gedong	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan			393.295.000						

			Ulu Gedong									
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Olak Kemang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pasir Panjang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tanjung Pasir	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tanjung Raden	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Ulu Gedong	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan				734.697.400						
		Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan				333.545.000						
		Kecamatan Jambi Selatan										
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	119.550.800		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	9.750.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan	Terlaksananya gotong		12 bulan	55.500.000		12 bulan				

			royong dan pembelian alat-alat kebersihan									
		Kegiatan Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksanannya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	92.150.000		12 bulan				
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kecamatan				375.345.000						
		Kegiatan Koordinasi dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan				22.550.000						
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Pasir Putih			293.840.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambak Sari	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tambak Sari			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Thehok	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Thehok			342.500.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuan Baru	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Pakuan Baru			348.458.000						

		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wijaya Pura	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Wijaya Pura			303.580.000						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pasir Putih			605.891.200						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sari	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tambak Sari			416.233.000						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Thehok	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Thehok			712.576.000						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuan Baru	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pakuan Baru			575.218.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wijaya Pura	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Wijaya Pura			449.549.200						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pasir Putih	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tambak Sari	Terciptanya infrastruktur			200.000.000						

			yang memadai								
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Thehok	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000					
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pakuan Baru	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000					
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Wijaya Pura	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000					
		<b>Kecamatan KotaBaru</b>									
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%			
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	73.550.000		1 tahun			
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	66.295.000		1 tahun			
		Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	58.100.000		12 bulan			
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Fasilitas Bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	72.812.500		12 bulan			
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%			
		Kegiatan Pemberdayaan				391.950.000					

		Kemasyarakatan Kecamatan										
		Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan			276.146.140							
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	50%				60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukakarya	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Sukakarya		299.000.000							
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang III Sipin	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Simpang III Sipin		299.000.000							
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paal Lima	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Paal Lima		299.000.000							
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenali Asam Bawah	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Kenali Asam Bawah		299.000.000							
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenali Asam Atas	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Kenali Asam Atas		299.000.000							
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%				80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Sukakarya		496.687.600							
		Kegiatan Pemberdayaan	Persentase keterlibatan		753.988.400							

	Masyarakat Kelurahan Simpang III Sipin	masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Simpang III Sipin									
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Lima	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Paal Lima			709.900.200						
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenali Asam Bawah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Kenali Asam Bawah			950.099.600						
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenali Asam Atas	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Kenali Asam Atas			587.210.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Sukakarya	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Simpang III Sipin	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Paal Lima	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kenali Asam Bawah	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kenali Asam Atas	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
	<b>Kecamatan Pasar</b>										
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%				89%			

		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1 tahun	117.600.000		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB	1 tahun	75.225.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan	12 bulan	68.650.000		12 bulan				
		Kegiatan Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini	12 bulan	63.100.000		12 bulan				
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kecamatan			425.005.400						
		Kegiatan Koordinasi dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			293.450.000						
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Beringin		296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Orang Kayo Hitam		296.200.000						

		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Pasar Jambi			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Asam	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Sungai Asam			296.200.000						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beringin	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Beringin			371.931.440						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Orang Kayo Hitam	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Orang Kayo Hitam			265.340.880						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Jambi	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pasar Jambi			219.290.480						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Asam	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Sungai Asam			459.021.840						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Beringin	Terciptanya infrastruktur yang memadai			35.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Orang Kayo Hitam	Terciptanya infrastruktur yang memadai			49.000.000						

	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pasar Jambi	Terciptanya infrastruktur yang memadai			5.000.000						
	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Asam	Terciptanya infrastruktur yang memadai			50.000.000						
	<b>Kecamatan Pelayangan</b>										
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	70.770.000		1 tahun				
	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	12.900.000		1 tahun				
	Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	117.075.000		12 bulan				
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Fasilitasi Bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	10.000.000		12 bulan				
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
	Kegiatan Koordinasi dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan				605.995.000						
	Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan				226.125.000						

	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tengah	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tengah			296.200.000						
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelmu	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Jelmu			296.200.000						
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudung Laut	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Mudung Laut			296.200.000						
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arab Melayu	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Arab Melayu			296.200.000						
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahtul Yaman	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tahtul Yaman			296.200.000						
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tanjung Johor			296.200.000						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tengah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tengah			382.894.800						
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelmu	Persentase keterlibatan			337.944.800						

			masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Jelm									
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mudung Laut	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Mudung Laut			242.011.200						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Arab Melayu			254.481.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahtul Yaman	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tahtul Yaman			400.544.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Johor	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Johor			346.222.400						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tengah	Terciptanya infrastruktur yang memadai			156.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Jelm	Terciptanya infrastruktur yang memadai			117.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Mudung Laut	Terciptanya infrastruktur yang memadai			39.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Arab Melayu	Terciptanya infrastruktur yang memadai			52.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tahtul Yaman	Terciptanya infrastruktur yang memadai			158.000.000						

	Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tanjung Johor	Terciptanya infrastruktur yang memadai			78.000.000						
	<b>Kecamatan Alam Barajo</b>										
	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
	Kegiatan Peningkatan kaulitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	100.000.000		1 tahun				
	Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Pemerintah umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	60.000.000		1 tahun				
	Kegiatan Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	80.000.000		12 bulan				
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	100.000.000		12 bulan				
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
	Kegiatan Pemeberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan				702.345.700						
	Kegiatan Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan				330.172.000						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan		50%			60%				

		yang diakomodir									
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Beliung	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Beliung			295.200.000					
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mayang Mangurai	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Mayang Mangurai			295.200.000					
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bagan Pete	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Bagan Pete			295.200.000					
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kenali Besar	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Kenali Besar			295.200.000					
		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rawasari	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Rawasari			295.200.000					
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%			
		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Beliung	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Beliung			404.206.300					
		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Mayang Mangurai	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Mayang Mangurai			761.599.100					
		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bagan Pete	Persentase keterlibatan masyarakat dalam			647.855.100					

			pembangunan di kelurahan Bagan Pete									
		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kenali Besar	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Kenali Besar			990.148.700						
		Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Rawasari	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Rawasari			548.812.300						
		Kegiatan Bangkit Berdaya kelurahan Beliang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya kelurahan Mayang Mangurai	Terciptanya infrastruktur yang memadai			250.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya kelurahan Bagan Pete	Terciptanya infrastruktur yang memadai			250.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya kelurahan Kenali Besar	Terciptanya infrastruktur yang memadai			250.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya kelurahan Rawasari	Terciptanya infrastruktur yang memadai			150.000.000						
		<b>Kecamatan Danau Sipin</b>										
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Penigkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	64.688.000		1 tahun				

		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	62.200.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	85.570.000		12 bulan				
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan fasilitasi Bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	69.830.000		12 bulan				
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan				540.700.000						
		Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan				349.823.642						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Putri	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Sungai Putri			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Murni	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Murni			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Legok	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan			296.200.000						

			Legok									
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selamat	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Selamat			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Solok Sipin	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Solok Sipin			296.200.000						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Putri	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Sungai Putri			487.392.200						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Murni	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Murni			414.669.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Legok	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Legok			706.918.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selamat	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Selamat			534.135.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Solok Sipin	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan			561.993.800						

			Solok Sipin									
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Putri	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Murni	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Legok	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Selamat	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Solok Sipin	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		<b>Kecamatan Paal Merah</b>										
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan			33.900.000						
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB			23.800.000						
		Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan			35.366.000						
		Kegiatan Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum			75.922.2000						

			kewaspadaan dini									
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kecamatan				1.115.910.000						
		Kegiatan Koordinasi dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan				212.260.000						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Bakung	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Talang Bakung			218.250.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Eka Jaya	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Eka Jaya			299.000.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payo Selincah	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Payo Selincah			299.000.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paal Merah	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Paal Merah			295.000.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lingkar Selatan	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Lingkar Selatan			315.200.000						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Persentase kelompok masyarakat yang dibina		75%			80%				

			ditingkat kecamatan									
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Bakung	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talang Bakung			840.250.400						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Eka Jaya	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Eka Jaya			674.200.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Payo Selincah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Payo Selincah			947.070.800						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Merah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Paal Merah			840.000.000						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Lingkar Selatan			586.641.200						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Talang Bakung	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Eka Jaya	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Payo Selincah	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						

		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Paal Merah	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Lingkar Selatan	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kecamatan Telanaipura										
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	13.575.000		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	3.000.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	16.500.000		12 bulan				
		Kegiatan Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	5.500.000		12 bulan				
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kecamatan				370.350.000						

		Kegiatan Koordinasi dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan			151.850.000							
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telanaipura	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Telanaipura			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang IV Sipin	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Simpang IV Sipin			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Kenali	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Teluk Kenali			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buluran Kenali	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Buluran Kenali			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Penyengat Rendah			296.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pematang Sulur	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Pematang Sulur			296.200.000						
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan											
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Telanaipura	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Telanaipura			446.615.520						

		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang IV Sipin	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Simpang IV Sipin			783.948.480						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Teluk Kenali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Teluk Kenali			404.915.520						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Buluran Kenali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Buluran Kenali			521.563.920						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penyengat Rendah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Penyengat Rendah			691.600.080						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Sulur	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Pematang Sulur			604.951.680						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Telanaipura	Terciptanya infrastruktur yang memadai			192.00.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Simpang IV Sipin	Terciptanya infrastruktur yang memadai			196.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Teluk Kenali	Terciptanya infrastruktur yang memadai			90.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Buluran Kenali	Terciptanya infrastruktur yang memadai			133.000.000						

		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Penyengat Rendah	Terciptanya infrastruktur yang memadai		190.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Pematang Sujur	Terciptanya infrastruktur yang memadai								
		Kecamatan Jelutung									
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1 tahun	63.100.000		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB	1 tahun	34.390.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan	12 bulan	266.110.400		12 bulan				
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Fasilitasi Bencana	Terlaksananya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini	12 bulan	63.475.000		12 bulan				
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan		1 tahun	528.155.000		1 tahun				

		Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		1 tahun	291.850.000		1 tahun				
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cempaka Putih	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan cempaka putih	20%	230.864.500		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handil Jaya	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Handil Jaya	20%	293.392.000		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelutung	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Jelutung	20%	256.430.000		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebon Handil	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Kebon Handil	20%	288.471.875		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lebak bandung	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Lebak bandung	20%	306.638.000		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payo Lebar	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Payo Lebar	20%	296.582.000		20%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Jauh	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di kelurahan Talang Jauh	20%	313.618.000		20%				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%			80%				

		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan cempaka putih		20%	501.653.900		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handil Jaya	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Handil Jaya		20%	503.932.400		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelutung	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Jelutung		20%	848.482.000		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebon Handil	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Kebon Handil		20%	483.487.325		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak bandung	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Lebak bandung		20%	573.504.800		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Payo Lebar	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Payo Lebar		20%	649.622.000		20%				
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Jauh	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talang Jauh		20%	257.194.400		20%				

		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Cempaka Putih	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Handil Jaya	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Jelutung	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kebon Handil	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Lebak bandung	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Payo Lebar	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Talang Jauh	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		<b>Kecamatan Jambi Timur</b>										
		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN		89%			89%				
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		1 tahun	75.000.000		1 tahun				
		Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Terlaksananya lomba kelurahan 12 lomba dan pendataan PBB		1 tahun	61.321.000		1 tahun				
		Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan	Terlaksananya gotong royong dan pembelian alat-alat kebersihan		12 bulan	88.400.000		12 bulan				

		Kegiatan Pembinaan, Pengawasan ketentraman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terlaksanannya pengawasan terhadap pkl, forum pemberuan kebangsaan dan forum kewaspadaan dini		12 bulan	60.100.000		12 bulan				
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%			80%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kecamatan				474.100.000						
		Kegiatan Koordinasi dan penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan				229.924.600						
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir		50%			60%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tanjung Pinang			292.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Tanjung Sari			310.989.700						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rajawali	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Rajawali			292.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Talang Banjar			273.903.400						

		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sulanjana	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Sulanjana			329.355.400						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Kasang Jaya			288.819.400						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Budiman			292.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijenjang	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Sijenjang			292.200.000						
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	Jumlah saran dan prasarana yang difasilitasi di Kelurahan Kasang			270.223.400						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan		75%				80%			
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Pinang			601.093.200						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tanjung Sari			491.120.300						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rajawali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan			441.810.000						

			Rajawali									
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Banjar	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talang Banjar			631.610.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sijenjang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Sijenjang			333.948.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budiman	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Budiman			382.988.600						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang Jaya	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Kasang Jaya			417.906.000						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulanjana	Terciptanya infrastruktur yang memadai			334.466.400						
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			392.061.800						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tanjung Pinang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			100.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Tanjung Sari	Terciptanya infrastruktur yang memadai			80.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Rajawali	Terciptanya infrastruktur yang memadai			80.000.000						

		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Talang Banjar	Terciptanya infrastruktur yang memadai			200.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Sijenjang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			180.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Budiman	Terciptanya infrastruktur yang memadai			80.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kasang Jaya	Terciptanya infrastruktur yang memadai			120.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Sulanjana	Terciptanya infrastruktur yang memadai			80.000.000						
		Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kasang	Terciptanya infrastruktur yang memadai			80.000.000						
<b>PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>												
		<b>DISDIK</b>										
1	<b>Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan</b>	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF		'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%			'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%					
		Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310 Orang , Paket C : 408 Orang			'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang , Paket C : 450 Orang					
		Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup		'160 Orang			'180 Orang					

		Angka partisipasi kasar (APK) SD		114,5%			114,6%				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD		97,9%			98%				
		Angka Partisipasi SD		100,70%			100,80%				
		Rerata UAS SD		60,65%			60,73%				
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP		99,3%			99,5%				
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		72,3%			72,5%				
		Angka Partisipasi SMP		83,8%			84%				
		Rerata UN SMP		51,40%			51,50%				
		Kompetensi pendidik Dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional		93%			93,20%				
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan PNF	Kota Jambi	terakreditasi A 14%, B 57%, C 29%	44.145.000		terakreditasi A 16%, B 59%, C 25%	48.560.000			
	2	Kegiatan Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF	Kota Jambi	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kurikulum sesuai Standar Nasional	200.000.000		60%	225.000.000			
Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kurikulum Mulok				60%							

			Persentase peserta didik PAUD dan PNF mencapai mencapai standar nasional perkembangan anak, SKL dan SKNI		50%			60%				
3	Kegiatan Peningkatan Kelembagaan serta Sarana Prasarana PAUD dan PNF		- Persentase Satuan PAUD dan PNF yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan - Jumlah PAUD percontohan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Mulok - Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang memenuhi kriteria sekolah sehat	Kota Jambi	- 50% Satuan PAUD PNF - 6 Satuan Pendidikan - 15 Satuan Pendidikan	1.578.278.000 .000						
4	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD		Jumlah Satuan PAUD yang memperoleh fasilitas dukungan pengelolaan Dana BOP PAUD		345 lembaga PAUD, 320 Pendidik PAUD dan 660 orang tua anak usia dini yang belum terlayani PAUD, 137 Orang tim wajib PAUD	1.503.409.000		345 lembaga PAUD, 340 Pendidik PAUD dan 660 orang tua anak usia dini yang belum terlayani PAUD, 137 Orang tim wajib PAUD	1.653.749.000			
5	Kegiatan Peningkatan Minat Bakat Peserta didik PAUD dan PNF		Jumlah Peserta Didik PNF yang mengikuti lomba di tingkat Nasional	Kota Jambi	3 Orang	372.694.000		3 Orang	409.963.000			

			Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat di kota Jambi		4000 Peserta Didik			4000 Peserta Didik				
6	Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Partisipasi Bunda PAUD, Mitra PAUD dan CSR dalam pengembangan layanan PAUD</li> <li>- Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pedoman Pendidikan Keluarga</li> <li>- Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pedoman Pendidikan Karakter</li> <li>- Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan Layanan PAUD Holistik terintegrasi</li> </ul>	Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 33 Pelatihan bercerita Guru PAUD, 73 Workshop Bunda PAUD, 22 Lomba Bunda PAUD dan 40 Mitra PAUD dan PNF</li> <li>- 440 orang tua murid mengikuti kegiatan Parenting</li> <li>- 40%</li> <li>- 40%</li> </ul>	202.263.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 33 Pelatihan bercerita Guru PAUD, 73 Workshop Bunda PAUD, 22 Lomba Bunda PAUD dan 40 Mitra PAUD dan PNF</li> <li>- 440 orang tua murid mengikuti kegiatan Parenting</li> <li>- 50%</li> <li>- 50%</li> </ul>	222.489.000				
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Jumlah Anak Putus Sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan kesetaraan dan/atau layanan pendidikan kecakapan hidup		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paket A : 60 Orang, Paket B : 310 Orang ,</li> <li>Paket C : 408 Orang</li> </ul>	465.656.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paket A : 40 Orang,</li> <li>Paket B : 300 Orang ,</li> <li>Paket C : 450 Orang</li> </ul>	785.030.000				

8	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Anak Putus Sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan kesetaraan dan/atau layanan pendidikan kecakapan hidup	Kota Jambi	160 Orang	340.000.000		180 Orang	370.000.000	#####		
9	Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SD	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	Kota Jambi	19 SD	28.448.000		31 SD	31.293.000	#####		
10	Kegiatan Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum sesuai Standar Nasional - Jumlah Peserta Didik yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan - Jumlah Satuan Pendidikan SD rujukan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Mulok	Kota Jambi	- 205 SD yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum - 10.746 Peserta Didik - 4 SD Rujukan dan Standar Mulok	108.109.000		- 205 SD yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum - 10.542 Peserta Didik - 5 SD Rujukan dan Standar Mulok	118.920.000			
11	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan	Kota Jambi	35 SD	20.344.495.000		40 SD	23.357.583.000	v		v

12	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria budaya mutu</li> </ul>	Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 SD yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- 47 SD yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- 3 SD yang memenuhi kriteria budaya mutu</li> </ul>	108.473.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 SD yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- 48 SD yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- 3 SD yang memenuhi kriteria budaya mutu</li> </ul>	119.320.000			
13	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SD	Kota Jambi	187 SD	61.618.400.000		187 SD	61.856.000.000	V		V
14	Kegiatan Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD	- Jumlah Peserta Didik SD yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter	Kota Jambi	- 20 Peserta Didik- 205 SD	370.773.000		- 24 Peserta Didik- 205 SD	407.851.000			
15	Kegiatan Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	Persentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SD Negeri	Kota Jambi	100%	262.417.000		100%	288.658.000			
16	Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi SMP	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi A = 19 SMP Negeri</li> <li>- Akreditasi B = 6 SMP Negeri</li> </ul>	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi A = 21 SMP Negeri</li> <li>- Akreditasi B = 4 SMP Negeri</li> </ul>		0		

17	Kegiatan Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum sesuai Standar Nasional</li> <li>- Jumlah Peserta Didik yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP rujukan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Mulok</li> </ul>	Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 SMP yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum</li> <li>- 100 Peserta Didik</li> <li>- 25 SMP Rujukan dan Standar Mulok</li> </ul>	200.000.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 SMP yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum</li> <li>- 120 Peserta Didik</li> <li>- 25 SMP Rujukan dan Standar Mulok</li> </ul>	210.000.000			
18	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan</li> </ul>	Kota Jambi	7 SMP	14.079.591.000		7 SMP	15.338.534.000	V		V
19	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)</li> </ul>	Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 SMP yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- 4 SMP yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- 25 SMP yang menerapkan MPMBS</li> </ul>	122.356.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 SMP yang memenuhi kriteria adiwiyata</li> <li>- 6 SMP yang memenuhi kriteria sekolah sehat</li> <li>- 25 SMP yang menerapkan MPMBS</li> </ul>	134.591.000			

20	Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SMP		100%	27.233.000.000		100%	27.300.000.000	V		V
21	Kegiatan Peningkatan Minat Bakat, Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP	- Jumlah Cabang Perlombaan SMP yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter	Kota Jambi	- 11 dari 14 Cabang - 25 SMP	517.075.000		- 12 dari 14 Cabang - 25 SMP	568.783.000			
22	Kegiatan Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	Persentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SMP Negeri	Kota Jambi	100%	53.388.000		100%	58.727.000			
23	Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru	Persentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SMP Negeri	Kota Jambi	100%	203.080.000		100%	223.388.000			
24	Kegiatan Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional	- Jumlah Peserta Didik SD yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional - Jumlah Peserta Didik SMP yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional	Kota Jambi	- 20 Peserta Didik SD - 11 Peserta Didik SMP	296.408.000		- 24 Peserta Didik SD - 12 Peserta Didik SMP	326.049.000			

	25	Kegiatan Orientasi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas	- Jumlah Kepala Sekolah TK bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah Kepala Sekolah SD bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah Kepala Sekolah SMP bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah pengawas Sekolah TK Bersertifikat pengawas - Jumlah pengawas Sekolah SD Bersertifikat pengawas - Jumlah pengawas Sekolah SMP Bersertifikat pengawas	Kota Jambi	- 122 Kepala Sekolah SD - 23 Pengawas SD	1.200.000.000		- 30 Kepala Sekolah SD	1.500.000.000			
	26	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Jumlah Pendidik PAUD yang memenuhi Kompetensi sesuai SNP	Kota Jambi	281 pendidik paud	170.153.000		281 pendidik paud	187.168.000			
		'Jumlah Pendidik TK yang memenuhi Kompetensi sesuai SNP	136 pendidik TK				136 pendidik TK					
		Jumlah pengawas TK yg memenuhi Kompetensi sesuai SNP	6 pws TK				6 pws TK					
		Jumlah Instruktur Kursus memenuhi kompetensi sesuai SNP	385 instr kursus				385 instr kursus					
		'Jumlah Pamong SKB memenuhi kompetensi sesuai SNP	15 pamong				15 pamong					

			'Jumlah Penilik PNFI yg memenuhi kompetensi sesuai SNP		6 penilik PNFI			6 penilik PNFI				
			'Jumlah tutor Kesetaraan memenuhi kompetensi sesuai SNP		154 tutor kesetaraan			154 tutor kesetaraan				
27		Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Adiministrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD	Jumlah Pendidik SD memenuhi kompetensi sesuai SNP		266 guru kls	92.247.000		266 guru kls	210.000.000			
			Jumlah Kepala Sekolah SD memenuhi kompetensi sesuai SNP		89 kepek SD			89 kepek SD				
			Jumlah Pengawas SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	Kota Jambi	19 Pgws SD			19 Pgws SD				
			Jumlah TAS SD memenuhi kompetensi sesuai SNP		89 TAS SD			89 TAS SD				
			Jumlah tenaga Perpustakaan SD memenuhi kompetensi sesuai SNP		89 Tenaga Pstk			89 Tenaga Pstk				
28		Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Adiministrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium SMP	Jumlah Pendidik SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP		210 guru SMP	260.398.000		210 guru SMP	275.000.000			
			Jumlah Kepala Sekolah SMP memenuhi kompetensi	Kota Jambi	70 Kepsek SMP			70 Kepsek SMP				

			sesuai SNP								
			Jumlah Pengawas SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP		15 pws SMP			15 pws SMP			
			Jumlah TAS SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP		138 tas SMP			138 tas SMP			
			Jumlah tenaga Perpustakaan SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP		70 Tenaga perpus			70 Tenaga perpus			
			Jumlah tenaga LABORATORIUM SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP		138 Tenaga labor			138 Tenaga labor			
29	Kegiatan Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional		- Jumlah Pendidik PAUDNI Berprestasi - Jumlah Pendidik TK Berprestasi - Jumlah Pendidik SD Berprestasi - Jumlah Pendidik SMP Berprestasi	Kota Jambi	- 17 Pendidik PAUDNI - 3 Pendidik TK - 4 Pendidik SD - 3 Pendidik SMP	217.049.000		- 17 Pendidik PAUDNI - 3 Pendidik TK - 4 Pendidik SD - 3 Pendidik SMP	238.754.000		
30	Kegiatan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru		- Jumlah Guru TK Tersertifikasi - Jumlah Guru SD Tersertifikasi - Jumlah Guru SMP	Kota Jambi	- 45 Guru TK - 211 Guru SD - 118 Guru SMP	56.774.000		- 45 Guru TK - 211 Guru SD - 118 Guru SMP	62.451.000		

			Tersertifikasi									
31	Kegiatan Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	- Jumlah Guru PAUD Mengikuti PKG - Jumlah Guru Mengikuti KKG - Jumlah Guru Mengikuti MGMP	Kota Jambi	- 578 Guru - 1859 Guru - 1116 Guru	72.156.000			- 578 Guru - 1859 Guru - 1116 Guru	155.000.000			
32	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SD - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SMP	Kota Jambi	- 187 SD Negeri - 25 SMP Negeri	270.765.000			- 187 SD Negeri - 25 SMP Negeri	297.841.000			
<b>DINKES DAN RSUD</b>												
	<b>Program Peningkatan akses dan mutu pelayanan masyarakat</b>	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi		8 Puskesmas Utama				6 Puskesmas Utama				
		Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.		30%				40%				
		Indeks kepuasan		B				A				

			masyarakat pelayanan kesehatan rujukan									
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil		100%			100%				
			Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir		100%			100%				
			Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular		100%			100%				
			Persentase Rumah sakit pemerintah yang terakreditasi		50%			100%				
			Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional		100%			100%				
			Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan		100%			100%				
			Persentase pelayanan imunisasi		100%			100%				
			Persentase pelayanan gizi masyarakat		100%			100%				
			Cakupan pelayanan kesehatan balita		100%			100%				

			Cakupan Pelayanan kesehatan remaja		100%			100%			
			Cakupan Pelayanan kesehatan lansia		100%			100%			
			Persentase pencapaian keluarga berPHBS		80%			85%			
			Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM		70%			75%			
			Persentase pelayanan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja di puskesmas		100%			100%			
			Persentase ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi		100%			100%			
			Persentase peningkatan pelayanan kefarmasian		100%			100%			
	1	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase keterdediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Kota Jambi	96	5.350.000.000		96	5.417.673.260		
			Persentase pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai dengan standar di instalasi farmai		80		80	400.000.000			
	2	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan	Persentase tersedianya obat yang sesuai dengan	Kota Jambi	100%	250.000.000		100%	300.000.000		

		Rumah Sakit	kebutuhan dan terlaksananya pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar.									
	3	Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	Kota Jambi	30.000 Jiwa	8.700.000.000		30.000 Jiwa	8.800.000.000			
			Jumlah Pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat		50 org			50 org				
	4	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan Dasar				1.928.470.000						
	5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang terakreditasi	Kota Jambi	2 RS	1.400.000.000		2 RS	1.400.000.000			
			Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang dibina		2 RS			2 RS				
			Jumlah Ruma Sakit Swasta yang dibina		14 RS			14 RS				
	5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang menjalankan kesehatan tradisional	Kota Jambi	20 PKM	150.000.000		20 PKM	175.000.000			
	6	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan serta Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS	Kota Jambi	9.735	1.000.000.000		10.615	1.100.000.000			
			Strata Posyandu Purnama dan Mandiri		350			370				
	7	Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Ibu Hamil yang	Kota				13.300				

		Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	mendapat PMT	Jambi	12.091	239.306.000			358.959.000			
			Jumlah Ibu hamil yang mendapat tablet Tambah darah		12.091			13.300				
			Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah darah		48.651			53.517				
			Jumlah bayi yang baru lahir mendapat inisiasi menyusuh dini		12.148			13.363				
			Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif		6.364			2.001				
			Jumlah Balita yang mendapat PMT		4.857			5.343				
	8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak, Remaja, Lansia dan Keluarga Berencana	Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil		10.181			11.199				
			Jumlah Puskesmas yang melakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (4PK)		20			20				
			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan ANC (K4)	Kota Jambi	10.181	645.942.950		11.199	1.531.200.000			
			Jumlah Ibu Nifas yang mendapat pelayanan nifas 3x (KF 3)		11.905			13.095				
			Jumlah Penanganan					1.775				

			Komplikasi Obstetri		1.868							
			Jumlah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)		9.856			10348				
			Jumlah Puskesmas yang menjalankan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang		20 Pkm			20 Pkm				
	9	Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM	Kota Jambi	3	375.300.000		3	422.500.000			
	10	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Puskesmas	Kota Jambi	15	159.300.000		20	161.250.000			
			Jumlah Kelompok olah raga yang dibina di wilayah puskesmas		40		50					
	11	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelaksanaan fogging fokus	Kota Jambi	110	892.468.000		112	981.714.800			
			Pelaksanaan fogging sekolah		100		110					
			Persentase penderita malaria positif yang diobati standar		100%		100%					
			Persentase penderita klinis malaria yang diperiksa mikroskopis		100%		100%					
			Persentase penderita gigitan Hewan penular rabies diberi VAR sesuai SOP		100%		100%					
			Angka penemuan kasus TB				3.349					

			Paru		3.044							
			Jumlah sasaran yang diperiksa HIV		47.343			52.077				
			Jumlah ODHA yang diobati		1.445			1.530				
			Jumlah ODHA yang diobati supresi Viral load		1.229			1.377				
			Jumlah Pneumoni yang diobati		2.361			2.597				
			Jumlah skrining Hepatitis B pada Bumil		7.600			7.700				
	12	Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah pengunjung usia produktif yang mendapatkan pelayanan screening kesehatan	Kota Jambi	79.188	1.150.000.000		95.026	400.000.000			
Jumlah penderita hioertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar			31.930				42.574	300.000.000				
Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar			10.590				13.616	300.000.000				
Jumlah penderita gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapat pelayanan keseehatan sesuai dengan standar			7.682				10.754	350.000.000				

			Jumlah WUS yang mendapatkan Pelayanan IVA sesuai dengan standar		9.235			12.929	300.000.000				
			Jumlah anak remaja dideteksi CO		2.838			4.257	350.000.000				
	13	Kegiatan Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) serta Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah bayi yang di Imunisasi dasar lengkap	Kota Jambi	11.234	457.625.000		11.553	502.500.000				
			Jumlah bayi di bawah dua tahun yang mendapat Imunisasi lanjutan		7.690			8.145					
			Jumlah anak sekolah yang		28.741			31.610					
			Jumlah Puskesmas yang melaporkan kasus tepat waktu		20 pkm			20 pkm					
			Persentase penanganan kasus kurang dari 24 jam		100%			100%					
	14	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar SPAK	Kota Jambi	6 PKM	2.000.000.000		8 PKM	2.200.000.000				
	15	Kegiatan Pembangunan/Rehab Puskesmas/Pustu	Jumlah Puskesmas/pustu yang direhab serta peningkatan pustu menjadi puskesmas	Kota Jambi	1 Peningkatan Pustu jadi Pkm	1.500.000.000		10 pustu dan 5 pkm	3.000.000.000				
	17	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)		Kota Jambi		10.750.000.000			10.750.000.000				
	18	Kegiatan Dukungan Pelayanan BLUD		Kota Jambi		29.529.587.55			29.529.587.550				

					0							
19	Kegiatan Operasional RSUD H. Abdurrahman Sayoeti		Kota Jambi		14.000.000.00 0			15.000.000.000				
20	Kegiatan Pendidikan dan pengembangan mutu tenaga kesehatan		Kota Jambi		450.000.000			500.000.000				
21	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		Kota Jambi		272.000.000							
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendapatan Badan Layanan Umum daerah (BLUD)				28.223.470.00 0							
	Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Rumah Sakit				10.000.000							
	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan di Rumah Sakit yang Berfokus Pada Keselamatan Pasien				314.850.000							
	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit yang Memadai dan Memenuhi Standar				450.000.000							

KB											
		<b>Program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera</b>	Laju pertumbuhan penduduk		1,05			1,03			
			Persentase jumlah keluarga sejahtera		96,46%			96,69%			
1		Kegiatan Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase akseptor yang dilayani ber KB	Kota Jambi	100,00%	800.000.000		100,00%	850.000.000		
2		Kegiatan Institusi dan Partisipasi Masyarakat serta KIE	Persentase terbinanya peran serta mitra kerja, kader IMP serta pemahaman terhadap informasi KB	Kota Jambi	100,00%	1.000.000.000		100,00%	1.100.000.000		
3		Kegiatan Bantuan Operasional KB	Persentase peningkatan dukungan Program KB	Kota Jambi	93,00%	1.936.120.800		95,00%	2.393.933.000		
4		Kegiatan Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Kota Jambi	70,00%	450.000.000		75,00%	470.000.000		
5		Kegiatan Pengendalian Penduduk Dan Pengembangan Data/Informasi	Persentase pendataan serta kegiatan pengendalian penduduk dan pelaporan	Kota Jambi	65,00%	317.000.000		70,00%	327.000.000		
6		Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa/Konstruksi (DAK)	Jumlah pengadaan barang dan jasa/konstruksi	Kota Jambi	100,00%	1.298.000.000		100,00%	1.500.000.000		
		<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>									
		<b>Program Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan</b>	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi		50%			60%			
			Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi		73,33%			75,56%			

	1	Kegiatan Pembinaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Produktif dan Berprestasi	Kota Jambi	6 Kegiatan	1.200.000.000		6 Kegiatan	1.200.000.000			
	2	Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Atlit Pelajar yang dibina	Kota Jambi	PPLPD (20 atlit, 8 Pelatih, 4 ofisial, 4 cabor) Marching Band 75 orang, sepak bola wanita 25 orang, TOT 5 pelatih, 5 wasit	900.000.000		PPLPD (25 atlit, 10 Pelatih, 5 ofisial, 5 cabor) Marching Band 75 orang, sepak bola wanita 25 orang, TOT 5 pelatih, 5 wasit	481.000.000			
	3	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga		Kota Jambi	1 kali	53.050.000		1 kali	20.000.000			
	4	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarpras Olahraga dan Pemuda	pembangunan dan pemeliharaan sarpras olahraga	Kota Jambi	Pembangunan dan pemeliharaan sarpas	516.950.000		Pembangunan dan pemeliharaan sarpas	520.000.000			

	5	Kegiatan Pemassalan Olahraga	Jumlah event dankompetensi kegiatan olahraga	Kota Jambi	senam bersama 43 kali POPROV 1 kali POPDA 1 kali walikota cup 1 kali gubernur cup 1 kali olahraga tradisional 1 kali paralimpic 1 kali lari 10K	4.800.000.000						
-	-	<b>BKPSDMD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan		96%			97%				
			Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu		89%			91%				
			Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan		83%			88%				
			Persentase Penilaian Kinerja ASN		87%			87%				
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi		46%			53%				
			Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN		27%			52%				

1	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	Kota Jambi		400.000.000			500.000.000			
2	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kota Jambi		778.047.000			827.047.000			
3	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS	persentase CPNS yang telah mengikuti diklat Prajabatan	Kota Jambi		926.000.000			926.000.000			
4	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kota Jambi		349.000.000			349.000.000			
		Jumlah ASN yang memperoleh tugas belajar									
		Jumlah ASN yang memperoleh izin belajar									
5	Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi (Talent pool)	Persentase ASN yang mengikuti kompetensi dan potensi	Kota Jambi		330.000.000			330.000.000			
6	Kegiatan Penyusun Kebutuhan dan Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah formasi CPNS dan P3K yang terisi berdasarkan formasi yang ditetapkan 100% dari Formasi yang ditetapkan	Kota Jambi	100% dari Formasi yang ditetapkan	250.000.000		100% dari Formasi yang ditetapkan	250.000.000			
		Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan daerah 39 OPD	Kota Jambi	39 OPD			39 OPD				

7	Kegiatan Pembinaan Karir ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terisi	Kota Jambi	100%	700.000.000		100%	700.000				
		Persentase Jabatan Administrasi yang terisi	Kota Jambi	100%			100%					
		Persentase Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan	Kota Jambi	100%			100%					
8	Kegiatan Pembinaan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Spritual	Kota Jambi	200 ASN	575.453.000		200 ASN	575.453				
		Jumlah ASN yang mendapat layanan konseling	Kota Jambi	20 ASN			20 ASN					
		Jumlah ASN yang mengikuti Pengambilan Sumpah ASN	Kota Jambi	179 ASN			100 ASN					
		Jumlah ASN/ Atlit yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Korpri	Kota Jambi	51 ASN			51 ASN					
		Terlaksananya Penegakan atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN	Kota Jambi	4 Dok			4 Dok					
9	Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS				52.500.000							
10	Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Pangkat PNS				35.000.000							
11	Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai				125.000.000							
12	Penegakan Disiplin dan Peningkatan Kinerja ASN				450.000.000							

	13	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi											
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak											
1		Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ration KDRT		0,021%			0,02%					
			Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak		0,02371			0,0217					
			Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif		82%			85%					
	1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				1.082.000.000							
	2	Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak				467.000.000							
	3	Kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)				150.000.000							
	4	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				2.000.000.000							
2		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kelompok UEM yang Aktif		77%			79%					
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif		66%			67%					
			Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna		77%				80%				
			Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir		94%				95%				
	1	Kegiatan Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)				1.900.000.000							
	2	Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti											

		Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			282.000.000						
3		Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			2.100.000.000						
4		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG)			200.000.000						
		Sekretariat Daerah KDH dan WKDH									
		Proram Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagamaan	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan		75%			80%			
1		Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan			9.420.085.125						
2		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan Kesejahteraan			220.000.000						
3		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga			220.000.000						
		Program Peningkatan Koordinasi,fasilitasi dan MonitoringPerekonomian	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian		75%			75%			
1		Kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD			330.000.000						
2		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Ekonomi			310.000.000						
3		Kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi			440.000.000						
		Program Penyebarluasan Informasi	Persentase Penyebarluasan		72,23%			73,68%			

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Informasi Pembangunan Daerah								
1	Kegiatan peliputan dan dokumentasi pemerintah daerah				6.500.000.000						
2	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Komunikasi Sosial				1.500.000.000						
3	Kegiatan Publikasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi Daerah				1.500.000.000						
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan		Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	80%			90%				
			Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	2 Telaah/rekomendasi			3 Telaah rekomendasi				
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepala Daerah				250.000.000						
2	Pelaksanaan Keprotokolan Kepala Daerah				550.000.000						
3	Kegiatan Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah				3.200.000.000						
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumah Tanggaan		Persentase Pemenuhan pemeliharaan kesehatab dan perlengkapan kenutuhan rumahtangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%			100%				
1	Kegiatan Belanja Pemeliharaan Kesehatan				27.500.000,00						
2	Kegiatan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah				1.254.000.000,00						
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%			20%				
			Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%			27,27%				
1	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan				583.000.000,00						

	2	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan			220.000.000,0 0						
	3	Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan			398.200.000,0 0						
	Program Peningkatan Kerjasama Daerah		Persentase Fasilitasi Kerjasama luar negeri	100%			100%				
			Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	76,92%			85,71%				
	1	Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Dalam Negeri			386.655.000,0 0						
	2	Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri			271.700.000,0 0						
	3	Kegiatan Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama			325.645.000,0 0						
	Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase tertib administrasi pembangunan	75%			80%				
			Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	28,35%			33,32%				
	1	Kegiatan fasilitasi Evaluasi Pelaporan			385.000.000,0 0						
	2	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			2.200.000.000,00						
	3	Kegiatan Pengembangan sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara elektronik ( LPSE )			1.500.000.000,00						
	4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelola pengadaan barang / jasa			660.000.000,0 0						
	Program Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan		Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	61%			74%				
			Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	16%			20%				
			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	6 Kec			9 Kec				
	1	Kegiatan pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			200.000.000,0 0						

2	Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah				365.000.000,0 0						
3	Kegiatan Pengadaan Tanah				140.000.000,0 0						
4	Kegiatan Fasilitasi percepatan tapal batas wilayah				35.000.000,00 0,00						
Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan		Rata-rata indeks pelayanan publik		20%				20%			
		Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku		30%				50%			
		Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja		38%				59%			
	Penyusunan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi				130.000.000,0 0						
	Penataan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik				712.204.000,0 0						
	Penataan Perangkat Daerah				120.000.000,0 0						
Sekretariat DPRD											
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Pelayanan Kedinasan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		6 dok				6 dok			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD		9 dok				9 dok			
1	Kegiatan penyediaan kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah				4.869.000.000						
2	Kegiatan penyediaan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				6.835.735.000						
3	Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPR				2.162.600.000						
4	Penyediaan Kebutuhan Rapat-rapat Paripurna Istimewa				745.325.000						
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyebarluasan Informasi Kerutinan DPRD				2.434.285.000						

6	Pelayanan Keprotokolan DPRD				480.000.000						
7	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Perlengkapannya				653.455.000						
8	Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Penganggaran				5.557.610.000						
9	Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan				9.788.990.000						
10	Penyediaan Kebutuhan Reses dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat				2.477.000.000						
	Kesbangpol										
	<b>Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah		100%			100%				
1	Kegiatan Fasilitasi, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan				100.000.000						
2	Kegiatan Peningkatan ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi				100.000.000						
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				268.230.000						
4	Kegiatan Pembinaan Karakter dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				231.770.000						
	<b>Program Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Bagi Orkemas dan Parpol</b>	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif		100%			100%				
1	Kegiatan Koordinasi, Pemantauan Situasi dan Pendidikan Politik				168.364.500						
2	Kegiatan Pembinaan Pertanggung-jawaban Bantuan Keuangan bagi				31.635.500						

		Parpol										
	3	Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian Orkemas				300.000.000						
<b>PRIORITAS 3 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>												
	<b>DINSOS</b>											
1	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan , Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan</b>		Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar		100%				100%			
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%				100%			
			Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS		100%				100%			
			Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin		100%				100%			
1	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat	Meningkatnya Penanganan dan Penanggulangan, serta pendistribusian bantuan Korban Bencana	Kota Jambi	100 kk	850.000.000			130 kk	900.000.000			

	2	Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar	Meningkatnya layanan dalam menangani bagi orang yang terlantar dalam Menurunkan Perjalanan	Kota Jambi	225 Orang	150.000.000		225 Orang	150.000.000			
	3	Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kota Jambi	Kota Jambi	300 orang	1.000.000.000		350 Orang	1.000.000.000			
	4	Pelayanan dan Pembinaan Sosial Bagi Anak Yang Bermaslah Sosial dan Lansia	meningkatnya layanan dan binaan bagi anak yang bermasalah sosial, Pengangkatan Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Kota Jambi	300 Anak 110 Lansia Terlantar	600.000.000		450 Anak dan 165 Lansia Terlantar	600.000.000			
	5	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial	Meningkatnya Pelayanan Dan Reabilitasi Bagi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan tuna Wisma	Kota Jambi	20 %	600.000.000		20%	600.000.000			
	6	Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	meningkatnya layanan rehabilitasi penyandang disabilitas korban napza dan ODHA	Kota Jambi	20 %	300.000.000		20%	350.000.000			
	7	Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Pengurus LKS, K3S, PSM, TKSK & Karang Taruna Kota Jambi	Kota Jambi	48 Orang	394.844.000		58 Orang	400.000.000			

	8	Pelayanan dan Pembinaan Potensi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlestarikannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial kepada masyarakat	Kota Jambi	150 Orang	291.840.000		200 Orang	300.000.000			
	9	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial	Peningkatan Pengetahuan Tentang Izin Pengumpulan Uang di Kota Jambi	Kota Jambi	85 Orang	73.150.000		95 Orang	73.150.000			
	10	Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Terpadu Bagi Keluarga Miskin di Kota Jambi	Kota Jambi	10.000 KK	165.000.000		9.000 KK	200.000.000			
	11	Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Meningkatnya Pengetahuan Ketrampilan Berusaha membuat Kuliner Bagi Keluarga Miskin, Wanita rawan Sosial Ekonomi dan KUBE Fakir Miskin melalui Bantuan Peralatan	Kota Jambi	100 Orang	786.166.000		150 Orang	796.850.000			
	12	Pembinaan dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin	Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Bagi Fakir Miskin di Kota Jambi	Kota Jambi	8 E-warong	110.000.000		8 E-warong	110.000.000			
	<b>DISNAKERKOP UKM</b>											
	<b>Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>		Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan		7%			7%				

		Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis		57%			58%				
1	Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Pengadaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Terwujudnya keterampilan bagi pencari kerja yg mengikuti pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	Kota Jambi	85 %	940.000.000		90%	1.000.000.000			
2	Kegiatan Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja	Tersedianya data informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja	Kota Jambi	85 %	410.000.000		90%	440.251.000			
3	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dengan dengan PB/anjuran/dicabut/dihapus	Kota Jambi	85 %	200.000.000		90%	210.000.000			
4	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial KetenagaKerjaan	Terlaksananya perlindungan hukum dan jamsostek	Kota Jambi	93 %	270.000.000		95%	280.000.000			
	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</b>	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil		49,69%			50,38%				
1	Kegiatan Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	Kota Jambi	90%	165.954.750		95%	192.285			
2	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatkan motivasi berusaha bagi pelaku UKM dan tersedianya sertifikasi halal	Kota Jambi	90%	270.284.500		95%	270.285			

3	Kegiatan Penguatan pemasaran bagi Produk UMKM	Terwujudnya perluasan pemasaran dan informasi produk UKM kota jambi	Kota Jambi	87%	448.760.750		90%	475.761			
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>		Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT		57,33%			68,8%				
1	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kel koperasi dan pra kop utk mewujudkan kop yang sehat dari segi kelembagaan, usaha, keu dan sdm pengelola	Kota Jambi	90%	590.000.000		95%	625350.000.00			
2	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengawasan terhadap koperasi	Kota Jambi	87%	37.000.000		90%	39000.000.00			
<b><u>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN</u></b>											
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani</b>		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi		89%			89,5%				
		Penurunan Pangan segar yang Tercemar		6			5				
1	<b><u>Pengembangan Diversifikasi dan Keamanan Pangan</u></b>				1.125.100.000						
2	Pengembangan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat	Kota Jambi		1.125.100.000			1.527.400.000			
		Persentase peningkatan pengentasan daerah rawan pangan	Kota Jambi	6%	1.050.100.000		6%	1.527.400.000			

	3	Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan		Kota Jambi		425.000.000			425.000.000			
	<b>Program Peningkatan Produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan</b>		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)		2.989			3.080				
					79			82				
	1	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Kota Jambi	15%	700.000.000		15%	800.000.000			
	2	Peningkatan Jumlah Bibit Buah Bersertifikat	IKK: Persentase peningkatan produksi bibit unggul bersertifikasi	Kota Jambi	1500 btg	320.000.000		1500 btg	400.000.000			
	3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Peningkatan mutu ternak dan Optimalisasi pengolahan produk ternak	Kota Jambi	60%	544.000.000		60%	650.000.000			
	4	Pengembangan Rumah Potong Hewan	Penyediaan daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Kota Jambi	5100	500.000.000		5200	550.000.000			
	5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	Kota Jambi	2%	200.000.000		2%	225.000.000			
	6	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Meningkatnya produksi produk perikanan	Kota Jambi	2,50%	550.000.000		2,50%	700.000.000			
	7	Pengembangan Perbenihan Ikan	Peningkatan Produksi benih Ikan (ekor)	Kota Jambi	64.264.750 ekor	300.000.000		66.192.693 ekor	425.000.000			
	8	Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi tepat guna	Kota Jambi	45%	200.000.000		50%	348.470.000			
<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>												

	<b>Pembinaan Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan</b>	Cakupan Bina Perdagangan		92,25%			95,25%				
1	Peningkatan Penagihan dan Penerimaan Retribusi	Jumlah penerimaan PAD	Kota Jambi	4,700 M	100.000.000		4,700 M	116.000.000			
2	Penyelenggaraan Pendataan Objek Retribusi Pasar	Jumlah perizinan perpasaran yang diterbitkan	Kota Jambi	750 izin	80.000.000		750 izin	85.000.000			
3	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	Jumlah kebersihan pasar milik pemerintah daerah	Kota Jambi	20 unit pasar	3.600.000.000		20 unit pasar	3.610.000.000			
4	Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar Daerah dan PKL di Lingkungan Pasar Daerah	Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban	Kota Jambi	20 unit pasar	370.000.000		20 unit pasar	375.000.000			
5	Pemantauan Distribusi Barang	Jumlah pelaku usaha formal distribusi barang	Kota Jambi	34 pelaku usaha	400.000.000		34 pelaku usaha	415.000.000			
6	Pembinaan Pengawasan dan Peningkatan Pelaku Usaha Formal	Jumlah pelaku usaha formal	Kota Jambi	225 pelaku usaha	100.000.000		225 pelaku usaha	105.000.000			
7	Penyuluhan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah pelaku usaha formal	Kota Jambi	145 pelaku usaha	50.000.000		145 pelaku usaha	55.000.000			
8	Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang	Kota Jambi	1700 unit	400.000.000		1700 unit	415.000.000			
9	Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan Penyuluhan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan perdagangan	Kota Jambi	170 pelaku usaha	200.000.000		170 pelaku usaha	215.000.000			
10	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan akses pasar	Kota Jambi	32 pelaku usaha	50.000.000		32 pelaku usaha	55.000.000			
11	Pengembangan Sarana dan	Persentase sarana dan	Kota	60%			60%				

		Prasarana Perdagangan	prasarana perdagangan	Jambi		600.000.000			625.000.000			
		<b>Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah</b>	Cakupan Bina IKM		5,35			6,5				
	1	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	Jumlah industri kimia, agro dan hasil hutan	Kota Jambi	135 unit IKM	125.000.000		135 unit IKM	150.000.000			
	2	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan	Jumlah industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan	Kota Jambi	33 unit IKM	100.000.000		33 unit IKM	115.000.000			
	3	Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah	Jumlah SDM industri kecil dan menengah yang berkualitas	Kota Jambi	85 unit IKM	100.000.000		85 unit IKM	115.000.000			
	4	Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	Jumlah industri kecil dan menengah yang kemasannya di kembangkan	Kota Jambi	85 unit IKM	125.000.000		85 unit IKM	140.000.000			
	5	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah industri kecil dan menengah yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha	Kota Jambi	85 unit IKM	1.500.000.000		85 unit IKM	1.525.000.000			
	6	Promosi/Pameran Produk Jambi	Jumlah industri kecil dan menengah yang ikut pameran/promosi	Kota Jambi	20 unit IKM	500.000.000		20 unit IKM	525.000.000			
<b>PRIORITAS 4 : PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH</b>												
<b>PARIWISATA</b>												
		<b>Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata</b>	Jumlah kunjungan wisatawan		500.000			600.000				
			PAD sektor pariwisata		45,5 m			47 M				

		Lama Kunjungan wisata		3 Hari			3 Hari				
1	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Kota Jambi		700.000.000			700.000			
2	Pengembangan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Terlaksananya kegiatan pagelaran, penampilan promosi dan pemasaran pariwisata	Kota Jambi		1.075.000.000			1.120.000			
3	Monitoring dan Evaluasi Kepariwisataan	Meningkatnya usaha pariwisata yang sehat dan halal	Kota Jambi		75.000.000			80.000			
4	Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	Tersedianya Masterplan, Siteland DED perencanaan pariwisata Kota Jambi	Kota Jambi		150.000.000			160.000			
<b>Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan</b>		Jumlah pelestarian penyelenggaraan even seni dan budaya		5			6				
1	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya pelaksanaan pagelaran seni dan budaya dan pemeliharaan dan pengelolaan cagar budaya	Kota Jambi		1.425.000.000			1.470.000			
2	Penyusunan Profil Seni Budaya	Tersedianya profil seni budaya Kota Jambi	Kota Jambi		75.000.000			75.000			
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah										
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Implementasi Peraturan Pajak dan Perencanaan serta Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diselesaikan.		<b>3 Dokumen peraturan pajak, 3 Dokumen</b>			<b>3 Dokumen peraturan pajak, 3 Dokumen perencanaan, 12 kali evaluasi pajak dan</b>				

				<b>perencanaan, 12 kali evaluasi pajak dan retribusi daerah</b>			<b>retribusi daerah</b>				
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	<b>100%</b>			<b>100%</b>				
			Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	<b>63%</b>			<b>65%</b>				
			Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	<b>15%</b>			<b>20%</b>				
1	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah				700.000.000						
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah				355.000.000						
3	Pengembangan sistem informasi pajak daerah				600.000.000						
4	Penusunan pelaporan pendapat daerah				89.000.000						
5	Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah				200.000.000						
6	Pengendalian dan penagihan pajak daerah				1.700.000.000						



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2020 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Rencana Program OPD Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	OPD
I  1	<b>URUSAN WAJIB</b>  <i>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</i>  Pendidikan	Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF</li> <li>-Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan</li> <li>-Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup</li> <li>-Angka partisipasi kasar (APK) SD.</li> <li>-Angka Partisipasi Murni (APM) SD.</li> <li>-Angka Partisipasi SD.</li> <li>-Rerata UAS SD.</li> <li>-Angka partisipasi kasar (APK) SMP.</li> <li>-Angka Partisipasi Murni (APM) SMP.</li> <li>-Angka Partisipasi SMP.</li> <li>-Rerata UN SMP.</li> <li>-Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar</li> </ul>	<p>(100%;60%;35%)</p> <p>(60 org;310 org; 408 org)</p> <p>160 org</p> <p>114,5%</p> <p>97,9%</p> <p>100,70%</p> <p>60,65%</p> <p>99,3%</p> <p>72,3%</p> <p>83,8%</p> <p>51,40%</p> <p>93%</p>	Dinas Pendidikan

			nasional.		
2	Kesehatan	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	-Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi. -Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas sesuai standar minimal 85%. -Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan. -Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil. -Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. -Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular.	8 Puskesmas Utama 30%  B 100% 100% 100%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Keterpaduan Tata Ruang  Program Perencanaan Teknis ke PU-an  Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong  Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan  Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan	Rasio Kesesuaian Ruang  Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan  Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik  -Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum. -Rasio Cakupan Pelayanan Air	95,2%  85%  15,79%  68,39% 1,56% 61,46% 91,79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Jalan dan Jembatan	<p>Limbah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rasio Bangunan dalam kondisi baik.</li> <li>-Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik.</li> <li>-Rasio Jembatan dalam Kondisi Baik.</li> <li>-Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik</li> </ul>	<p>97,3%</p> <p>15,79%</p>	
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah</p> <p>Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan</p> <p>Program Peningkatan Karakter Ideologi dan wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.</li> <li>-Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi.</li> <li>-Rasio Petugas perlindungan masyarakat.</li> <li>-Persentase pelayanan kesiagaan dini</li> <li>-Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan.</li> <li>-Persentase Peningkatan Forum Kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah</li> <li>-Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Kondisi Daerah yang</li> </ul>	<p>59%</p> <p>59%</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Damkar</p> <p>Kesbangpol</p>

6	Sosial	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Kondusif -Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. -Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. -Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS.	17,50%  17,50%  17,50%	Dinas Sosial
1	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b> Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	-Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin  -Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih dan Ditempatkan. -Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	17,50%  7%  57%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesejahteraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	-Penurunan Ratio KDRT -Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak -Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	0,021% 0,02371%  82%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

		Program peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat	-Persentase Kelompok UEM yang Aktif	77%	Perlindungan Anak
			-Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	66%	
			-Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	77%	
			-Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	94%	
3	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani	-Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	89%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-Penurunan Pangan segar yang Tercemar	6	
		Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	-Indeks Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	64,84%	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	-Indeks Tutupan Lahan	61,14%	
			-Indeks Kualitas Air	43,32%	
			-Indeks Kualitas Udara	91,30%	
			-Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	75%	
			-Persentase Jumlah Pengurangan Sampah di Tingkat Sumber	22	
5	Administrasi Kependudukan dan	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	96%	Dinas Kependudukan

	Pencatatan Sipil				dan Pencatatan Sipil
6	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	-Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil Validitas database kependudukan	86,5% 89%	
7	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik	Capaian Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan Cakupan yang Terlayani Angkutan Umum	74% 54,75%	Dinas Perhubungan
			-Rasio Aplikasi Pemerintah Kota Jambi	77%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			-Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terkoneksi infrastruktur TIK -Cakupan akses dan kualitas informasi publik	57,69% 45%	
8	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Program Manajemen Data / Informasi / Statistik Daerah Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	-Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKK) -Persentase Data / Informasi / Statistik Daerah yang Dihasilkan -Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih dan Ditempatkan -Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan	35% 20% 7% 57%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil

			hubungan industrial yang harmonis		dan Menengah
9	Penanaman Modal	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	-Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	49,69%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT	57,33%	
		Program : Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	430,5M	
		Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,75%	
10	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan dan Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	50%	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	73,33%	
11	Kebudayaan	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan even Seni Budaya	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Perpustakaan	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	55.504 Pengunjung	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

13	Kearsipan	Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah PD yang Menerapkan Arsip Sesuai Standar	16 PD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>II <u>URUSAN PILIHAN</u></b>					
<b><i>URUSAN PILIHAN</i></b>					
1	Pariwisata	Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata	-Jumlah kunjungan wisatawan  -PAD sektor pariwisata -Lama Kunjungan wisata	500.000  45,5 M 3 hari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pertanian	Program Peningkatan Mutu Produksi dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	2989 79	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Perdagangan	Pembinaan Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan Bina Perdagangan	92,25%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Kehutanan	Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati	Terpeliharanya kelestarian SDA dan fungsi lingkungan	10,538	Dinas Lingkungan Hidup
5	Perindustrian	Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil Menengah	Cakupan Bina IKM	5,35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

III	<b><u>PENUNJANG URUSAN</u></b> <b><u>PENUNJANG URUSAN</u></b>					
	1	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%	Inspektorat
	2	Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	Badan Perencanaan Pembangunan
			Program Penelitian dan pengembangan	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	
3	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	-Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	35 OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			-Jumlah OPD yang melaksanakan Tata Kelola Penatausahaan Belanja Sesuai Ketentuan dan Peraturan	25 OPD		
			-Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 OPD		
				40 OPD & 11 BLUD		

		Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Implementasi Peraturan Pajak dan Perencanaan serta Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diselesaikan</li> </ul>	<b>3 Dokumen peraturan pajak, 3 Dokumen perencanaan, 12 kali evaluasi pajak dan retribusi daerah</b>	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Penataan, Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	- Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
			- Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	63%	
			- Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	15%	
			-Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	96%	
			-Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	89%	
-Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan	83%				
			-Persentase Penilaian Kinerja ASN	87%	
			-Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	46%	
			-Persentase Pengembangan	27%	

IV	<b>PENDUKUNG</b> <b>PENDUKUNG</b>	1	Sekretariat Daerah	Kualifikasi ASN			
				Program Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan	-Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	75%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian	-Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	75%	
				Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah	-Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	72,23%	
				Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	80%	
					Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	2 telaah/ rekomendasi	
				Program Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtangaan	Persentase Pemenuhan pemeliharaan kesehatah dan perlengkapan kenutuhan rumahtangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	
				Program Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	61%	
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	16%					
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	6 Kec					
	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar	76,47%				

			Daerah dan Daerah Lainnya		
			Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	76,92%	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	Sekretariat DPRD
		Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	
			Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	
		Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	30%	
			Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	38%	
Program Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD	Persentase tertib administrasi pembangunan	75%			
		Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	28,35%		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	6 Dok	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9 Dok	

V	<b>KEWILAYAHAN</b>				
1	<b>KEWILAYAHAN</b> Kecamatan	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	89%	Kecamatan Kota Baru;
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	75%	Kecamatan Telanaipura;
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	50%	Kecamatan Jelutung;
		Program Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	50%	Kecamatan Pasar Jambi;
					Kecamatan Jambi Timur;
					Kecamatan Danau Teluk;
					Kecamatan Pelayangan;
					Kecamatan Alam Barajo;
					Kecamatan Danau Sipin;
					Kecamatan Paal Merah

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Capaian IKU Kota Jambi sampai dengan tahun 2021 dijabarkan berdasarkan Visi dan Misi Kota Jambi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Jambi Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks	2,44
3	Nilai SAKIP	Nilai	BB
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86
5	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	Persen	100
6	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	Persen	100
7	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan	Persen	100
8	Cakupan pelayanan transportasi	Persen	64,38
9	Persentase Pelayanan Perparkiran	Persen	80,74
10	Cakupan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat	Persen	75
11	Rasio jalan kota dalam kondisi baik	Persen	89,74
12	Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persen	83
13	Ratio titik genangan	titik	19
14	Ratio ketaatan RTRW	Persen	60
15	Cakupan Layanan Utilitas Perkotaan	Persen	47,9
16	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	79,78
17	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,32
18	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,30
19	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	29,14
20	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,43
21	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9
22	Realisasi Investasi	Rp	430,5 M
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66
24	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Persen	10,1
25	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,35
26	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,28
28	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,70
29	Jumlah peninggalan budaya yang dilestarikan	Unit	3
30	Indeks Gini Ratio	Poin	0,36
31	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,58
32	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,91
33	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	68,20
34	Kota Layak Anak	Peringkat	Nindya
35	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	61,43
36	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	50,5
37	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70

Tabel 6.2.  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi  
Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2020
1	2	3	4
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
01.00	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81
01.02	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,22
01.03	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,43
01.04	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9
01.05	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,25
01.06	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,54
01.07	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,29
01.08	Indeks Gini Ratio	Poin	0,36

01.09	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86
01.10	Opini BPK	Tahun	WTP
01.11	Skor Pola Pangan Harapan		88,6
	Kesejahteraan Sosial		
01.00	Pendidikan		
01.01	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,28
01.02	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,7
01.03	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	Tahun	17,32
01.04	Keluarga pra sejahtera dan sejahterah I	Persen	96,46
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Pelayanan Urusan Wajib		
	Terkait Pelayanan Dasar		
01.00	Pendidikan		
01.02	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	Tahun	APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%
01.03	Angka partisipasi kasar (APK) SD	Persen	114,5

01.04	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	97,9
01.05	Angka Partisipasi SD	Persen	100,70
01.06	Rerata UAS SD	Persen	60,65
01.07	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Persen	99,3
01.08	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	72,3
01.09	Angka Partisipasi SMP	Persen	83,8
01.10	Rerata UN SMP	Persen	51,40
01.11	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Persen	
02.00	Kesehatan		
02.01	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,35
02.02	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	Tahun	8 Puskesmas Utama
02.03	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas sesuai standar minimal 85%	Persen	30
02.04	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100
02.05	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100
02.06	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	Indeks	B
02.07	Cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100
02.08	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	Orang	30.000

03.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
03.01	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	5.67
03.02	Ratio titik genangan	titik	19
03.03	Ratio ketaatan RTRW	Persen	95,20
03.04	Rasio jalan status kota dalam Kondisi Baik	Persen	91,79
03.05	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	68,39
03.06	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	Persen	1,07
03.07	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	Persen	61,99
03.09	Rasio Kesesuaian Ruang	Persen	95.2
03.08	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	97.3
03.09	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	15,79
03.10	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	Persen	85
04.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
04.01	Persentase perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persen	40
04.02	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Persen	83
04.03	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	Persen	25

04.04	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	Persen	82
05.00	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
05.01	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	Tahun	80
05.02	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	Persen	100
05.03	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	Persen	85
05.04	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Persen	59
05.05	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	Persen	59
05.06	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	Persen	100
05.07	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	Persen	100
05.08	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	Persen	20
05.09	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	Persen	20
05.10	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	Persen	100
05.11	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	Persen	100
06.00	Sosial		
06.01	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70

06.02	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	17,50
06.03	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	17,50
06.04	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	Persen	17,50
06.05	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	Persen	17,50
	Tidak Terkait Layanan Dasar		
01.00	Tenaga Kerja		
01.01	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
01.02	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	Persen	57
02.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
02.01	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94.91
02.02	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	68.20
02.03	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	Persen	80
02.04	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	61.43
02.05	Penurunan Ratio KDRT	Persen	0,021
02.06	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	0,02371

02.07	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Persen	82
03.00	Pangan		
03.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	Skor	2,989
			79
03.02	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	89%
03.03	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	Tahun	6
04.00	PERTANAHAN		
04.01	Persentase luas lahan yang bersertifikat		
05.00	Lingkungan Hidup		
05.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.02
05.02	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola	Persen	97.5
05.03	Indeks Kualitas Air	Indeks	47,14
05.04	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.84
05.05	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	37,05
05.06	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	Persen	75
05.07	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	Persen	24
05.08	Indeks pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks	64,84
06.00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

06.01	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	96%
06.02	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	86,5%
06.03	Validitas Database Kependudukan	Persen	89%
07.00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
07.01	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persen	61.43
07.02	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	Persen	77
07.03	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	Persen	66
07.04	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	Persen	77
07.05	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	Persen	94
08.00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
08.01	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	1,05
08.02	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	Persen	96,46
08.03	Persentase PUS peserta KB yang ber KB		
08.04	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera		

09.00	Perhubungan		
09.01	Cakupan pelayanan transportasi	Persen	64,38
09.02	Persentase Pelayanan Perparkiran	Persen	80.74
09.03	Cakupan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Darat	Persen	74
09.04	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	Persen	74
09.05	Cakupan yang terlayani angkutan umum	Persen	54.75
09.06	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	Titik	36 Titik
09.07	Persentase Pelayanan Perparkiran	Persen	80.74
10.00	Komunikasi dan Informatika		
10.01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,44
10.02	Rasio Aplikasi Pemerintah Kota Jambi	Persen	77
10.03	Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terkoneksi infrastruktur TIK	Persen	57,69
10.04	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	Persen	45
11.00	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
11.01	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Persen	8,54
11.02	Persentase Daya Saing Produk IKM	Persen	5,35
11.03	Persentase koperasi berkualitas	Persen	19,27

12.00	Penanaman Modal		
12.01	Realisasi Investasi	Rp	430,5 M
13.00	Kepemudaan dan Olahraga		
13.01	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	50,5
13.02	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	Persen	50
13.03	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	Persen	73,33
14.00	Statistik		
14.01	Persentase Data / Informasi / Statistik Daerah Yang Dihasilkan	Persen	20
15.00	Persandian		
15.01	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKK)	Indeks	35
16.00	Kebudayaan		
16.01	Jumlah penyelenggaraan even seni budaya	Unit	4
17.00	Perpustakaan		
17.01	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	55.504
18.00	Kearsipan		
18.01	Jumlah PD yang Menerapkan Arsip Sesuai Standar	OPD	16
18.02	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	5

	Pelayanan Urusan Pilihan		
01.00	Pariwisata		
01.01	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	500,000
01.02	PAD Sektor Pariwisata	Rp	45,5 M
01.03	Lama Kunjungan wisata	Hari	3
02.00	Pertanian		
02.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Energi/Protein)	(gram/ kapita/ hari)	2,989
			79
03.00	Perdagangan		
03.01	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persen	52
03.02	Cakupan Bina Perdagangan	Persen	92,25
06.00	Perindustrian		
06.01	Persentase Daya Saing Produk IKM	Persen	5,35
06.02	Cakupan Bina IKM	Persen	5,35
	Penunjang Urusan		
01.00	Perencanaan Pembangunan		
01.01	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100
02.00	Keuangan		

02.01	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9
02.02	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	PD	35
02.03	Jumlah OPD yang melaksanakan Tata Kelola Penatausahaan Belanja Sesuai Ketentuan dan Peraturan	PD	25
02.04	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	PD dan BLUD	40 dan 11
02.05	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	PD	20
02.06	Jumlah Implementasi Peraturan Pajak dan Perencanaan serta Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah yang diselesaikan	Dokumen	<b>3 Dokumen peraturan pajak, 3 Dokumen perencanaan, 12 kali evaluasi pajak dan retribusi daerah</b>
02.07	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Persen	<b>100</b>
02.08	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	Persen	<b>63</b>

02.09	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	Persen	15
03.00	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
03.01	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74
03.02	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	Persen	96
03.03	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	89
03.04	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	Persen	83
03.05	Persentase Penilaian Kinerja ASN	Persen	87
03.06	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	Persen	46
03.07	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	Persen	27
05.00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
05.01	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	Persen	100
06.00	Pengawasan		
06.01	Indeks persepsi anti Korupsi	Indeks	
06.02	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persen	100
07.00	Sekretariat Dewan		
07.01	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	6
07.02	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	Dokumen	9

08.00	Sekretariat Daerah		
08.01	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	Persen	80
08.02	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	Telaah/ rekomendasi	2
08.03	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	Persen	17,3
08.04	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	Persen	61
08.05	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	Persen	16
08.06	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan	6
08.07	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	Persen	20
08.08	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Daerah Lainnya	Persen	76,47
08.09	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	Persen	27,27
08.10	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	Persen	50
08.11	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	Persen	76,92
08.12	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	Persen	75

08.13	Rata-rata indeks pelayanan publik	Indeks	20
08.14	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	30
08.15	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	Persen	38
08.16	Rata-rata indeks pelayanan publik	Indeks	B
08.17	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Persen	75
08.18	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persen	72,23
08.19	Persentase tertib administrasi pembangunan	Persen	75
08.20	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	Persen	28,35
09.00	Pemerintahan Umum		
09.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	Indeks	89
09.02	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	Persen	75
09.03	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	Persen	50
09.04	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	Persen	50
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
	Kemampuan Ekonomi		

01.00	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
01.01	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB
01.02	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,44
01.03	Nilai SAKIP	Nilai	A
02.00	Pertanian		
02.01	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Energi	gram/ kapita/ hari	2,989
	Protein		79

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2020 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang bertema **PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PELAYANAN PRIMA**. Program dan kegiatan prioritas pada RKPD tahun 2020 disusun mengikuti prinsip *money follow programs* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2019 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jambi . Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2020.

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME